

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raden Saleh No. 8A Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016

PADANG, DESEMBER 2016

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan laporan perkembangan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016.

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini kami banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan. Atas segala bentuk partisipasinya diucapkan terima kasih.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang.

Padang, Desember 2016

KEPALA DINAS

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si

NIP. 19581029 198703 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB.I PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
A. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup.....	1
1. Program dan Kegiatan	1
2. Realisasi Program dan Kegiatan	2
3. Permasalahan dan Solusi	52
B. Urusan Pilihan Kehutanan.....	54
1. Program dan Kegiatan	54
2. Realisasi Program dan Kegiatan.....	56
3. Permasalahan dan Solusi.....	104
BAB. II PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI (APBN)	109
A. Latar Belakang.....	126
B. Dasar Hukum	126
C. Instansi Pemberi Dana Dekonstrasi	129
D. Sumber Dana	129
E, Rencana Kegiatan	129
E. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana	131
F. Permasalahan dan Solusi	134
BAB. III. PENUTUP	139
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	139
B. Penyelenggaraan Dekonsentrasi (APBN)	140

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Realisasi Fisik dan Keuangan persub-kegiatan pada kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan Tahun 2016	3
Tabel 1.2. Operasi intelijen/Pulbaket Gangguan Keamanan Hutan Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2016.....	4
Tabel 1.3. Kegiatan Patroli Pengamanan hutan Gabungan Tahun 2016.....	5
Tabel 1.4. Koordinasi Pengamanan Hutan Tahun 2016	6
Tabel 1.5. Lokasi Monitoring dan Evaluasi Kasus Tipihut	7
Tabel 1.6. Perkembangan Kasus Illegal Logging Tahun 2016	8
Tabel 1.7. Menjadi Saksi Penanganan Barang Bukti di Kabupaten/Kota	8
Tabel 1.8. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2016	14
Tabel 1.9. Lokasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Bangunan Konservasi	42
Tabel 1.10. Kegiatan Pengukuran Lokasi Demplot Baru	62
Tabel 1.11. Monitoring dan Evaluasi budidaya HHBK yang mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	63
Tabel 1.12. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian HHBK di lokasi HKm/HN yang telah memiliki IUPHHK	65
Tabel 1.13. Pembinaan Kelompok Tani Dalam Budidaya Aneka Usaha Kehutanan .	66
Tabel 2.1. Rincian Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	112
Tabel 2.2. Alokasi dan Realisasi Dana Masing-Masing Output Dan Sub Output Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	114
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Patroli/Operasi Pengamanan Hutan Tahun 2016	133
Tabel 2.4. Realisasi Kegiatan pada Program, Evaluasi dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi Tahun 2016	136

BAB I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 mengemban amanat Penyelenggaraan 2 Urusan yaitu Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Alokasi Dana berdasarkan DPPA untuk kedua urusan tersebut sebesar Rp. 15.569.840.425,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.570.138.936 (87,16%) dan realisasi fisik sebesar 99,75%. Namun berdasarkan penundaan, dengan dana Rp. 14.398.527.115,- didapatkan realisasi keuangan sebesar 94,25%.

Sebagai pertanggung jawaban atas Penyelenggaraan Urusan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap akhir tahunnya melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan baik realisasi fisik maupun keuangan.

A. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Wajib adalah Urusan Bidang Lingkungan Hidup.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 sebanyak 4 Program dengan 19 Kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini Rp 5.985.360.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.031.067.085 (84,06 %) dan realisasi fisik 100 %. Berdasarkan penundaan, dengan dana Rp. 5.599.783.100 didapatkan realisasi keuangan sebesar 89,84%.

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
 - 2) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
 - 3) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
 - 4) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
 - 5) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - 6) Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 1) Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan
 - 2) Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan
 - 3) Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP
- c. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam :
- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 2) Pengembangan Sarana Konservasi Tanah
 - 3) Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL
 - 4) Pembinaan Monitoring Pengelolaan DAS
 - 5) Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
 - 6) Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK)
 - 7) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD)
 - 8) Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016+APBD)
 - 9) Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK-2016)

2. Realisasi Program dan Kegiatan

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari :

1) Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

- Capaian : Berkurangnya tekanan kerusakan hutan dan lahan serta penurunan emisi gas rumah kaca (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 325.000.000,-
: Penundaan, Rp. 249.668.000,-
- Output : Terlaksananya psikotest, operasi intelijen, operasi refresif/pamhut, monev kasus dan tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan koordinasi (6 Laporan)
- Outcome : Menurunnya kasus illegal logging yang ditindak lanjuti (4%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp.222.141.200,- berdasarkan :
DPPA, : (68,35 %)
Penundaan : (88,97%)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dilaksanakan di Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan yakni Seksi Penyidikan dan Pengamanan Hutan, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, dengan realisasi per sub kegiatan, yaitu :

Tabel 1.1. Realisasi Fisik dan Keuangan persub-kegiatan pada kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan Tahun 2016

No	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	Intelijen/Pulbaket	91.700.000,-	100	91.050.000,-	Realisasi Keuangan 99,3%, sisa mati. Rp.650.000,-
2	Patroli Pengamanan Hutan	49.800.000,-	100	49.750.000,-	Realisasi Keuangan 99,9 %, sisa mati Rp.50.000,-
3	Koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan di Kab/Kota.	33.300.000,-	100	29.480.000,-	Realisasi Keuangan 88,5 %, sisa mati. Rp 3.820.000,-
4	Monitoring evaluasi tindak pidana Kehutanan di Kab/ Kota	26.880.000,-	100	25.200.000,-	Realisasi Keuangan 93,8%, sisa mati, Rp.1.680.000,-
5	Menjadi Saksi/ Penanganan Barang bukti	3.360.000,-	100	3.260.000,-	Realisasi Keuangan 97%, Dana cadangan (<i>on call</i>) Berdasarkan permintaan kab/ kota.sisa mati Rp 100.000,-
6	Konsultasi dan Koordinasi Pengamanan Hutan di Kementerian Kehutanan	7.820.000,-	100	6.910.000,-	Realisasi Keuangan 88,4%, Sisa mati Rp.782.000,-
7	Psikotes Tenaga Polhut dan Tenaga Pamhut lainnya.	6.200.000,-	100	6.200.000,-	Realisasi Keuangan 100%
8	ATK/Pengadaan	5.986.000,-	100	3.538.500	Realisasi Keuangan 59,1%, sisa mati Rp 2.447.500,-
9	Pemeliharaan senpi	10.230.000,-	100	-	Realisasi Keuangan 0 %, sisa mati Rp 11.230.000,-
10	Pembahasan hasil intelijen	1.000.000,-	100		
11	BBM	13.430.000,-		6.752.700	Realisasi Keuangan 50,3%, Sisa mati Rp. 6.677.300,-
	Jumlah	249.668.000,-		222.141.200	Realisasi Keuangan 89 %, Sisa mati Rp 27.526.800,-

➤ **Sub Kegiatan Pulbaket/Intelijen Gangguan Keamanan Hutan Tindak Pidana Kehutanan**

Pendanaan sebesar Rp. 91.700.000,- (*Sembilan puluh satu Juta tujuh ratus Ribu Rupiah*), berupa operasi intelijen/Pulbaket sebanyak 10 kali di Kab/Kota.

Tabel 1.2. Operasi intelijen/Pulbaket Gangguan Keamanan Hutan Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Volume
1	Lima Puluh Kota	1 kali
2	Pesisir Selatan	1 kali
3	Pasaman	1 kali
4	Pasaman Barat	2 kali
5	Agam	1 kali
6	Sijunjung	1 kali
7	Dharmasraya	1 kali
8	Solok Selatan	1 kali
9.	Solok	1 kali
	Jumlah	10 kali

Penetapan lokasi (kabupaten/kota) untuk Operasi intelijen/Pulbaket Gangguan Keamanan Hutan Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2016 adalah berdasarkan prioritas dengan pertimbangan tingkat kerawanan illegal logging menindaki laporan masyarakat, permintaan/ laporan dinas/ instansi terkait di kabupaten/ kota dan pengamatan sendiri Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi dari hasil intelijen dapat digunakan sebagai dasar atau informasi awal untuk dilakukannya operasi represif (penindakan) pengamanan hutan fungsional maupun gabungan di kabupaten/ kota. Selain itu data/ hasil intelijen juga dapat menjadi *database* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bisa dimanfaatkan untuk memetakan lokasi-lokasi rawan illegal logging di kabupaten/ kota setiap tahunnya

Realisasi Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Pulbaket/ Intelijen tahun 2016 di beberapa Kabupaten sebagai berikut :

- ✓ Kabupaten Pasaman Barat ditemukan pelanggaran dalam Kawasan Hutan Lindung Register 35 Kenagarian Ranah Batahan pada areal Hutan Kemasyarakatan Gunung Lerco Desa Baru, dengan modus Perambahan Kawasan Hutan dan Penebangan Liar kawasan Hutan Lindung perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara (Banjar Maga, Kecamatan Rantau Baik). Tindakan yang diambil adalah memanggil beberapa

orang yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Bidang Kehutanan an. Nama Martin Simatupang dan Asman Cs

- ✓ Kabupaten Pasaman Barat, lokasi Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Kab. Pasaman Barat dengan modus Perambahan Hutan yang dilaporkan oleh Sdr.Dr.Hamzah Lubis, SH,M.Si. Setelah dilakukan peninjauan lapangan ternyata lokasi tersebut berada dalam Hutan APL
- ✓ Kabupaten Sijunjung, atas laporan masyarakat Kenagarian Sungai Betung, setelah dilakukan Peninjauan lapangan telah terjadi Perambahan, Illegal Logging dan pembuatan jalan, namun setelah dilakukan peninjauan lapangan ternyata lokasi berada dalam Kawasan Konservasi. Tindakan yang diambil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan Koordinasi dengan BKSDA Sumbar dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung.
- ✓ Kabupaten Pasaman, dari Hasil Peninjaun Lapangan ditemukan Pembukaan jalan sepanjang ± 25 KM dari Jorong Kampung Padang Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping menuju Kecamatan Talu dan Perambahan dengan/pembuatan kebun Jagung dalam Kawasan Hutan Lindung dengan luas ± 10 Ha pada Koordinat N 00. 12' 38,5" E 100 11' 22,2". Tindakan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman dan Seksi Kawasan Hutan Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- ✓ Kabupaten Lima Puluh Kota, atas Pengaduan Ninik Mamak Pangkalan Kecamatan Pangkalan, telah terjadi *illegal logging* dalam Kawasan Hutan Produksi lokasi Batang Gulamo. Hasil *illegal logging* dibawa ke daerah Provinsi Riau, melalui daerah Muara Takus Kecamatan Muara Takus Kab.Kampar. Pada saat dilakukan peninjaun lapangan tidak ada aktivitas *illegal logging* di lokasi tersebut. Diduga telah terjadi kebocoran informasi adanya kedatangan petugas.

➤ **Sub Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Gabungan.**

Pendanaan sebesar Rp. 49.800.000,- (Empat puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dengan Kegiatan Patroli Pengamanan hutan Gabungan sebanyak 6 kali.

Tabel 1.3. Kegiatan Patroli Pengamanan hutan Gabungan Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Volume
1	Dharmasraya	1 kali
2	50 Kota	1 kali
3	Solok Selatan	1 kali
4.	Pasaman Barat	1 kali
5	Sijunjung	1 kali
6	Solok	1 kali
	Jumlah	6 kali

Penetapan lokasi Patroli Pengamanan Hutan di Kabupaten/ kota adalah berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan illegal logging berdasarkan data/ informasi hasil intelijen, laporan masyarakat, permintaan/ laporan dari dinas/ instansi terkait di kabupaten/ kota dan pengamatan serta penilaian sendiri Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Gabungan yang dilaksanakan Selama tahun 2016, di beberapa Kabupten di laporkan sebagai berikut :

- ✓ Kabupaten Sijunjung, dilakukan Patroli Gabungan bersama dengan KSDA, Tim TKPH TK.II Kabupaten Sijunjung sebagai Ketua Tim Kapolres Sijunjung dan ditemukan hasil yakni penebangan kayu dan pembukaan jalan illegal dalam Kawasan Hutan Konservasi. Ketika tim patroli mendatangi lokasi ditemukan 3 (tiga) orang pelaku. Setelah diintrogasi terungkap bahwa pelaku adalah orang suruhan dari DT.Lelo,Only. Kasus ini sedang ditangani untuk dilakukan Penyelidikan oleh Polres Kabupaten Sijunjung.
- ✓ Kabupaten Solok, dilakukan Patroli Gabungan dan ditemukan hasil pembukaan jalan dari Talang Babungo ke Nagari Garabak Data Kec. Tigo Lurah Kabupaten Solok sepanjang 25 Km yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung sepanjang \pm 5 Km. Saat tim melakukan Patroli kondisi Jalan telah siap tahap pengerasan dan tidak dijumpai kegiatan/ aktifitas *illegal logging*.
- ✓ Kabupaten Agam, dilakukan Patroli Gabungan dan ditemukan lokasi Penumpukan kayu sebanyak \pm 3 M3 dengan jenis kayu Bayur pada daerah Damar Gadang Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam. Pelaku tidak ditemukan dan lokasi tersebut berada pada areal APL yang akan digunakan sebagai lokasi transmigrasi lokal.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan di Kab/Kota dan luar daerah**

Pendanaan sebesar Rp. 41.112.000,- (*Empat puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah*), berupa Koordinasi Pengamanan Hutan sebanyak 9 kali ke kabupaten/ kota dan 1 kali ke Kementerian LHK.

Tabel 1.4. Koordinasi Pengamanan Hutan Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota dan luar daerah	Volume
1	Pesisir Selatan	1 kali
2	Kab.Agam	1 kali
3	Solok Selatan	2 kali
4	Tanah Datar	2 kali
5	Payakumbuh/50 Kota	1 kali
6	Sijunjung	1 kali
7	Pasaman	1 kali
8	Kementerian LHK	1 kali
	Jumlah	10 kali

➤ Sub Kegiatan **Psikotes Bagi POLHUT dan Tenaga PAMHUT Lainnya selaku Pengguna Senjata Api**

Pendanaan sebesar Rp. 6.200.000,- (*Enam Juta dua ratus ribu Rupiah*), berupa pelaksanaan Psikotes bagi POLHUT dan Tenaga PAMHUT lainnya untuk 30 orang tenaga Polhut

➤ **Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kasus Tipihut di Kabupaten/Kota.**

Pendanaan sebesar Rp. 26.880.000,- (*Dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), berupa Monitoring dan Evaluasi kasus Tipihut di Kab/Kota sebanyak 8 kali.

Tabel 1.5. Lokasi Monitoring dan Evaluasi Kasus Tipihut

No	Kabupaten/ Kota	Volume
1	Sijunjung	1 kali
2	Padang Pariaman	1 kali
3	Pesisir Selatan	1 kali
4	Lima Puluh Kota	1 kali
5	Agam	1 kali
6	Pasaman Barat	1 kali
7	Kab.Solok	1 kali
8	Dharmasraya	1 kali
-	Jumlah	8 kali

Penetapan lokasi monitoring dan evaluasi kasus di Kabupaten/kota adalah prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan *illegal logging* berdasarkan data/informasi hasil intelijen dan hasil operasi, laporan masyarakat, permintaan/ laporan dari dinas/ instansi terkait di kabupaten/ kota, pengamatan serta penilaian sendiri Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Target koordinasi diupayakan untuk menindak kasus-kasus *illegal logging* yang relatif agak "besar", guna membantu kabupaten/kota untuk menindak kasus yang menurut mereka cukup sulit untuk diatasi sendiri oleh kabupaten/ kota.

Tabel 1.6. Perkembangan Kasus Illegal Logging Tahun 2016

Nomor	KABUPATEN	KASUS	BB KAYU (M ³)	BB LAIN			PERKEMBANGAN KASUS						Ket.
				BB LAIN	Betor/R2	Chainsaw	lidik	Sidik	JPU/P21	Pengadilan	Vonis	Lelang	
1	PASAMAN BARAT	4	7.7875	2 truk	3	1	3	1	-	-	-	-	
2	PASAMAN	5	21.1109	1 truk	-	-	5	-	-	-	-	-	
3	LIMA PULUH KOTA	3	15.0598	1 truk	-	-	2	1	-	-	-	-	
4	AGAM	4	11.1953	1 truk	-	-	1	1	1	-	1	-	1 kasus hasil operasi dgn Dishut Sumbar
5	TANAH DATAR	4	11.7771	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1 kasus hasil operasi dgn Dishut Sumbar
6	SOLOK	6	14.4206	2 truk	-	-	1	1	1	-	3	-	1 kasus hasil operasi dgn Dishut Sumbar
7	SOLOK SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
8	SIJUNJUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
9	DHARMASRAYA	5	59.8840	4 truk	-	-	1	-	-	-	4	-	Dishutbun/Polres Dharmasraya
10	PESISIR SELATAN	8	35.0581	-	-	-	2	1	-	-	5	-	15,5000 M3 BB Dimusnahkan
11	KEP.MENTAWAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
12	PD.PARIAMAN	2	2.2327	2 truk	-	-	-	-	-	-	2	-	
13	KOTA PADANG	1	1.0000	1 pick up	-	-	-	-	-	-	1	-	1 kasus Hasil Operasi dgn Dishut Sumbar
14	KOTA BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
15	KOTA SAWAHLUNTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
16	KOTA SOLOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
17	KOTA PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
18	KOTA PD.PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
19	KOTA PAYAKUMBUH	1	25.6000	1 truk	-	-	1	-	-	-	-	-	Tangkapan TKHP
Jumlah		43	205.1260	15	3	1	16	7	2	-	18	-	

➤ **Sub Kegiatan Menjadi saksi Penanganan Barang Bukti.**

Pendanaan sebesar Rp.3.360.000,-(Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), berupa saksi Penanganan Barang Bukti di Kabupaten/Kota sebanyak 1 kali.

Tabel 1.7. Menjadi Saksi Penanganan Barang Bukti di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	Padang Pariaman	1 kali
	Jumlah	1 kali

Menjadi saksi Penanganan Barang Bukti bertujuan untuk membantu percepatan proses kasus yang sedang ditangani di kabupaten/ kota. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penanganan kasus bisa dibantu oleh pihak /Instansi terkait.

Untuk Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2015, terdapat 67 (enam puluh tujuh) tersangka kasus Illegal logging (daftar nama-nama pelaku terlampir). Sedangkan jumlah kasus Illegal logging keseluruhan pada akhir bulan Desember tahun 2016 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus

2) Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

- Capaian Program : Berkurangnya tekanan kerusakan hutan dan lahan serta penurunan emisi gas rumah kaca (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 93.900.000,-
: Penundaan, Rp. 87.460.000,-
- Output : Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan (1 Lokasi/Kabupaten 1 Laporan)
- Outcome : Meningkatnya potensi jasa lingkungan dalam kawasan hutan (1 judul)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 83.215.535,- berdasarkan :
DPPA, : 88,62 %
Penundaan : 95,15 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan secara garis besar terdiri dari :

- Penyusunan Kajian Potensi dan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan melibatkan tim ahli dari Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunannya yakni Prof. Dr. Yona Riza (ahli sosial ekonomi dari Universitas Andalas), Dr. Ardinis Arbain (ahli jasa lingkungan dari Universitas Andalas), dan Dr. Yumarni (ahli Kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).

Rangkaian kegiatan penyusunan kajian mulai dari melakukan identifikasi lokasi jasa lingkungan bersama tim ahli, kemudian penyusunan kajian oleh tim ahli, pembahasan kajian bersama stake holder terkait dan workshop kajian dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait di kabupaten dan provinsi.

Kegiatan penyusunan kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

- Melakukan identifikasi pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Menginventarisasi peluang dan hambatan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Menganalisis pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Memberikan arahan dan rekomendasi pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Koordinasi Pengembangan Jasa Lingkungan ke Pusat (Kementerian Kehutanan) di Jakarta.

Dari jumlah anggaran keseluruhan kegiatan sebanyak Rp. 87.459.500,- , terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.244.365,- yang merupakan sisa mati berasal dari penghematan berupa pembelian BBM perjalanan dinas sebesar Rp. 351.250,- , serta biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 2.920.000 dan luar daerah sebesar Rp. 973.115.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dengan baik penyusunan Kajian Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kabupaten 50 Kota , yang dilaksanakan bersama tim ahli dari perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan identifikasi, rapat penyusunan, rapat pembahasan dan workshop.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Buku Kajian Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kabupaten 50 Kota yang akan menjadi bahan dan salah satu acuan bagi semua pihak terkait yang ingin mengembangkan dan memanfaatkan jasa lingkungan di Kabupaten 50 Kota sehingga dapat berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan kelestarian hutan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh outcome yakni peningkatan pemanfaatan potensi jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan hutan di kabupaten 50 Kota melalui fasilitasi dan dukungan dari semua pihak yang terkait dalam pemanfaatan jasa lingkungan sehingga hutan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terjaga kelestariannya

3) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

- Capaian : Berkurangnya tekanan kerusakan hutan dan lahan serta Program penurunan emisi gas rumah kaca (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 85.460.000,-
: Penundaan, Rp. 73.748.000,-
- Output : Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/ perambahan (4 lokasi/kabupaten)
- Outcome : Menurunnya kasus illegal logging yang ditindak lanjuti (4%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 68.232.200,- berdasarkan :
DPPA, : 79,84 %
Penundaan : 92,52 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Secara umum kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan ini terdiri dari :

- *) Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi Pemantauan Bio Fisik kerusakan hutan dan lahan, dengan sasaran kegiatan 4 kali ke Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten 50 Kota. Laporan pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan peta hasil identifikasi.
- *) Konsultasi Mitigasi Bencana ke Pusat (Kementerian Kehutanan) di Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data kerusakan hutan dan lahan, sampai sejauh mana kerusakan dan akibat yang akan di timbulkan serta penyebab dari kerusakan hutan tersebut. Kemudian data di sosialisasi dan diinformasikan kepada stake holder terkait, sebagai bahan tindak lanjut langkah antisipasi pengurangan resiko bencana akibat kerusakan hutan selanjutnya.

Dari jumlah Anggaran sebesar Rp. 73.748.000,-, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.515.800,- yang merupakan sisa mati serta efesiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran yang berasal dari penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 910.800, Belanja Makan Minum Kegiatan sebesar Rp. 680.000,- , Belanja Jasa buruh tenaga kerja lokal sebesar Rp. 2.000.000,- dan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 1.925.000.

Keluaran (output) pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yakni telah teridentifikasinya beberapa lokasi rawan bencana dalam kawasan hutan pada 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten 50 Kota.

Hasil (outcome) „menurunnya kasus illegal logging yang ditindak lanjuti” ini didapat dari pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yakni tersedianya data kawasan hutan yang rawan bencana, kemudian dapat di lakukan sosialisasi kepada badan instansi terkait dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan yang rawan bencana untuk menjaga kelestarian hutan sehingga dapat menekan tindak pidana pelanggaran kehutanan dan meminimalisir resiko yang diakibatkan apabila terjadinya bencana.

Dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan di dan pahami masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan terhadap kondisi kawasan hutan yang rawan bencana tersebut, sehingga langkah-langkah untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan serta upaya antisipasi untuk meminimalkan kerugian apabila terjadi bencana dapat dilakukan sebelumnya.

4) Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

- Capaian Program : Berkurangnya tekanan kerusakan hutan dan lahan serta penurunan emisi gas rumah kaca (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 267.069.500,-
: Penundaan, Rp. 240.119.500,-
- Output : Terlaksananya pelatihan tenaga PPHBN dan penguatan lembaga PPHBN dan Sosialisasi Perda peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan (80 orang, 475 PPHBN, 1 Laporan)
- Outcome : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan(5%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 219.510.950,- berdasarkan :
DPPA, : 82,19 %
Penundaan : 91,42 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi merupakan kegiatan penguatan dan memfasilitasi kelembagaan masyarakat untuk lebih meningkatkan peran serta dalam perlindungan hutan. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan sarana prasarana dan pembinaan serta sosialisasi kepada satgas PPHBN dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Bantuan sarana prasarana yang diberikan kepada satgas PPHBN adalah berupa Rompi dan Topi Lapangan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 475 buah yang diserahkan kepada satgas PPHBN di kabupaten/kota yakni :

- *) Kabupaten Pasaman sebanyak : 100 Buah
- *) Kabupaten Solok sebanyak : 60 Buah
- *) Kabupaten Agam sebanyak : 38 Buah
- *) Kabupaten Pasaman Barat : 22 Buah
- *) Kabupaten Pesisir Selatan : 45 Buah
- *) Kabupaten Lima Puluh Kota : 20 Buah
- *) Kabupaten Padang Pariaman : 31 Buah
- *) Kabupaten Sijunjung : 35 Buah
- *) Kabupaten Tanah Datar : 35 Buah
- *) Kota Sawahlunto : 39 Buah
- *) Kabupaten Solok Selatan : 30 Buah

- *) Kabupaten Dharmasraya : 10 Buah
- *) Kota Solok : 10 Buah

Mekanisme penyerahan sarana prasarana diatas, diantar kepada masing-masing kab/kota yang didukung dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah. Pada saat penyerahan bantuan sarana prasarana, sekaligus diberikan juga sosialisasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan para satgas PPHBN.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 240.119.500,-, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.608.550,- yang merupakan sisa mati berasal dari penghematan pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 205.000,- , bahan bakar minyak sebesar Rp. 4.557.050,- , penghematan belanja seminar kit peserta pembinaan PPHBN sebesar Rp. 2.500.000,- , belanja sarana prasarana (rompi dan topi Lapangan) sebesar Rp. 522.500,- , Biaya Transportasi Peserta sebesar Rp. 850.000,- , belanja cetak dan jilid perda sebesar Rp. 75.000,- , belanja penggandaan sebesar Rp. 9.000,- , belanja makan minum kegiatan konsumsi pembinaan anggota PPHBN sebesar Rp. 680.000 dan Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 5.318.000.- serta Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 5.892.000,- .

Catatan pada tahun 2011 jumlah kelembagaan PPHBN yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota di banding tahun 2012 naik secara signifikan yaitu dari 64 Nagari dengan jumlah anggota 243 menjadi 91 Nagari dengan Jumlah 325 orang, untuk tahun 2013 juga terdapat peningkatan menjadi 104 nagari dengan jumlah 418 orang, pada tahun 2014 telah terbentuk 127 Nagari dengan jumlah satgas PPHBN sebanyak 482 Orang, untuk tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 139 Nagari dengan jumlah satgas PPHBN sebanyak 565 orang, sedangkan untuk tahun 2016 telah terbentuk satgas PPHBN pada 151 Nagari dengan jumlah anggota sebanyak 588 orang.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dengan baik fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat untuk lebih meningkatkan peran serta dalam perlindungan hutan melalui pemberian bantuan sarana prasarana (rompi dan topi lapangan) dan sosialisasi serta pembinaan kepada anggota satgas PPHBN di 11 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah termotifasinya masyarakat (baik lembaga/kelompok maupun individu) untuk lebih berperan serta dalam perlindungan hutan sehingga terjaga kelestarian hutan yang berdampak kepada penurunan tindak pidana kehutanan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PPHBN diperoleh outcome berupa terbentuknya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mapan untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan hutan sehingga terjaga kelestarian hutan serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

- Capaian Program : Berkurangnya tekanan kerusakan hutan dan lahan serta penurunan emisi gas rumah kaca (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 150.000.000,-
: Penundaan, Rp. 124.200.000,-
- Output : Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi emisi gas rumah kaca bidang kehutanan (1 Laporan)
- Outcome : Meningkatnya data emisi gas rumah kaca sektor berbais lahan bidang kehutanan (1 Judul)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 98.040.000,- berdasarkan :
DPPA, : 65,36 %
Penundaan : 78,94 %
- Pelaksanaan Kegiatan :

Rekapitulasi data hasil pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tahun 2016 di 14 Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi mengenai laporan masing-masing tim pelaksana perjalanan dinas di 14 kabupaten/kota dapat dilihat di lampiran ini.

Realisasi keuangan permata anggaran kegiatan (MAK) dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.8. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	REALISASI (%)	KET
I.	Belanja Bahan Pakai Habis						
1.	5.2.2.01.0001	Belanja Alat Tulis Kantor	950,500	950,500	0	100.00	habis
2.	5.2.2.01.0006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	5,080,000	3,111,500	1,968,500	61.25	sisa mati
		Jumlah I	6,030,500	4,062,000	1,968,500		
II.	Belanja Cetak dan Penggandaan						
1.	5.2.2.06.0002	Belanja Penggandaan					
		- Foto copy	1,703,500	1,703,400	100	99.99	sisa mati
		- Jilid Laporan Akhir	175,000	175,000	0	100.00	habis
		Jumlah II	1,878,500	1,878,400	100		
III.	Belanja Makanan dan Minuman						
1.	5.2.2.11.0002	Belanja Makan dan Minum Rapat					
		- Makan	500,000	500,000	0	100.00	habis
		- Snack	300,000	300,000	0	100.00	habis
		Jumlah III	800,000	800,000	0		
IV.	Belanja Perjalanan Dinas						
1.	5.2.2.15.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
		- Uang Harian	62,600,000	54,290,000	8,310,000	86.73	sisa mati
		- Uang Penginapan	33,500,000	24,828,000	8,672,000	74.11	sisa mati
		Jumlah IV	96,100,000	79,118,000	16,982,000		
2.	5.2.2.15.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
		- Uang Harian	6,400,000	6,400,000	0	100.00	habis
		- Uang Penginapan	5,220,000	1,285,000	3,935,000	24.62	sisa mati
		- Transportasi	7,084,000	4,496,600	2,587,400	63.48	sisa mati
		Jumlah V	18,704,000	12,181,600	6,522,400		
	JUMLAH TOTAL	I + II + III + IV + V	123,513,000	98,040,000	25,473,000	79.38	

Output adalah terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis lahan kehutanan di 14 kabupaten/kota dan konsultasi/koordinasi ke pusat sebanyak 3 kali dengan target kinerja berupa 1 laporan.

Sedangkan outcome hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan data di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung penghitungan emisi gas rumah kaca dari aksi mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota selama lima tahun terakhir, terutama data keberhasilan tumbuh tanaman yang belum ada selama ini. Data yang diperoleh tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi LUMENS bersama data lainnya yang terkait. LUMENS adalah aplikasi yang sudah resmi digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI dalam menghitung penurunan emisi gas rumah kaca secara Nasional.

Manfaat (*benefit*) yang dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah semakin kuatnya basis data yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas pelaporan PEP RAD-GRK yang disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui Bappeda Sumatera Barat selaku Ketua Pokja PEP RAD-GRK Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.

6) Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

- Capaian : Berkurangnya tekanan kerusakan hutan dan lahan serta Program penurunan emisi gas rumah kaca (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 46.573.500,-
: Penundaan, Rp. 44.856.200,-
- Output : Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar akawsan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan (2 Laporan)
- Outcome : Terkelolanya KPHL Bukit Barisan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 43.976.200,- berdasarkan :
DPPA, : 94,42%
Penundaan : 98,04%
- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam Di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam senilai Rp. 46.573.500,- dirinci dalam 7 (tujuh) rekening belanja.

- Belanja Bahan Pakai Habis, Rp. 4.298.500,-
- Belanja Bahan/Material, Rp. 805.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan, Rp. 625.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman, Rp. 1.125.000,-
- Belanja Pakaian Kerja, Rp. 1.800.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas, Rp. 33.200.000,-
- Belanja Honorarium Non PNS, Rp. 4.720.000,-

Realisasi fisik dan keuangan per belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis, Realisasi fisik sebesar 62,96 % dan keuangan senilai Rp. 2.706.200,- (62,96%)
- Belanja Bahan/Material, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 805.000,- (100%).
- Belanja Cetak dan Penggandaan, Realisasi fisik sebesar 84,00 % dan keuangan senilai Rp. 420.000,- (67,20%).
- Belanja Makanan dan Minuman, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 1.125.000,- (100%).
- Belanja Pakaian Kerja, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 1.800.000,- (100%).
- Belanja Perjalanan Dinas, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 32.400.000,- (97,59%).
- Belanja Honorarium Non PNS, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 4.720.000,- (100%).

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

1) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan

- Capaian : Meningkatnya kualitas dan akses informasi pembangunan Program kehutanan (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 180.990.900,-
: Penundaan, Rp. 89.772.900,-
- Output : Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen statistik kehutanan dan penyebaran informasi kehutanan serta rekonsiliasi

penguatan system informasi kehutanan (4 laporan)

- Outcome : Jumlah Informasi pembangunan kehutanan yang bisa di akses masyarakat (65 informasi)

- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 89.139.900,- berdasarkan :
DPPA, : 49,25%
Penundaan : 99,29 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/273/Sekr-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini awalnya mendapat aokasi dana sebesar Rp 103.492.000. Kemudian pada perubahan alokasi dana bertambah menjadi Rp 180.990.000,- Penambahan anggaran ini rencana itu mengikuti Sumbar Expo di Bandung. Tetapi karena ada kebijakan penundaan kegiatan yang tidak prioritas karena adanya pengurangan DAU maka kegiatan terpaksa dihemat atau oleh TAPD dikenal dengan istilah "kegiatan yang tertunda atau penundaan kegiatan" sebesar Rp 91.218.000,- sehingga alokasi dana untuk kegiatan ini yang bisa digunakan adalah Rp 89.772.900,-.

Dana yang bersisa sebesar Rp 633.000,- atau sebesar 0.71% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan Contoh Pameran Rp 45.000,-
- ✓ Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 220.000,-
- ✓ Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 368.000,-

Kegiatan ini terdiri dari :

- ✓ Pengelolaan Website Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan CV. Global Solusindo untuk hosting sampai dengan 26 Oktober 2016 dan hiperlink bekerjasama sama dengan Bapak Herman Nasir, S.Sos Kepala Biro LKBN Antara Sumbar Kantor Berita Indonesia selama 1 tahun mulai tanggal 14 April 2016 s/d 31 Desember 2016.

Kerjasama pengelolaan Hosting dengan CV. Global Solusindo sejak 27 Oktober 2016 tidak dilanjutkan lagi karena ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengelolaan website dapat bekerjasama dengan Biro Humas

✓ Penyusunan Buku Statistik Dinas Kehutanan Tahun 2015

Buku Statistik merupakan media untuk menginformasikan tentang Sumber daya Hutan dan hasil-hasil pembangunan kehutanan pada lima tahun terakhir. Buku ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap akses informasi kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

✓ Pengumpulan data Sisperhut ke Kabupaten Kota

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

Kegiatan Rekonsiliasi Sisperhut ke Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh 8 Tim. Di samping mengumpulkan data sisperhut Tim juga mengumpulkan data untuk penyusunan buku Statistik tahun 2015. Adapun rincian tim yang membantu pengumpulan data Sisperhut adalah sebagai berikut :

- Ke Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/707/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Jusmalinda, S.Hut, MSi, Liza Eka Putri dan Marganti yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 April 2016.
- Ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman sserta Kabupaten Pesisir Selatan dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/709/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Zarmawandi, S.Hut, Ita Rahmawati, S.Hut, MM dan Liza Eka Putri yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 April 2016.
- Ke Kabupaten Solok Selatan dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/710/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Melly Fitri, BAc, Waluyo, S.Sos, dan Budiman, AMd yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 April 2016.
- Ke Kabupaten solok, Kota Solok dan Kota Sawahlunto dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/706/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Suyatno, BSc, Ita Rahmawati, S.Ht, MM dan Defra Julita, S.Kom yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 April 2016.
- Ke Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/711/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Purnama, BAc, Zarmawandi, S.Hut dan waluyo, S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 April 2016.
- Ke Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/712/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Jusmalinda, S.Hut, MSi, Sasri Anita, SSI dan Yusarmen yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 April 2016.
- Ke Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/708/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Rafinolia, S.Sos, Sasri Anita,

S.Si dan Yusarmen yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 April 2016.

- Ke Kota Padang dengan SPT Kadishut Nomor 094.3/713/Sekr-2016 tanggal 5 April 2016 dengan anggota tim Zarmawandi. S.Hut, Waluyo, S.Sos dan Sasri Anita, S.Si yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 April 2016.



Data yang akan direkon antara lain adalah :

- ✓ Kawasan dan potensi hutan;
- ✓ Industri kehutanan;
- ✓ Perdagangan hasil hutan;
- ✓ Rehabilitasi lahan kritis;
- ✓ Pemberdayaan masyarakat;
- ✓ Tata kelola kehutanan..

✓ **Pameran Indo Green di Jakarta**

Personil pelaksana kegiatan IndoGreen Environment & Forestry Expo 2016 ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.2/1214/Sekr-2016 terdiri dari : Melly Fitri, B.Ac, Waluyo, S.Sos, Ita Rahmawati, S.Hut, MM dan Liza Eka Putri

Kegiatan Pameran IndoGreen Environment & Forestry Expo 2016 merupakan kegiatan rutin tiap tahunnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2016 kegiatan ini mengusung tema tema **"Gotong Royong Mewujudkan Kelestarian Lingkungan dan Hutan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air dan Energi Terbarukan"** dan penguatan budaya lokal serta mendukung upaya merealisasikan Konsep Gaya Hidup yang Hijau Menuju Indonesia Hijau (*Green Living Style For Better Future*). Pameran ini juga mengkampanyekan dan menyebarkan informasi penyelamatan hutan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia, cadangan pangan bagi kehidupan manusia dan menumbuhkan gerakan untuk menanam dan memelihara pohon. Selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, ditampilkan berbagai potensi yang sangat besar dari sector kehutanan seperti potensi hutan tanaman industri, jasa ekowisata, jasa perdagangan dan keanekaragaman hayati, serta agroforestry.

IndoGreen Environment & Forestry Expo 2016 diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, BUMN sektor kehutanan, perusahaan kehutanan, pertambangan serta perusahaan yang peduli akan kelestarian hutan dan lingkungannya. Selama berlangsungnya pameran diadakan juga sejumlah acara pendukung yaitu :

Presentasi dan pertemuan bisnis, talk show, launching dan bedah buku, lomba menggambar untuk tingkat SD, dan pembagian bibit pohon kepada masyarakat umum.

2) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan

- Capaian Program : Meningkatnya kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 81.008.000,-
: Penundaan, Rp. 58.498.000,-
- Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan, pembinaan DAKbidang kehutanan dan rapat monev (3 laporan)
- Outcome : Presentase konsistensi pelaksanaan pembangunan kehutanan dengan dokumen perencanaan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 48.865.700,- berdasarkan :
DPPA, : 60,32%
Penundaan : 83,53 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/270/Sekr-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang tertunda ini adalah :

- BBM Kegiatan sebesar Rp 2.000.025,-
- Makan minum rapat PEP DAK dan Dekonsentrasi sebesar Rp 2.750.000,-
- Belanja Pakaian kerja lapangan untuk 6 orag sebesar Rp 900.000,-
- Belanja Perjalanan dinas cek lapangan sebesar Rp 16.860.000,-

Dana yang bersisa sebesar Rp 9.632.300,- atau sebesar 16,47% dengan rincian sebagai berikut :

- BBM kegiatan sebesar Rp 1.819.200,-
- Pakaian Kerja lapangan sebesar Rp 900.000,-
- Makan Minum Kegiatan sebesar Rp 3.590.000,-

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 3.323.000,-
- Foto copy sebesar Rp 100.000,-

Kegiatan terdiri dari :

- *Rapat Monev Kegiatan Pembangunan Kehutanan*

Rapat Monev dilakukan sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) DAK Bidang Kehutanan, Kegiatan Dekonsentrasi dan APBN UPT Kementerian LHK Tahun 2016 pada tanggal 18 April 2016 bertempat di Aula Balai Taman Nasional Siberut

Kegiatan ini dibantu pembiayaannya dari dari APBN

Narasumber pada acara ini adalah :

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. Hendri Octavia, MSI.
- Kasubag Evaluasi II Bagian Evaluasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Agustina).
- Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku Anggota Pokja DAK Provinsi Sumatera Barat

Peserta pada acara ini adalah :

- UPT Kementerian LHK di Provinsi Sumatera Barat.
- Instansi Kab./Kota yang membidangi Kehutanan (Entitas Penerima DAK Bid. Kehutanan Tahun 2016)..
- Instansi Penerima Dana Dekonsentrasi Kementerian LHK Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Barat.
- PPK Dekonsentrasi Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat

Rangkaian acara pada rapat ini adalah sebagai berikut :

- Pembukaan, oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. Hendri Octavia, M.Si.)
- Penyampaian Materi

Penyampaian materi dalam bentuk Diskusi Panel (Paparan dan dilanjutkan dengan Tanya jawab) dengan Moderator : Jusmalinda, S.Hut., MSi., dengn materi :

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 April 2016 bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dasar pelaksanaan adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/373/Sekr-2016 Tanggal 6 April 2016 perihal Undangan

Peserta terdiri atas : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Penyelenggara Kegiatan APBN 2015 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Staf terkait.

Hasil Kegiatan berupa pemaparan rencana dan realisasi kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode bulan Maret 2016, berasal dari dana APBD maupun APBN.

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Mei 2016 bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dasar pelaksanaan adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/1046/Sekr-2016 Tanggal 9 Mei 2016 tentang Undangan

Peserta terdiri atas : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Penyelenggara Kegiatan APBN 2015 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Staf terkait

Paparan rencana dan realisasi kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bulan April 2016, berasal dari dana APBD maupun APBN, yaitu :

- Kegiatan APBD

- ❖ Kegiatan APBD 2016 dengan anggaran Rp. 27.615.491.324, untuk periode sampai dengan April rencana keuangan Rp. 9.355.966.540 (33,88%), terealisasi 5.523.868.249 (20,00%). Sedangkan untuk rencana fisik 33,88%, terealisasi 25,37%, yang terdiri atas :

- Kegiatan APBN

- ❖ Kegiatan APBN 2016 dengan Anggaran Rp. 4,577,000,000, realisasi keuangan sampai dengan periode April sebesar 8.79% dengan realisasi fisik 11.28%.

- Untuk usulan kegiatan DAK Tahun 2017, diminta masing-masing bidang terkait agar segera mengusulkan kegiatan dengan dilengkapi dokumen pendukungnya

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 September 2016 bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dasar pelaksanaan adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/2182/Sekr-2016 Tanggal 21 September 2016 tentang Undangan

Peserta terdiri atas : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Penyelenggara Kegiatan APBN 2015 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Staf terkait

Pokok materi yang dibahas adalah terkait dengan pemotongan anggaran kegiatan dalam rangka penghematan. Dinas Kehutanan diminta untuk melakukan pemotongan anggaran sekitar 10% dari total anggaran.

Pemotongan anggaran ini berasal dari Belanja Langsung yang nilainya sekitar Rp. 2.000.000.000,

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 November 2016 bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dasar pelaksanaan adalah Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/2596/Sekr-2016 Tanggal 16 November 2016 tentang Undangan

Peserta terdiri atas : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Penyelenggara Kegiatan APBN 2015 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Staf terkait

Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berisi pemaparan rencana dan realisasi kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode bulan Oktober 2016, pembahasan laporan kemajuan kegiatan, ditambah dengan kegiatan tahun 2017 (Stresing kegiatan di tahun 2017 masih pada pengamanan dan perlindungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat)

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peserta terdiri atas : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Penyelenggara Kegiatan APBN 2015 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Staf terkait

Rapat membahas capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut : Capaian IKU "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan peruntukannya" terealisasi 100%, capaian IKU "penurunan luas lahan kritis" adalah sekitar 0,17%, capaian IKU "persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani" hingga bulan Desember 2016 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%, capaian IKU "Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)" hingga bulan Desember 2016 terealisasi 42,76%.

- Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan sebanyak 6 tim dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pengembangan Industri Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Kabupaten Solok dan Kota Solok.
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor; 094.3/2427/Sekr-2016 tanggal 25 Oktober 2016,

waktu pelaksanaan tanggal 27 s/d 28 Oktober 2016 dengan pelaksana Melly Fitri, B Ac., Usmiati dan Yusarmen

- Hasil Pelaksanaan : Melakukan Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan pada pada IUIPHHK UD Karya Putra Kabupaten Solok, CV. Bintang Selatan Kabupaten Solok, dan CV. Karya Bangunan Kota Solok

- Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Limapuluh Kota
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor; 094.3/2427/Sekr-2016 tanggal 094.3/2627/Sekr-2016 tanggal 21 November 2016.
 - Waktu pelaksanaan : 27 s/d 28 Oktober 2016.
 - Pelaksana Zarmawandi, S.Hut, Waluyo, S.Sos dan Marganti
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Lokasi tujuan perjalanan dinas adalah Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota
 - ❖ Kegiatan dilakukan dengan wawancara dan peninjauan langsung ke lokasi bekas/rawan kebakaran.

- Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2016 di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2425/Sekr-2016 tanggal 25 Oktober 2016
 - Waktu pelaksanaan : 27 s/d 28 Oktober 2016.
 - Pelaksana Zarmawandi, S.Hut, Waluyo, S.Sos dan Sasri Anita, S.Si
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Pemeliharaan batas kawasan hutan berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Kamang sepanjang \pm 20 Km berada di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang merupakan hasil penataan batas Tahun Anggaran 1996/1997 sepanjang + 35.400,10 meter dengan jumlah pal terdiri dari 35 buah pal beton dan 319 buah pal kayu
 - ❖ Secara fisik telah selesai (terrealisasi 100%) pada bulan Juni 2016 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.484.100 (83,56%) dari pagu dana sebesar Rp. 188.459.150,-. Sisa dana tersebut merupakan sisa mati.

- Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan DAK 2016 + APBD) Di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2628/Sekr-2016 tanggal 21 November 2016
 - Waktu pelaksanaan : 23 s/d 24 November 2016
 - Pelaksana Melly Fitri, B Ac., M Ramdhon Rifki,S Hut dan Liza Eka Putri.
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Kegiatan Reboisasi Pengayaan Hutan Lindung dilaksanakan di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan seluas 85 Ha.
 - ❖ Adapun keseluruhan jenis bibit yang diperlukan untuk Kegiatan Reboisasi Pengayaan Hutan lindung itu sebanyak 58,438 batang, hasil konfirmasi dengan kotraktor bibit yang telah diserahkan baru sejumlah 19.100 batang dan yang belum diserahkan sebanyak 39.338 batang, adapun bibit jenis bibit yang diserahkan kepada kelompok petani terdiri

- Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan Kegiatan Reboisasi Pengayaan Hutan Lindung belum terlaksana sesuai Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK) Tahun 2016 di Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor : 094.3/2426/Sekr-2016 tanggal 25 Oktober 2016.
 - Personil Pelaksana waluyo, S.Sos, Liza Eka Putrid an M. Rizal
 - Waktu pelaksanaan 27 s/d 28 Oktober 2016

- Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK) Tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor : 094.3/2626/Sekr-2016 tanggal 21 November 2016.
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Yusarmen dan Sasri Anita, SSI
 - Waktu pelaksanaan 23 s/d 24 November 2016
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Tahun 2016 dilaksanakan oleh Seksi Usaha Kawasan Hutan KPHL Bukit Barisan dengan total alokasi dana sebesar Rp 596.777.300,-

- ❖ Pekerjaan penanaman rotan dan pembuatan bank buah dilakukan dengan adanya Nota Kesepahaman antara KPHL Bukit Barisan dengan Tokoh Masyarakat Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Air pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor 002/NK/KPHL-2016 yang ditandatangani oleh Kepala KPHL Bukit Barisan dan Walinagari Sungai Nyalo diketahui oleh ninik mamak an pemuka masyarakat.
- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kabupaten/Kota sebanyak 8 tim dengan rincian sebagai berikut :
- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kabupaten Solok Selatan
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/1415/Sekr-2016 tanggal 13 Juni 2016.
 - Personil yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kabupaten Solok Selatan yaitu Yofi Yori, SE, M.Si, Melly Fitri, B.Ac dan 3. Waluyo, S.Sos
 - Waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka 22 s/d 23 Juni 2016.
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kabupaten Solok Selatan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan.
 - ❖ Tahun 2016 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan Murni sebesar Rp 1.105.855.000,- dengan dana penunjang sebesar Rp. 69.280.500,- Sehingga total dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.175.135.500,-.
 - ❖ Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan termasuk entitas yang melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 tapi belum ada realisasi kegiatan ke dalam Aplikasi Pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dibuat oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.birocan.dephut.go.id.
- Kegiatan DAK Bidang kehutanan Tahun 2016 yang telah dientrikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan ke dalam aplikasi pelaporan termasuk kedalam kegiatan-kegiatan dalam kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPH, meliputi : Operasionalisasi KPHP/KPHL, Kawasan Hutan Yang Belum Ada Kelembagaan KPHP/KPHL
- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kota Padang dan KPHL Bukit Barisan
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor : 094.3/1416/Sekr-2016 tanggal 13 Juni 2016.

- Personil yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke KPHL Bukit Barisan (Provinsi) dan Kota Padang yaitu Waluyo, S.Sos, Sasri Anita, SS dan Yusarmen
- Waktu pelaksanaan tanggal 24 Juni 2016.
- Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah KPHL Bukit Barisan.
 - ❖ Tahun 2016 KPHL Bukit Barisan mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan Murni sebesar Rp. 3.459.890.000,- dan dana silpa sebesar Rp. 596.777.300,- Sehingga total dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 adalah sebesar Rp.4.056.667.300,-.
 - ❖ KPHL Bukit Barisan termasuk entitas yang melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 tapi belum ada realisasi kegiatan ke dalam Aplikasi Pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dibuat oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.birocan.dephut.go.id
 - a. Kegiatan DAK Bidang kehutanan Tahun 2016 yang telah dientrikan oleh KPHL Bukit Barisan ke dalam aplikasi pelaporan termasuk kedalam kegiatan-kegiatan dalam kawasan hutan yang ada kelembagaan KPHL meliputi : **Operasionalisasi KPHP/KPHL** (Kegiatan Vegetatif, Penyediaan Sarana Prasarana KPHP/KPHL, Penyediaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sarana dan Prasarana Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan
 - ❖ Realisasi pada saat tim melakukan pembinaan kepada entitas pelaksana DAK Bidang Kehutanan (KPHL Bukit Barisan) belum ada realisasi.
 - ❖ Entitas disarankan oleh tim dalam membuat progress laporan mempedomani panduan pembuatan progress yang diberikan oleh Biro Perencanaan yang dapat didownload pada aplikasi pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang

- ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kota Padang adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.
- ❖ Tahun 2016 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan Murni sebesar Rp.275.510.000,- dan dana Pendamping sebesar Rp. 41.326.500,- Sehingga total dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 adalah sebesar Rp.316.836.500,-.

- ❖ Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang termasuk entitas yang melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 tapi belum ada realisasi kegiatan ke dalam Aplikasi Pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dibuat oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.birocan.dephut.go.id.
 - ❖ Kegiatan DAK Bidang kehutanan Tahun 2016 yang telah dientrikan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang ke dalam aplikasi pelaporan termasuk kedalam kegiatan-kegiatan Hutan Kota
- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kabupaten Pasaman
- Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1414/Sekr-2016 tanggal 13 Juni 2016.
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Sasri Anita, S.Si dan Setiawan, SP
 - Waktu pelaksanaan 20 s/d 21 Juni 2016
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Pasaman adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman.
 - ❖ Tahun 2016 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan Murni sebesar Rp 1.032.490.000,- dengan dana penunjang sebesar Rp 146.072.500,- Sehingga total dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.178.562.500 Ha,
 - ❖ Kabupaten Pasaman belum memiliki kelembagaan KPH karena kelembagaan belum terbentuk.
 - ❖ Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman termasuk entitas yang melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 tapi belum ada realisasi kegiatan ke dalam Aplikasi Pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dibuat oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.birocan.dephut.go.id.
 - ❖ Kegiatan DAK Bidang kehutanan Tahun 2016 yang telah dientrikan oleh Dinas Kehutanan Pasaman ke dalam aplikasi pelaporan termasuk kedalam kegiatan-kegiatan dalam kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPH
 - ❖ Realisasi pada saat tim melakukan pembinaan kepada entitas pelaksana DAK (Dinas Pertanian) baru pada tahap persiapan seperti pembuatan juklak dan rancangan teknis kegiatan.

- ❖ Dinas Kehutanan Pasaman disarankan untuk mengentrikan hasil pengurangan dana setelah DPA pemotongan ditandatangani (DPA Perubahan Final). Dan pengentrian dimulai dari rencana dan entri realisasi kegiatan dimulai sejak bulan januari karena dalam aplikasi pelaporan dana terakumulasi. Dan sebaiknya arsip tetap disimpan per bulan baik hardcopy maupun soft copy.
- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Limapuluh Kota
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1411/Sekr-2016 tanggal 13 Juni 2016.
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Melly Fitri, BAc dan Edi, Sos
 - Waktu Pelaksanaan 16 s/d 17 Juni 2016
 - Hasil Pelaksanaan :

Kota Padang Panjang

- ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kota Padang Panjang adalah Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
- ❖ Tahun 2016 Dinas Pertanian Kota Padang Panjang mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan sebesar Rp 645.000.000,-.
- ❖ Dinas pertanian Kota Padang Panjang termasuk entitas yang belum melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016.
- ❖ Staf Sub Bidang Kehutanan bersama Tim Pembinaan DAK membuat laporan dengan mengentri DPA Kegiatan DAK Bidang Kehutanan kedalam Aplikasi Pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dibuat oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
- ❖ Realisasi pada saat tim melakukan pembinaan kepada entitas pelaksana DAK (Dinas Pertanian) baru pada tahap persiapan seperti pembuatan juklak, pembuatan HPS untuk pengadaan.
- ❖ Entitas disarankan oleh tim dalam membuat progress laporan mempedomani panduan pembuatan progress yang diberikan oleh Biro Perencanaan yang dapat didownload pada aplikasi pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016.
- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan disarankan tetap mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P.69/MenLHK-sekjen/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016.
- ❖ Entitas DAK Bidang Kehutanan di Kota Padang Panjang disarankan untuk mengganti profil entitas karena dalam aplikasi terlihat nama

entitas adalah Dinas Kehutanan Kota Padang Panjang menjadi Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

- ❖ Satker diminta untuk mengarsipkan hasil pelaporan DAK 2016 baik hard copy dan softcopy setiap bulannya seperti yang terdapat di bawah ini.
- ❖ Jika ada permasalahan dalam pengentrian laporan DAK Bidang Kehutanan dapat menghubungi kontak person dari Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Tanah Datar

- ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kabupaten Tanah Datar adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar.
- ❖ Tahun 2016 Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan sebesar Rp 890.640.000,-
- ❖ Tanah Datar belum memiliki kelembagan KPH dan kawasan hutan seluas 29,089.91 Ha yang terdiri dari Hutan lindung seluas 19,844.46 dan Hutan Produksi seluas 9,245.46 Ha yang ada di wilayah administrasi kabupaten Tanah Datar termasuk kedalam wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.
- ❖ Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar termasuk entitas yang telah melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 tapi realisasi kegiatan masih 0 (belum ada realisasi).
- ❖ Rincian Sub Kegiatan yang tercantum DPA di entrikan kedalam aplikasi dengan memperhatikan yang tersedia. Jika ada yang tidak sesuai jika dimasukan dalam suatu rincian maka perlu dijelaskan dalam kolom keterangan. Misalnya dalam DPA terdapat rincian upah buruh untuk kegiatan penanaman maka dintri di kolom penanaman dan pada kolom keterangan perlu dijelaskan bahwa untuk untuk upah buruh.
- ❖ Realisasi pada saat tim melakukan pembinaan kepada entitas pelaksana DAK (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar) baru pada tahap persiapan seperti pembuatan juklak dan rancangan teknis kegiatan.
- ❖ Entitas disarankan oleh tim dalam membuat progress laporan mempedomani panduan pembuatan progress yang diberikan oleg Biro Perencanaan yang dapat didown load pada aplikasi pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016.
- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan disarankan tetap mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor

P.69/MenLHK-sekjen/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Limapuluh Kota

- ❖ Entitas Pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kabupaten Limapuluh Kota adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Limapuluh Kota
- ❖ Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Limapuluh Kota mendapat alokasi DAK Bidang Kehutanan sebesar Rp 1.028.880.000,-
- ❖ Kabupaten Limapuluh Kota sudah memiliki kelembagaan KPH dengan nama KPHL Limapuluh Kota.
- ❖ Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Limapuluh Kota termasuk entitas yang belum melaporkan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016.
- ❖ Informasi dari Pelaksana DAK Bidang Kehutanan, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE.10/MK.07/2016 tanggal 8 April 2016, dana murni alokasi DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 dipotong 100%. Tetapi setelah itu ada kebijakan untuk menggunakan dana Silpa Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp 1.536.899.915,-
- ❖ Pada waktu Pembinaan Tim bersama dengan Kepala Seksi yang bertanggungjawab untuk pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 mencoba mengentri DPA Kegiatan DAK Bidang Kehutanan kedalam Aplikasi Pelaporan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dibuat oleh Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.birocan.dephut.go.id seperti yang terlihat dibawah ini.
- ❖ Untuk pelaksanaan kegiatan disarankan tetap mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P.69/MenLHK-sekjen/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016.
- ❖ Satker diminta untuk mengarsipkan hasil pelaporan DAK 2016 baik hard copy dan softcopy setiap bulannya Jika ada permasalahan dalam pengentrian laporan DAK Bidang Kehutanan dapat menghubungi kontak

person dari Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1410/Sekr-2016 tanggal 13 Juni 2016
 - Waktu pelaksanaan tanggal 14 s/d 15 Juni 2016
 - Pelaksana kegiatan adalah Purnama, B.Sc, Zarmawandi, S. Hut dan Liza Eka Putri
 - Hasil Pelaksanaan :

Kabupaten Sijunjung

- ❖ Entitas pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kabupaten Sijunjung adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung.
- ❖ Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung telah melakukan pelaporan secara online kegiatan DAK tahun 2016 periode Triwulan I.
- ❖ Berdasarkan laporan kegiatan dan wawancara dengan Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dan pengelola/operator DAK Bidang Kehutanan untuk Kabupaten Sijunjung, menunjukkan bahwa Realisasi kegiatan sampai bulan Mei 2016 masih nihil. Namun secara progres di bulan Juni 2016 kegiatan sudah berjalan (dalam tahap perencanaan) dalam bentuk pengadaan.

Kabupaten Dharmasraya

- ❖ Entitas pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya.
- ❖ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya belum melakukan pelaporan kegiatan DAK tahun 2016 secara online periode Triwulan I (termasuk input rencana/target kegiatan).
- ❖ Berdasarkan hal tersebut diatas, kepada Satker/entitas pengelola Dana DAK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya kita selalu Tim Pelaksana melakukan bimbingan pengisian pelaporan aplikasi secara online,
- ❖ Permasalahan yang ditemui dalam pelaporan, ini adalah tidak adanya tenaga operator untuk input data dan sebelumnya akses internet susah, karena belum masuk jaringan. Namun sekarang sudah ada tenaga operator dengan menggunakan tenaga honor dan jaringan internet sudah ada.

- Pembinaan DAK Bidang Kehutanan ke Kabupaten Agam dan Pasaman Barat
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1412/Sekr-2016 tanggal 13 Juni 2016
 - Waktu Pelaksanaan tanggal 16 s/d 17 Juni 2016
 - Pelaksana kegiatan adalah Zarmawandi, S. Hut, Hasan, Sasri Anita, S.S
 - Hasil pelaksanaan :

Kabupaten Agam

- ❖ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam telah melakukan pelaporan secara online kegiatan DAK tahun 2016 periode Triwulan I. Dan telah melakukan input data sampai bulan Mei 2016.
- ❖ Dari Laporan bulan Mei, menunjukkan bahwa entitas pelaksana telah menunjukkan kinerjanya, ini terlihat dari realisasi fisik dan progres kegiatan (secara progres, beberapa kegiatan telah terealisasi 100 %).

Kabupaten Pasaman Barat

- ❖ Entitas pelaksana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat adalah Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
 - ❖ Dinas Kehutanan Pasaman Barat belum melakukan pelaporan kegiatan DAK tahun 2016 secara online periode Triwulan I (termasuk input rencana/target kegiatan).
 - ❖ Permasalahan yang ditemui dalam pelaporan ini adalah :
 - Tidak sesuai (tidak sinkronnya) kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam DPA dengan format yang disediakan dalam aplikasi.
 - Satuan yang tidak sama antara kegiatan dalam DPA dengan format dalam aplikasi.
 - ❖ Dengan permasalahan tersebut, petugas/pengelola dari Dinas Kehutanan Pasaman Barat kesulitan dalam pengisian data, dan meminta pihak entitas peninjau agar dapat memberikan semacam bimbingan dan menyediakan waktu khusus (di Padang), sehingga kewajiban dari entitas untuk menyampaikan laporan secara online tercapai.
- Pemantauan Laporan DAK terhadap entitas pelaksana DAK dilakukan oleh Provinsi melalui website Entitas yang belum melaporkan dihubungi satu per satu via telpon dan diinformasikan tentang kewajiban untuk segera melaporkan secara online dan melaporkan laporan akhir dalam bentuk laporan fisik.

3) Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP

- Capaian Program : Meningkatnya kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 85.471.050,-
: Penundaan, Rp. 78.416.050,-
- Output : Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, audit internal dan audit eksternal (3 laporan)
- Outcome : Presentase konsistensi pelaksanaan pembangunan kehutanan dengan dokumen perencanaan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 75.527.050,- berdasarkan :
DPPA, : 88,37%
Penundaan : 96,32 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/269/Sekr-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang tertunda ini adalah :

- Makan minum kegiatan sebesar Rp 5.575.000,-
- Belanja Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi sebesar Rp 1.000.000,-
- Belanja spanduk sebesar Rp 480.000,-

Dana yang bersisa sebesar Rp 2.289.000,- atau sebesar 2,92% dengan rincian sebagai berikut :

- Transportasi Narasumber sebesar Rp 1.489.000,-
- Makan Minum Kegiatan sebesar Rp 500.000,-
- Sisa mati Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 300.000,-

- Sosialisasi ISO dan Peningkatan Kapasitas Auditor Internal pada tanggal 7 dan 8 April 2016

Kegiatan ini dilakukan di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang Narasumber dari Tuv Rheinland bapak Ervi Ilyas

Sosialisasi diberikan kepada 60 orang yang berasal dari Eselon III. IV dan Staf lingkup Dinas Kehutanan. Sementara peningkatan Kapasitas Auditor diberikan kepada 17 orang Auditor yang telah lulus uji kompetensi auditor SMM ISO 9001:2008 pada Tahun 2014 dan yang Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/02/WMM-IX/2014 tanggal 9 September 2014.

Tindaklanjut dari sosialisasi ini, Eselon IV lingkup Dishut Sumatera Barat telah merevisi SOP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 065/1323/Sekr-2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Juli 2016.

Revisi SOP tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 065/1690/Sekr-2016.

- Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan ke 5 kabupaten

Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Tahun 2016 dilaksanakan ke 5 kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan ke Kabupaten Pasaman Barat
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/741/Sekr-2016 tanggal 6 April 2016.
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 11 s/d 12 April 2016.
 - Personil Pelakasnnaan Bambang Suyono,S.Hut, Waluyo, S.Sos dan M.Rizal
 - Hasil Pelaksanaan :
 - Sosialisasi ISO dilakukan kepada Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan stake holders yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, dihadiri 28 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan, Kepala Seksi/Sub Bagian, Staf serta stake holder yang dalam hal ini hadir Kelompok tani pemegang izin pemanfaatan hutan bukan kayu, dan pengusaha kayu.
 - Tim Provinsi memaparkan bahwa Management System ISO 9001 : 2008 merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses kerja dalam organisasi tersebut sesuai kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi yang bersangkutan. Banyak sekali organisasi secara kontinyu. ISO 9001 : 2008 berisi standar yang memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan (Continual Improvement), sehingga sistem yang ada akan selalu terupdate dengan kondisi organisasi yang diinginkan.
 - Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kepuasan Pelanggan/Stake Holder di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan 28 questioner kepada seluruh peserta sosialisasi ISO 9001 : 2008 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Berdasarkan penilaian IKM perunsur layanan diketahui dari 14 unsur layanan – layanan yang paling baik adalah unsur layanan

ke-4 yaitu kedisiplinan petugas pelayanan dengan nilai IKM 78.57 berdasarkan mutu pelayanan tergolong baik dan unsur layanan paling buruk adalah unsur layanan ke-1 yaitu prosedur pelayanan dengan nilai IKM 66.96 atau berdasarkan mutu pelayanan tergolong baik.

- ✓ Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan ke Kabupaten Solok Selatan
 - Dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/738/Sekr-2016 tanggal 6 April 2016.
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 11 s/d 12 April 2016.
 - Personil Pelaksana Novi Hendri, S.Hut, MSi, Zarmawandi, S,Hut dan Nensi, SE, Ak
 - Hasil Pelaksanaan
 - Pada kesempatan sosialisasi ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan lebih detail disampaikan mengenai Prosedur Pokok (PPK). Dimana Prosedur Pokok (PPK) ini merupakan kegiatan atau aktifitas utama dari fungsi-fungsi/unit-unit yang ada pada dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada stake holders mengenai persyaratan, proses serta waktu pemenuhan kebutuhan pelanggan di maksud.
 - Dari ke-enam prosedur diatas, bidang terkait di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan adalah:
 - Sekretariat, Prosedur Penyediaan Data dan Informasi Kehutanan (PPK-06)
 - Bidang Pengelolaan, Prosedur Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan Hutan (PPK-05), Prosedur penyediaan peta tematik (PPK-1) dan Prosedur Klarifikasi Status Kawasan Hutan (PPK-02) dan Prosedur Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) (PPK-03) dan Prosedur Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) (PPK-04)
 - Setelah melakukan sosialisasi mengenai implementasi ISO 9001:2008 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dilakukan Pengukuran Kepuasan Pelanggan/Stake Holder (PIN-08), dengan sasaran pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan. Pengukuran kepuasan Pelanggan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat (pelanggan) terhadap pelayanan publik. Hasil survey ini digunakan sebagai penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Hasil Rekapitulasi dan Perhitungan survey Pengukuran kepuasan Pelanggan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan kepada 28 responden dengan 14 unsur pelayanan menunjukkan Hasil pengolahan dan perhitungan dari ke-28 responden menunjukkan IKM unit pelayanan sebesar 73,85. Ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berada pada kisaran 62,51 - 81,25 yaitu **Baik**
- ✓ Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan ke Kabupaten Dharmasraya
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/711/Sekr-2016 tanggal 6 April 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 11 s/d 12 April 2016
 - Personil Pelaksana Fazlul Taufik, ST, M.Eng, Afrial Muhammad, SPt, Msi dan Setiawan, SP
- ✓ Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan ke Kabupaten Sijunjung
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/712/Sekr-2016 tanggal 6 April 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 11 s/d 12 April 2016
 - Personil Pelaksana Dudi Badruddin, S.Hut, Ita Rahmawati, S.Hut, MM dan Liza Eka Putri
- ✓ Sosialisasi ISO dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan ke Kabupaten Pasaman Barat
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/739/Sekr-2016 tanggal 6 April 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 11 s/d 12 April 2016
 - Personil Pelaksana Sayogo Hutomo, S.Hut, MP, Tuti Surya, S.Sos dan Sasri Anita, SS
 - Hasil Pelaksanaan :
 - Sosialisasi ISO disampaikan kepada pimpinan (Kepala Dinas, Kabid dan Kasi) dan staf Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan serta *stake holder* terkait (pemegang perizinan di bidang kehutanan). Pada kesempatan sosialisasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu yang dijalankan meliputi 6 (enam) layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada pada Sekretariat, Bidang Planologi Kehutanan, Bidang Pemanfaatan Hutan, UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

- Pada kesempatan sosialisasi ke Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan lebih detail disampaikan mengenai Prosedur Pokok (PPK). Dimana Prosedur Pokok (PPK) ini merupakan kegiatan atau aktifitas utama dari fungsi-fungsi/unit-unit yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada stake holders mengenai persyaratan, proses serta waktu pemenuhan kebutuhan pelanggan di maksud.
 - Setelah melakukan sosialisasi mengenai implementasi ISO 9001:2008 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dilakukan Pengukuran Kepuasan Pelanggan/Stake Holder (PIN-08), dengan sasaran pegawai Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran kepuasan Pelanggan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat (pelanggan) terhadap pelayanan publik. Hasil survey ini digunakan sebagai penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - Hasil Rekapitulasi dan Perhitungan survey Pengukuran kepuasan Pelanggan di Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan kepada 28 responden dengan 14 unsur pelayanan menunjukkan hasil pengolahan dan perhitungan dari ke-28 responden menunjukkan IKM unit pelayanan sebesar 73,85. Ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berada pada kisaran 62,51 - 81,25 yaitu **Baik**
- Audit Internal Semester I SMM ISO 9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 April 2016. Yang diaudit adalah Top Manajemen, Wakil Manajemn Mutu, Prosedur Pokok (PPK) 5 prosedur, Prosedur Pendukung (PPD) 12 prosedur dan Prosedur Peningkatan (PIN) 8 prosedur dan Bidang serta UPT lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - Rapat Tinjauan Manajemen Semester I pada tanggal 20 Juli 2016 yang dihadiri oleh WMM, Eselon III, Eselon IV dan Staf Dinas Kehutanan bertempat Di Aula Dinas Kehutanan
 - Audit Internal Semester II SMM ISO 9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan yang dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 November 2016. Yang diaudit adalah Top Manajemen, Wakil Manajemn Mutu, Prosedur Pokok (PPK) 5 prosedur, Prosedur Pendukung (PPD) 12 prosedur dan Prosedur Peningkatan (PIN) 8 prosedur dan Bidang serta UPT lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - 2nd Surveillance Audit SMM ISO 9001:2008 pelayanan pada Dinas Kehutanan yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2016 yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland.
 - 2nd Surveillance Audit menemukan 4 temuan Nonconformity (NC) dan 16 observasi atau saran perbaikan. Temuan NC harus ditindaklanjuti sebelum tanggal 29 Desember 2016 sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

direkomendasikan untuk mendapat perpanjangan Sertifikat ISO lembaga Sertifikasi TU Rheinland dengan Sertifikat 01 100 1432985 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2014.

- Rapat Tinjauan Manajemen Semester II pada tanggal 23 Desember 2016 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan, WMM, Eselon III, Eselon IV dan Staf Dinas Kehutanan bertempat Di Aula Dinas Kehutanan.

c. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Capaian Program : Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan (4%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 253.170.000,-
: Penundaan, Rp. 239.360.000,-
- Output : Terlaksananya pemantauan titik panas, patrol pengendalian kebakaran hutan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan bimbingan teknis kelompok MPA (33 kali, 1 laporan)
- Outcome : Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya (4%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 220.608.650,- berdasarkan :
DPPA, : 87,14%
Penundaan : 92,17 %
- Pelaksanaan Kegiatan :
Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, adalah :
 - Bimtek Pembentukan MPA dan masyarakat pada nagari sebanyak 3 kali
 - Koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan sebanyak 5 kali
 - Sosialisasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan
 - Crossceck hotspot sebanyak 8 kali
 - Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan sebanyak 8 kali
 - Pemadaman kebakaran hutan sebanyak 3 kali (1 kali untuk kota Padang, dan Kabupaten 2 kali)

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam :

1) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam
- Input : Dana : DPPA, Rp. 226.305.000,-
: Penundaan, Rp. 164.928.000,-
- Output : Termonitornya tanaman hasil kegiatan RHL tahun 2011 seluas 1.400 Ha di 10 kabupaten/kota
- Outcome : Termonitornya penurunan luas lahan kritis hasil kegiatan RHL baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan seluas 1.400 ha dengan indek 0,18%
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 144.488.000,- berdasarkan :
DPPA, : 63,85 %
Penundaan : 87,61%

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahantahun 2016 terdiri dari :

a) Pemeliharaan rehabilitasi hutan tahun I.

Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi hutan tahun I, direncanakan dilaksanakan seluas 40 Ha dengan pelaksana 4 (empat) kelompok tani, namun realisasi pelaksanaan kegiatan hanya sampai kepada evaluasi sebelum pemeliharaan.

b) Pembuatan rehabilitasi hutan.

Kegiatan pembuatan rehabilitasi hutan direncanakandilaksanakan seluas 25 Ha dengan pelaksana 3 (tiga) kelompok tani, namun realisasi pelaksanaan kegiatan hanya sampai kepada sosialisasi.

Realisasi terhadap rencana pelaksanaan seperti di atas tidak semuanya dapat dilaksanakan yaitu 1). Pemeliharaan rehabilitasi hutan tahun I seluas 40 Ha dan 2).Pembuatan rehabilitasi hutan seluas 25 Ha, hal tersebut dikarenakan di pertengahan tahun anggaran ada perubahan terhadap DPA, dengan adanya Permendagri Nomor, 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, dimana untuk bantuan yang diterima oleh masyarakat/kelompok tani ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya kelompok tani harus berbadan hukum dan mekanisme pemberian bantuan harus melalui hibah dan bansos, hal ini belum bisa dilakukan terhadap kelompok tani sasaran yang sudah direncanakan pada dua kegiatan tersebut di atas, sehingga DPA mengalami perubahan dan dialihkan menjadi kegiatan monitoring terhadap keberhasilan tanaman 5

(lima) tahun yang lalu untuk mendapatkan gambaran tingkat penurunan lahan kritis di Sumatera Barat, dimana hal tersebut menjadi salah satu tugas/kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan yang dijadikan kontrak kinerja Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat, dimana indeks yang harus dipenuhi untuk penurunan lahan kritis sebesar 0,18.

Kegiatan monitoring terhadap keberhasilan tanaman 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2011) dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota terhadap kegiatan penanaman, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Sesuai dengan data, luas lahan kritis yang dilakukan penanaman pada tahun 2011 seluas 1.400 Ha, untuk kegiatan evaluasi, maka diambil sampel seluas 750 Ha.

Evaluasi keberhasilan tanaman dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor. P.1/V-Set/2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan RHL.

Dari evaluasi yang dilaksanakan, ternyata hasil yang didapat menunjukkan angka indeks 0,17, angka ini masih dibawah indeks yang diharapkan yaitu 0,18, hal ini terjadi karena pembuatan tanaman RHL yang dilakukan padat tahun 2011 **tidak diikuti dengan pemeliharaan**, baik yang dilakukan oleh Dinas yang menangani sektor kehutanan di kab/kota, maupun oleh masyarakat secara swadaya.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.440.000,-, sisa anggaran tersebut berasal dari belanja BBM sebesar 11.062.000 tidak bias dibelanjakan karena keterbatasan armada/kendaraan dinas, dan sisa dana dari belanja perjalanan dinas sebesar 9.376.000,- merupakan selisih dari biaya perjalanan dinas untuk eselon III dan IV yang dilaksanakan oleh staf, serta sisa penghematan penginapan.

2) Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 24.500.000,-
- Output : Terbangunnya bangunan konservasi tanah (2 unit)
- Outcome : Persentase penurunan lahan kritis (0,18 %)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 18.812.650,- (76,79%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Pada Tahun 2016 ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Fisik Sarana Konservasi Tanah dan Air, melalui DPA Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Perubahan Tahun 2016, hanya menganggarkan

biaya untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sarana Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang telah dibuat pada tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bangunan Sarana Konservasi Tanah dan Air dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi tersebar pada 5 Kabupaten Se-Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.9. Lokasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Bangunan Konservasi

NO	KELOMPOK TANI PELAKSANA	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TAHUN PEMBUATAN
1	HUTAN LESTARI	DAM PENAHAN	KAB. TANAH DATAR Jorong Talago Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas	2015
2	LPHN PASIR TALANG TIMUR	DAM PENAHAN	KAB. SOLOK SELATAN Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu	2015
3	HKm SONTRA	DAM PENAHAN	KAB. PASAMAN Jorong Sontra Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur	2015
4	AGRIBISNIS	EMBUNG	KAB. SOLOK Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti	2014
5	MAJU BERSAMA	DAM PENAHAN	KAB. PASAMAN BARAT Jorong Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau	2014

Sisa anggaran sebesar sebesar Rp. 5.687.350,- merupakan sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan yang terdiri dari :

- Sisa dana sebesar Rp. 3.487.350,- merupakan sisa Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Sisa dana sebesar Rp. 2.200.000,- merupakan sisa Perjalanan Dinas.
- Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah mempunyai sasaran "Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam" terdiri dari 1 (satu)

Indikator Kinerja Utama dengan capaian persentase penurunan lahan kritis dengan target kinerja sasaran tahun 2016 sebesar 0,18 %.

- Dalam meningkatkan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya Pengembangan Sarana Konservasi Tanah yang semula direncanakan dengan pembangunan bangunan konservasi tanah (kegiatan sipil teknis)
- Maksud Pengembangan Sarana Konservasi Tanah adalah untuk meningkatkan upaya konservasi tanah dan air dalam langkah memperbaiki kondisi lahan kritis. Sedangkan tujuannya adalah untuk mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari.
- Pada kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Bangunan Konservasi Tanah dan Air jenis yaitu Dam Penahan dan Embung Air dengan tahun pembuatan 2014 dan 2015, yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Solok Selatan, Pasaman, Solok dan Pasaman Barat.
- Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki target indikator Kinerja sasaran persentase penurunan luas lahan kritis sebesar 0,18 %. Artinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus berupaya menurunkan luasan lahan kritis sebesar 0,18 % dari luasan lahan kritis sebelumnya. Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah berkontribusi pada sektor Sipil Teknis dalam meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam secara tidak langsung.
- Kegiatan yang terdapat dalam program ini masih terjaga dan terawat dan berfungsi sesuai tujuan dibangunnya bangunan konservasi tanah tersebut yaitu mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari
- Capaian kerjanya mendukung upaya konservasi tanah dan air dalam langkah memperbaiki kondisi lahan kritis.
- Dan pada akhirnya pencapaian sasaran melalui kegiatan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

3) Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam (20%)

- Input : Dana : DPPA, Rp. 100.000.000,-
: Penundaan, Rp. 99.820.000,-
- Output : Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL di 18 kab/kota dan 9 pemegang IPPKH
- Outcome : luas lahan kritis yang dapat direhabilitasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan seluas 431 Ha
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 87.368.400,- berdasarkan :
DPPA, : 87,37%
Penundaan : 87,53 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL tahun 2016 terdiri dari :

- a) Monitoring dan Pembinaan pelaksanaan RHL di Kabupaten/Kota sebanyak 18 Kab/Kota.

Realisasi kegiatan Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan RHL dapat dilakukan 100 %, monitoring dan pembinaan RHL dilakukan terhadap pelaksanaan RHL di kabupaten/kota baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kawasan hutan, dari sumber dana yang berasal dari APBD kabupaten, DAK Bidang Kehutanan dan APBN.

Kegiatan monitoring dan pembinaan RHL ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan RHL di kabupaten/kota dan melaksanakan pembinaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- b) Monitoring pelaksanaan RHL oleh pemegang IPPKH.

Kegiatan monitoring pelaksanaan RHL oleh pemegang IPPKH adalah kegiatan untuk memonitor dan bimbingan teknis terhadap Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam dan di luar kawasan hutan sebagai salah satu kewajiban pemegang izin sebagai kompensasi terhadap penggunaan kawasan hutan yang dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Realisasi monitoring pelaksanaan RHL oleh pemegang IPPKH dilakukan terhadap 9 izin yaitu :

1. A/n Bupati Pasaman Barat
2. A/n Bupati 50 Kota
3. PT. Semen Padang
4. A/n Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman

5. PT. Tipa Bara
6. PT. Bukit Cahaya Mas
7. PT. Galian Galian Buana
8. A/n Bupati Sijunjung.
9. A/n PLN Persero Wilayah Sumbar

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.451.600,-, sisa anggaran tersebut berasal dari belanja BBM sebesar 5.336.600,- tidak bias dibelanjakan karena keterbatas armada/kendaraan dinas, dan sisa dana dari belanja perjalanan dinas sebesar 7.115.000,- merupakan sisa penghematan penginapan.

4) Kegiatan Pembinaan Monitoring Pengelolaan DAS

- Capaian Program : Perbaikan daya dukung Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Barat
- Input : Dana : DPPA, Rp. 99.720.000,-
: Penundaan, Rp. 59.144.000,-
- Output : Tersedianya buku peraturan gubernur sebanyak 1 peraturan
- Outcome : menurunnya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luarKawasa hutan
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 51.252.800,- berdasarkan :
DPPA, : 51,40%
Penundaan : 86,66 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri dari

- a) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Realisasi kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat-rapat dalam rangka penyusunan pergub oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dan 1 (satu) kali pelaksanaan sosialisai/ konsultasi publik.

- b) Pembinaan dan Monitoring DAS

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitor dan melakukan pembinaan terhadap implementasi atas Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) yang telah mendapatkan pengesahan Gubernur.

Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara rekomendasi yang terdapat di RPDAS dan pelaksanaan di lapangan, terutama rekomendasi untuk kegiatan RHL.

Realisasi kegiatan ini dilaksanakan terhadap 6 (enam) RPDAS yaitu :

1. RPDAS Rokan (Wilayah Kabupaten Pasaman)
2. RPDAS Koto Panjang (Wilayah Kabupaten Pasaman dan 50 Kota)
3. RPDAS Batang Hari (Wilayah Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Dharmasraya)
4. RPDAS Pasaman (Wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat)
5. RPDAS Gasan Gadang (Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Agam)
6. RPDAS Tarusan (Wilayah Kabupaten Solok, Pessel dan Kota Padang)

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.891.200,- sisa anggaran tersebut berasal dari belanja BBM sebesar 1.446.200,- tidak bias dibelanjakan karena keterbatasan armada/kendaraan dinas, dan sisa dana dari belanja perjalanan dinas sebesar 2.45.00,- merupakan sisa penghematan penginapan.

5) Kegiatan Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 67.721.000,-
- Output : Tersedianya dokumen rancangan kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan rehabilitasi DAS oleh pemegang izin (2 Dokumen)
- Outcome : Penurunan luas lahan kritis 0,18%
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 59.265.800,- (87,51%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Rehabilitasi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam senilai Rp. 67.721.000,- dirinci dalam 6 (enam) rekening belanja.

- 1) Belanja Bahan Pakai Habis, Rp. 1.377.000,-
- 2) Belanja Bahan/Material, Rp. 1.550.000,-
- 3) Belanja Cetak dan Penggandaan, Rp. 825.000,-

- 4) Belanja Makanan dan Minuman, Rp. 1.875.000,-
- 5) Belanja Perjalanan Dinas, Rp. 55.334.000,-
- 6) Belanja Honorarium Non PNS, Rp. 6.760.000,-

Realisasi fisik dan keuangan per belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Bahan Pakai Habis.
Realisasi fisik sebesar 59,97 % dan keuangan senilai Rp. 825.800,- (59,97%).
- 2) Belanja Bahan/Material.
Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 1.550.000,- (100%).
- 3) Belanja Cetak dan Penggandaan.
Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 825.000,- (100%).
- 4) Belanja Makanan dan Minuman.
Realisasi fisik sebesar 66,67 % dan keuangan senilai Rp. 1.250.000,- (66,67%).
- 5) Belanja Perjalanan Dinas.
Realisasi fisik sebesar 93,93 % dan keuangan senilai Rp. 48.055.000,- (86,85%).
- 6) Belanja Honorarium Non PNS.
Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 6.760.000,- (100%).

6) Kegiatan Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK)

- Capaian Program : Perbaikan daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam (2.000 Ha)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 518.146.350,-
- Output : Terlaksananya penanaman rotan 30 Ha dan pembangunan bank buah 20 Ha
- Outcome : Penurunan luas lahan kritis 0,18%
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 498.063.250,- (96,12%)
- Pelaksanaan Kegiatan :

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK) dengan Sub Kegiatan:

1. Penanaman Rotan

Penanaman Rotan seluas 30 Ha telah dilaksanakan di Jorong Mudiak Aia, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksana fisik kegiatan adalah Kelompok Kerja Bukik Garuda yang beranggotakan 30 anggota. Pelaksanaan dilaksanakan di Hutan Lindung dengan Komoditi Rotan Jernang, prosedur penanaman diatur dalam Rancangan Teknis Penanaman Rotan.

Pelaksanaan fisik lapangan di laporkan dalam bentuk laporan kerjantara oleh kelompok tani, laporan perjalanan dinas bimbingan teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan oleh tim pengawas dari pihak KPHL Bukit Barisan meliputi laporan (Pelaksanaan Penampunagn Bibit Sementara(Persiapan lapangan/pemotongan semak dan alang-alang, Pembuatan Bedeng, Pembuatan Naungan, Penyiraman dan Penyiangan, Pengangkutan Bibit dari TPK ke Lokasi Penanaman) Pelaksanaan Pembuatan Tanaman (Pembuatan Jalan Pemeriksaan, Persiapan lapangn/pemotongan semak & alang-alang, Penentuan arah larikan, Pemancangan ajir, Pembuatan Piringan dan lubang tanam, Pembuatan gubuk kerja, Pembuatan papan nama, Pendistribusian bibit kelubang tanam, penanaman dan pemupukan) Pemeliharaan Tahun Berjalan (Distribusi bibit ke lubang tanam, penyiangan/pendangiran, penyulaman)). Pelaporan keuangan dilaksanakan setiap bulannya dalam bentuk realisasi keuangan dan fisik.

2. Pembangunan Bank Buah

Pembangunan Bank Buah seluas 20 Ha dilaksanakan di Jorong Sungai Nyalo, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksana fisik kegiatan adalah Kelompok Kerja Bukik Paku yang beranggotakan 30 anggota. Pelaksanaan dilaksanakan di Hutan Lindung dengan MPTS (Manggis, Durian, Matoa, Kelengkeng), prosedur penanaman diatur dalam Rancangan Teknis Pembangunan Bank Buah .

Pelaksanaan fisik lapangan di laporkan dalam bentuk laporan kerjantara oleh kelompok tani, laporan perjalanan dinas bimbingan teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan oleh tim pengawas dari pihak KPHL Bukit Barisan meliputi laporan (Pelaksanaan Penampunagn Bibit Sementara(Persiapan lapangan/pemotongan semak dan alang-alang, Pembuatan Bedeng, Pembuatan Naungan, Penyiraman dan Penyiangan, Pengangkutan Bibit dari TPK ke Lokasi Penanaman) Pelaksanaan Pembuatan Tanaman (Pembuatan Jalan Pemeriksaan, Persiapan lapangn/pemotongan semak & alang-alang, Penentuan arah larikan, Pemancangan ajir, Pembuatan Piringan dan lubang tanam, Pembuatan

gubuk kerja, Pembuatan papan nama, Pendistribusian bibit kelubang tanam, penanaman dan pemupukan) Pemeliharaan Tahun Berjalan (Distribusi bibit ke lubang tanam, penyiangan/pendangiran, penyulaman)). Pelaporan keuangan dilaksanakan setiap bulannya dalam bentuk realisasi keuangan dan fisik.

7) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD)

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam (10%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 1.095.508.000,-
- Output : Terlaksananya pembangunan hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan (60Ha); Terpeliharanya rehabilitasi hutan dan lahan kritis penanaman hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan tahun1 (35 Ha)
- Outcome : Penurunan luas lahan kritis (0,18%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 965.891.300,- (88,17%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD) dengan Sub Kegiatan:

1. Pemeliharaan Tanaman Tahun 1

Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 telah dilaksanakan pada lokasi Pembangunan Hutan Tanaman Jabon seluas 35 Ha yang Penanamannya dilaksanakan pada Tahun 2015 melalui Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan Pemeliharaan Tahun 1 dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Situnggang yang merupakan kelompok pelaksana Pembangunan Hutan Tanaman Jabon di Jorong Saruaso Timur, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang telah terealisasi/terlaksana pada Triwulan I/II Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan.

2. Pembangunan Hutan Tanaman Jabon Tahun 2016

Pembangunan Hutan Tanaman Jabon Tahun 2016 direncanakan dibangun seluas 60 (enam puluh) Hektar. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui pelaksanaan, Identifikasi/orientasi pengumpulan data fisik serta sosek, Pengukuran lokasi penanaman, sosialisasi kegiatan penanaman/pembentukan kelembagaan, pemasangan patok/pal batas lokasi penanaman, bimbingan teknis pekerjaan

penanaman, evaluasi tanaman.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Jabon Tahun 2016, setelah melalui Pembentukan Kelembagaan menetapkan Kelompok Kerja Bukik Turak yang beranggotakan 40 (empat puluh) anggota sebagai pelaksana fisik Pembangunan Hutan Tanaman Jabon 2016 di Jorong Talago Gunung, Nagari saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar. Pelaksanaan Sub kegiatan juga diawasi oleh Tim Bimbingan Teknis yang telah di SK kan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala KPHL Bukit Barisan.

Pelaksanaan fisik lapangan di laporkan dalam bentuk laporan kerjantara oleh kelompok tani, laporan perjalanan dinas bimbingan teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan oleh tim pengawas dari pihak KPHL Bukit Barisan meliputi laporan (Pelaksanaan Penampunagn Bibit Sementara(Persiapan lapangan/pemotongan semak dan alang-alang, Pembuatan Bedeng, Pembuatan Naungan, Penyiraman dan Penyiangan, Pengangkutan Bibit dari TPK ke Lokasi Penanaman) Pelaksanaan Pembuatan Tanaman (Pembuatan Jalan Pemeriksaan, Persiapan lapangn/pemotongan semak & alang-alang, Penentuan arah larikan, Pemancangan ajir, Pembuatan Piringan dan lubang tanam, Pembuatan gubuk kerja, Pembuatan papan nama, Pendistribusian bibit kelubang tanam, penanaman dan pemupukan) Pemeliharaan Tahun Berjalan (Distribusi bibit ke lubang tanam, penyiangan/pendangiran, penyulaman)). Pelaporan keuangan dilaksanakan setiap bulannya dalam bentuk realisasi keuangan dan fisik.

8) Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016+APBD)

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan serta pemulihan cadangan sumber daya alam (10%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 1.332.705.000,-
: Penundaan, Rp. 1.331.805.000,-
- Output : Terlaksananya pembangunan hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan 60 Ha, Terpeliharanya rehabilitasi hutan dan lahan kritis penanaman hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan tahun 1- 35 Ha
- Outcome : Penurunan luas lahan kritis 0,18%
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 1.128.243.800,- berdasarkan :
DPPA, : 84,66%
Penundaan : 84,72 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 + APBD) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam senilai Rp. 1.331.805.000,- dirinci dalam 7 (tujuh) rekening belanja.

- 1) Belanja Bahan Pakai Habis, Rp. 3.670.000,-
- 2) Belanja Bahan/Material, Rp. 2.790.000,-
- 3) Belanja Cetak dan Penggandaan, Rp. 1.125.000,-
- 4) Belanja Makanan dan Minuman, Rp. 2.000.000,-
- 5) Belanja Perjalanan Dinas, Rp. 63.700.000,-
- 6) Belanja Honorarium Non PNS, Rp. 14.880.000,-
- 7) Belanja Jasa Lainnya, Rp. 1.244.540.000,-

Realisasi fisik dan keuangan per belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Bahan Pakai Habis, Realisasi fisik sebesar 66,21 % dan keuangan senilai Rp. 2.429.000,- (66,21%).
- 2) Belanja Bahan/Material, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 2.642.000,- (94,70%).
- 3) Belanja Cetak dan Penggandaan, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 1.125.000,- (100%).
- 4) Belanja Makanan dan Minuman, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 2.000.000,- (100%).
- 5) Belanja Perjalanan Dinas, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 61.153.000,- (96,00%)
- 6) Belanja Honorarium Non PNS, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 14.880.000,- (100%)
- 7) Belanja Jasa Lainnya, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 1.044.089.000,- (83,89%).

Output dari Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 + APBD) adalah :

- Tanaman reboisasi pengayaan hutan lindung di Nagari Duku Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan seluas 85 Ha.
- Tanaman reboisasi pengayaan hutan lindung di Nagari Gantung Ciri Kec. Kubung Kab. Solok seluas 40 Ha.
- Tanaman rehabilitasi/pengayaan hutan (pemeliharaan) di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto seluas 35 ha.
- Rancangan Teknis Kegiatan Reboisasi Pengayaan Hutan Lindung Nagari Duku Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan

- Rancangan Teknis Kegiatan Reboisasi Pengayaan Hutan Lindung Nagari Gantung Ciri Kec. Kubung Kab. Solok

9) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK-2016)

- Capaian : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam Program peningkatan fungsi ekologis (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 952.112.100,-
- Output : Tersedianya sarana dan prasarana operasional KPHL bukit barisan (1 paket)
- Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional KPHL bukit barisan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 908.423.500,- (95,41%) :
- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa dana DAK sebesar Rp. 43.688.600,- yang merupakan sisa mati, terdiri dari sisa ;

 - Belanja pengadaan kendaraan roda 2 Rp. 40.144.000,-,
 - Belanja modal pengadaan alat ukur Rp. 111.000,- .
 - Belanja modal pengadaan alat pemadam kebakaran Rp. 2.181.750,-
 - Belanja modal pengadaan komputer Rp. 1.224.000,-
 - Belanja modal pengadaan printer Rp. 27.850,-

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2016 pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan pada Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah adakalanya kesulitan dalam memperoleh persekot dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mendadak; agak kesulitan dalam memilih personil pelaksana kegiatan yang bisa memberi kontribusi untuk mencapai hasil yang diinginkan karena yang memiliki SDM yang bagus jumlahnya terbatas; dan adanya kegiatan dua seksi dalam satu kegiatan di bidang.

- 2) Kurangnya dukungan Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran yang ada pada kabupaten/kota berakibat kepada beban yang cukup berat dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Jasa Lingkungan, mitigasi bencana serta pengamanan dan perlindungan hutan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, apalagi dengan sudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagian Kabupaten/Kota sudah tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk pembangunan kehutanan
- 3) Dalam pengumpulan data Sisperhut masih banyak data yang diminta ke Kabupaten/kota yang tidak bisa dipenuhi; Buku Statistik Tahun 2015 terlambat dicetak karena lambatnya pengumpulan data dari bidang terkait dan data yang dikumpulkan belum komunikatif; Belum optimalnya Implementasi ISO 9001:2008 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Hasil Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan belum optimal digunakan untuk memperbaiki kinerja kegiatan pada masa yang akan datang.
- 4) Banyak data/dokumen penanaman tahun 2011 yang tidak ada/hilang dengan berbagai alasan (berganti seksi atau pindah kantor/ruangan); Tanaman hasil pembuatan tahun 2011 tidak ditindaklanjuti dengan pemeliharaan baik pendanaan dari dinas kehutanan kab/kota maupun secara swadaya oleh masyarakat.
- 5) Beberapa daerah kabupaten kota belum seluruhnya mempedomani RPDAS, terutama atas rekomendasi yang melibatkan beberapa SKPD kab/kota, hal ini terjadi karena belum terbentuknya Forum DAS di kab/kota.
- 6) Tingginya klaim kepemilikan masyarakat terhadap lahan yang berada di dalam kawasan hutan negara dalam bentuk status tanah ulayat; Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan yang harus selalu terjaga; Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola-pola pengelolaan hutan dan potensi wisata alam hutan yang berwawasan kelestarian lingkungan

b. Solusi

- 1) Mengambil kebijakan sendiri dengan menanggulangi biaya untuk pelaksanaan tugas terlebih dahulu untuk memperoleh hasil sebagaimana yang sudah diperintahkan dan diinginkan oleh pimpinan; Lebih sering menggunakan personil yang memiliki kemampuan bagus dengan harapan bisa memicu semangat staf yang lain untuk berusaha menjadi lebih baik; Disaran kepada pimpinan agar mengalokasikan kegiatan untuk masing-masing kegiatan per-seksi
- 2) Perlunya dukungan prioritas jumlah anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan kegiatan Jasa Lingkungan, Pengelolaan Ekosistem Esensial, Mitigasi Bencana dan Upaya Preventif Perlindungan Hutan (Patroli, PPHBN dll) mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kewenangan Kehutanan kecuali TAHURA sudah berada pada Pemerintah Daerah Provinsi.

- 3) Mencoba menghubungi kembali kabupaten/kota yang belum memberikan data dan melakukan koordinasi via telepon atau email dalam rangka memenuhi data yang dibutuhkan; Untuk masa yang akan datang pada awal tahun sudah mulai diinformasikan kepada Sekretariat, Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan terkait jenis data-data apa saja yang perlu disediakan baik yang berkaitan dengan Sisperhut, Statistik Tahun 2016 maupun data-data lainnya; Membuat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor 065/1619/Sekr-2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pembentukan Tim Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Menyampaikan hasil rapat monitoring kepada Sekretariat, Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan agar dapat ditindaklanjuti.
- 4) Memberikan pemahaman - pemahaman kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan tentang status keberadaan hutan sebagai daerah penyangga kehidupan; Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan keamanan program dan kegiatan melalui penentuan pilihan lokasi kegiatan dengan sangat selektif; Membuat Memorandum of Understanding/Kesepahaman (MoU) dengan perangkat pemerintah terendah dan perangkat masyarakat adat sebelum kegiatan dilaksanakan

B. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan Pilihan Kehutanan Tahun 2016 terdiri dari 9 program dan 50 kegiatan, Alokasi anggaran sebesar Rp 9.584.480.025,- dan realisasi keuangan Rp 8.539.071.851,- (89,09 %) dengan realisasi fisik 100,00 %. Berdasarkan penundaan, dengan dana Rp. 8.798.744.015 didapatkan realisasi keuangan sebesar 97,05%.

1. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Pilihan Kehutanan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang terdiri dari kegiatan:

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- 2) Optimalisasi PNBK.
- 3) Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman.
- 4) Pengembangan Pengujian dan Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)
- 6) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
- 7) Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

- b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Lahan yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.
 - 2) Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
 - 3) Konservasi Sumber Daya Genetik.
- c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan kehutanan.
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HTR dan HR Kemitraan.
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan.
 - 4) Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat
 - 5) Penguatan Kelompok Kerja Mangrove daerah
- d. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
 - 2) Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
 - 3) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 10) Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
 - 12) Penyediaan Jasa Sopir Kantor
 - 13) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
 - 14) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.
 - 15) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari kegiatan:
- 1) Pembangunan Gedung Kantor
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 3) Pengadaan Meubelier.
 - 4) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi..
 - 5) Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
 - 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
 - 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan
 - 12) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
- g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- h. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari kegiatan :
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari kegiatan :
- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD..
 - 2) Penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan SKPD.
 - 3) Penatausahaan keuangan SKPD.

2. Realisasi Program dan Kegiatan

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang terdiri dari :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- Capaian : Terwujudnya pengembangan industri hasil hutan, hutan alam, Program hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 74.760.000,-
: Penundaan, Rp. 41.020.000,-
- Output : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan bukan kayu (1 Laporan)

3) Kegiatan Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman.

- Capaian : Terwujudnya Pengembangan Industri Hasil Hutan, Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Hasil Hutan Bukan Kayu 20 %
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 124.945.000,-
: Penundaan, Rp. 81.075.000,-
- Output : Laporan Monitoring dan Evaluasi/ Pembinaan Penatausahaan Produksi Hasil Hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan Bahan Baku dan Pemasaran Hasil Hutan, Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman (3 laporan)
- Outcome : Meningkatnya Pencapaian Target Produksi Kehutanan dan Penerimaan Negara Sektor Kehutanan 80 %
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 78.826.000,- berdasarkan :
DPPA, : 63,09%
Penundaan : 97,23%

- Pelaksanaan Kegiatan :

Realisasi pelaksanaan Monitoring Produksi dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku pada IUIPHHK di 12 kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota/Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok/Kota Solok/Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam/Kota Bukittinggi, pada bulan Juni dan November 2016 dengan hasil resume laporan .

Produksi kayu olahan IUIPHHK berupa kayu gergajian/kayu olahan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebanyak 2.205,0514 M³.

4) Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan

- Capaian : Terwujudnya pengembangan industri hasil hutan, hutan alam, hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (20%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 124.300.000,-
- Output : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan di Kabupaten/Kota sebanyak 1 laporan
- Outcome : Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan (80%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 119.074.650,- (95,80%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat beberapa sub kegiatan dalam kegiatan tersebut antara lain Konsultasi dan koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan ke Kementerian Kehutanan.

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan terdiri dari :

- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak dan HHBK di Kabupaten/Kota;
- Monitoring Penerbitan dan Pembinaan Pengelolaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan pada Industri di Kabupaten/Kota;
- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan ke IUPHHK-HA/HT/HGU dan IPK di Kabupaten/Kota;
- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan ke IUPHHK-HA/HT/HGU dan IPK ke Kabupaten Kepulauan Metawai;
- Konsultasi kegiatan PUHH ke Kementerian Kehutanan.

Sampai tanggal 31 Desember 2016, realisasi anggaran pada Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan sebesar Rp. 119.354.650,- atau sebesar 95,48 % dari pagu dana sebesar Rp. 125.000.000,- dengan capaian Fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp. 5.645.350,- merupakan sisa mati kegiatan yang berasal dari :

- Sisa mati Belanja Bahan Bakar dan barang pakai habis sebesar Rp. 2.686.300,-
- Sisa mati Belanja Perjalanan Dinas dan Penginapan PNS sebesar Rp. 2.959.050,-

Target Kinerja Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan adalah Terlaksananya monev/pembinaan, dokumen angkutan hasil hutan di Kabupaten/Kota dan luar provinsi serta kinerja petugas Penatausahaan Hasil Hutan di 19 Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2016, realisasi keluaran tercapai sebanyak 19 Kabupaten/Kota (100%) yang menjadi target kinerja keluaran pada kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan. Realisasi capaian kinerja keluaran didapat dari pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Kabupaten/Kota.

Ouput dan Outcome yang terukur

- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak dan HHBK di Kabupaten/Kota pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 14 Kabupaten diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Lima puluh Kota dan, Kota Padang panjang, Sawahlunto, dan Payahkumbuh.
- Monitoring Penerbitan dan Pembinaan Pengelolaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan pada Industri di Kabupaten pada tahun 2016, terealisasi

sebanyak 9 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Agam, Sijunjung, Solok, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Solok.

- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan ke IUPHHK-HA/HT/HGU dan IPK pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 5 Pemegang izin di Kabupaten, diantaranya IPK Hutan Hak an. Erianto di Kabupaten Solok Selatan, HTI PT. Bukit Raya Mudisa (BRM) di Kabupaten Dharmasraya/ Solok Selatan, HGU PT. Multikarya Sawit Prima di Kabupaten Solok Selatan, (IPK) PT. Karya Batani di Kabupaten Sijunjung dan HPH PT Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Konsultasi kegiatan PUHH ke Kementerian Kehutanan.

5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)

- Capaian : Terwujudnya Pengembangan Industri Hasil Hutan, hutan alam, Program hutan tanaman dan HHBK
- Input : Dana : DPPA, Rp. 286.040.000,-
: Penundaan, Rp. 251.540.000,-
- Output : Terbinanya Kelompok Tani dalam budidaya aneka Usaha kehutanan 10 Kelompok
- Outcome : Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) (80%)
- Realisasi : Fisik : 100%
Keuangan : Rp. 237.829.850,- berdasarkan :
DPPA, : 83,15%
Penundaan : 94,55%
- Pelaksanaan Kegiatan :

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani hutan dalam mengembangkan berbagai jenis usaha sektor kehutanan (HHBK) seperti budidaya jamur tiram, budidaya gaharu, budidaya aren, budidaya jernang, budidaya sutera alam, budidaya lebah madu dan juga dalam hal pemasaran dan pengolahan produksinya.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan merupakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat/Kelompok tani yang melakukan berbagai aneka usaha kehutanan khususnya HHBK yang turut mendukung sasaran strategis meningkatnya produksi dan pendapatan dari hasil HHBK yang dibudidayakannya.

Sisa anggaran sebesar sebesar Rp. 13.710.150,- merupakan sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan yang terdiri dari :

- Sisa dana sebesar Rp. 3.900,- merupakan sisa Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Sisa dana sebesar Rp. 100.000,- merupakan sisa jasa transportasi.
- Sisa dana sebesar Rp. 250,- merupakan sisa penggandaan/fotocopy.
- Sisa dana sebesar Rp. 9.606.000,- merupakan sisa perjalanan dinas.
- Sisa dana sebesar Rp. 4.000.000,- merupakan sisa tenaga ahli/narasumber.

Tahapan dan rangkaian Kegiatan

➤ Orientasi Calon Lokasi dan Pengumpulan data Sosek

Untuk kegiatan calon lokasi pembuatan demplot tanaman gaharu dan Jernang yang direncanakan pelaksanaan pada tahun 2016 dilakukan Berdasarkan usulan/proposal / data dan informasi Kabupaten/Kota, calon lokasi sasaran kegiatan pembuatan demplot tanaman gaharu dan jernang diorientasi terlebih dahulu untuk dinilai kelayakannya dan lokasi yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai lokasi kegiatan adalah :

1. Kabupaten Pasaman seluas 3 Ha yaitu : Kelompok HKM Musus Saiyo Jorong Musus Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol (Budidaya Jernang);
2. Kabupaten Pesisir Selatan seluas 3 Ha yaitu : Kelompok Tani Maju Bersama Kampung Dusun Baru Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir;

➤ Pengukuran lokasi

Pengukuran dilaksanakan setelah dilakukan orientasi lapangan, Pengukuran dilakukan untuk menentukan keadaan lahan/areal yang diusulkan kelompok tani berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL)

Tabel 1.10. Kegiatan Pengukuran Lokasi Demplot Baru

No	Kabupaten	Kelompok	Alamat	Luas	Ket
1	Pasaman	HKm Musus Saiyo	Jorong Musus nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol	3 Ha	Jernang
2	Pesisir Selatan	Maju Bersama	Kampung Dusun Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	3 Ha	Gaharu

➤ Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dilakukan oleh Pelaksana (Dinas Kehutanan/Badan Pelaksana Penyuluhan) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan Sosialisasi terhadap kelompok pelaksana tahun 2016 tidak jadi dilaksanakan.

➤ Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan terhadap pelaksanaan pembuatan demplot tanaman gaharu, rotan dan Jernang. Kegiatan Bimbingan Teknis terhadap kelompok pelaksana tahun 2016 tidak jadi dilaksanakan.

➤ **Monitoring dan evaluasi**

Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya HHBK yang mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang sudah dilaksanakan dengan menurunkan Tim Monitoring dan Evaluasi ke lokasi yang ditunjuk dan sudah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan.

Tabel 1.11. Monitoring dan Evaluasi budidaya HHBK yang mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kelompok	Alamat	Ket
1	Limapuluh Kota	Bendang Saiyo	Jorong Boncah Nagari Sipang Sugiran Kecamatan Guguk	Jamur Tiram
		Saraso	Jorong Tigo Alur Nagari Batu Balang Kecamatan Harau	Jamur Tiram
		Rosella	Kelurahan Payolinam Kecamatan Payakumbuh	Jamur Tiram
2	Dharmasraya	Dimas Mandiri	Jorong Kampung Tengah Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak	Jamur Tiram
3	Tanah Datar	Pitando Terpadu	Joron Piliang Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum	Jamur Tiram
		Kaffah	Nagari Rao-Rao Sungai Tarab	Gaharu
4	Pasaman Barat	KWT Amanah	Jorong Sidodadi Nagari Kinali Kecamatan Kinali	Jamur Tiram
5	Bukittingi	Serunai Putih	Kecamatan Mandi Angin	Jamur Tiram
	Payakumbuh	Angrek	Kecamatan Payakumbuh	Jamur Tiram
6	Pasaman	Berkat Air Dolok	Jorong Murni Nagari Sontang Kecamatan Padang Gelugur	Jamur Tiram
		Borkat Manian	Jorong Bahagia Nagari Panti	Jamur Tiram
7	Sijunjung	KWTTiram Bundo Sakato	Jorong Limau Sunday Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuk Tarok	Jamur Tiram
		Tunas Mandiri	Jorong Kapalo Koto Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan	Jamur Tiram

Selain Kegiatan monitoring juga dilakukan kegiatan evaluasi terhadap kelompok tani yang akan mendapatkan alokasi pemeliharaan tanaman tahun I dan Pemeliharaan Tahun II terhadap 8 kelompok Tani,

Kegiatan pemeliharaan pelaksanaannya diawali dengan melakukan cek lapangan dengan persentase tumbuh tanaman gaharu minimal 60 % untuk Pemeliharaan Tahun I dan 80 % untuk Pemeliharaan Tahun II, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan penetapan lokasi Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) tahun 2016 terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeliharaan tahun II demplot tanaman hasil pembuatan tahun 2014, pemeliharaan tahun I demplot tanaman hasil pembuatan tahun 2015.

Untuk kegiatan pemeliharaan tahun II demplot tanaman gaharu yang dilaksanakan tahun 2014 terletak di:

- Kabupaten Sijunjung seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Harapan Baru Lokasi Jorong Sibisir Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang;
- Kabupaten Limapuluh Kota seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Anak Kociak Lokasi Jorong Suliki Pasa Nagari Suliki Kecamatan Suliki;
- Kabupaten Tanah Datar seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Hutan Lestari Lokasi Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas;
- Kabupaten Agam seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Bungo Tanjung Lokasi Jorong Bungo Tanjung Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek;

Untuk kegiatan pemeliharaan tahun I pembuatan demplot yang dilaksanakan tahun 2015 terletak di :

- Kabupaten Limapuluh Kota seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Mandiri Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang Kecamatan Guguak;
- Kabupaten Limapuluh Kota seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Pituan Tanjung Jorong Koto Tengah Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Kabupaten Tanah Datar seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Batang Nago Jorong Sungai Salak Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas;
- Kabupaten Sijunjung seluas 5 Ha yaitu : Kelompok Tani Tigo Saiyo Jorong Kayu Gadih Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang;

➤ Pembinaan dan Pengendalian HHBK

Pembinaan dan Pengendalian terhadap Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) dengan melaksanakan bimbingan, arahan dan supervisi kepada Kelompok HKM/HN yang sudah memperoleh IUPHKM/HD telah dilakukan terhadap 12 Kelompok Tani HKM/HD

Kegiatan Pembinaan dan Penendalian HHBK di lokasi HKM/HN yang telah memiliki IUPHHK ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengembangan HHBK di lokasi HKM/HN,

sekaligus untuk Inventarisasi produk-produk HHBK yang akan dikembangkan di lokasi tersebut.

Tabel 1.12. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian HHBK di lokasi HKm/HN yang telah memiliki IUPHHK

No	Kabupaten	Kelompok	Alamat	Ket
1	Solok Selatan	Pulakek	Nagari Pulakek Kecamatan Koto Baru	Lebah Madu, Rota, Bambu
2	Solok	Sariak Alahan Tigo	Nagari Sariak Alahan Tigo	Rotan, Daun Pandan, Coklat
3	Solok	Wana lestari	Nagari Indudur Kecamatan Sungai Lasi	Durian, Manggis, Jengkol, Petai
4	Pasaman Barat	Gunung Leco	Jorong Mulyo Rejo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan	Rotan, Aren
5	Pasaman	HKm Raphita Saiyo	Batang Tuhur Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto	Rotan, Karet, Coklat
6	Solok Selatan	LPHN Pakan Rabaa		
7	Padang Pariaman	LPHN Aur Serumpun	Korong Sikayan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung	Rotan, Durian, Karet
8	Sijunjung	LPHN Manganti	Nagari Manganti Kecamatan Sumpur Kudus	Rotan, Jernang, Petai, Jengkol, Karet
9	Pasaman	HKm Beringin Sakti	Jorong Koto Panjang Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan	Karet, Aren, Madu Lebah, Rotan
10	Pasaman Barat	LPHN Katiagan	Jorong Mandi Angin Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali	Kepiting Bakau, Lokan Bakau, Udang Bakau, Madu

No	Kabupaten	Kelompok	Alamat	Ket
				Bakau
11	Sawahlunto	Hutan Desa Rantih	Desa Rantih Kecamatan Sawahlunto	Aneka Tanaman Buah
		HKm Lurah Basung	Desa Lurah Basung Kecamatan Talawi	Jeruk Melon
12	Solok	LPHN Sariak Alahan Tigo	Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti	Rotan, Karet

➤ Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Tani Hutan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada DPA Perubahan dimana tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memenuhi output/keluaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan yaitu Terbinanya 10 Kelompok Tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan.

Tabel 1.13. Pembinaan Kelompok Tani Dalam Budidaya Aneka Usaha Kehutanan

No	Kabupaten	Kelompok	Alamat	Ket
1	Agam	Berani Saiyo	Jorong Bateh Aka Nagari IV Koto Palembayan Kecamatan Palembayan	Aren
		KWT Sejahtera	Jorong Kampuang Gudang Nagari IV Koto Palembayan Kecamatan Palembayan	Kemiri
2	Dharmasraya	Sumber Rezeki	Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung	Jamur Tiram
		Sako Mandiri	Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung	Jeruk Melon, Jabon, Karet
3	Pasaman Barat	Saiyo Baru	Jorong Sungai Janiah Nagari Talu Kecamatan talamau	Tanaman Kehutanan
		Batang Nago	Jorong Tanjung Beruang Nagari Kajai Kecamatan Talamau	Aren
4	Padang Pariaman	Generasi Muda Patalangan	Jorong Patalangan Nagari Limau Purut Kecamatan V Koto Timur	Lebah Madu

No	Kabupaten	Kelompok	Alamat	Ket
		Aur Serumpun	Korong Sikayan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung	Rotan
5	Pesisir Selatan	Air Pincuran	Jorong Kapalo Banda Lubuk Nyiur Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas	Manau,Pala,Pina ng,Petai,Durian
		Bersama	Jorong Sungai Bungin Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	Cengkeh,Petai,M atoa,Jengkol
6	Pasaman	Mandiri	Nagari Lubuk Layang Kecamatan Mapattunggul	Rotan,
7	Sijunjung	Harapan Baru	Jorong Sibisir Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang	Gaharu
		Tigo Saiyo	Jorong Kayu Gadih Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Sijunjung	Gaharu,Magis,D urian
8	Solok	Tapi Tabek	Jorong Talago Dadok Nagari Sungai Janiah Kecamatan Gunung Talang	Cengkeh, Durian,Alpoket,P etai
		Sungai Janiah	Jorong Talago dadok Nagari Sungai Janiah Kecamatan Gunung Talang	Pinus,Cengkeh
		Sinar Mas	Jorong Linjung Koto Tingi Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang	Cengkeh
9	Tanah Datar	Hutan Lestari	Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas	Gaharu
		Kaffah	Jorong Balerong Bunta Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab	Gaharu
10	Limapuluh Kota	Suko Maju	Jorong Sungai Lambai Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau	Aren,Kenmiri, Gambir
		Saraso	Jorong Tiga Alur Nagari Batu Balang Kecamatan Harau	Jamur Tiram

➤ Pelatihan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan tahun 2016 diselenggarakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu pada tanggal 18 s/d 19 April 2016 di Balai Besar Pendidikan dan

Pelatihan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan pemateri sebanyak 11 nara sumber yang berasal dari Dinas Kehutanan.

Peserta pelatihan adalah Kelompok Tani Hutan yang berada di Lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Nagari (HD) dan Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai Kelompok Tani Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) di Provinsi Sumatera Barat.

6) Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

- Capaian Program : Terwujudnya pengembangan hasil hutan alam, hutan tanaman dan HHBK (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 99.838.000,-
: Penundaan, Rp. 90.738.000,-
- Output : Tersedianya rencana areal pengembangan areal hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL Bukit Barisan
- Outcome : Terkelolanya KPHL Bukit Barisan (2 lokasi)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 82.344.750,- berdasarkan :
DPPA, : 82,48%
Penundaan : 90,75 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Wilayah tertentu seluas ±52,645.93 ha akan dimanfaatkan sedemikian rupa. Akan tetapi, wilayah tertentu yang berada dalam blok inti tidak akan dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di KPHL Bukit Barisan pada dasarnya adalah melakukan pembangunan pada kawasan hutan baik pada hutan lindung maupun hutan produksi yang memiliki tutupan lahan terbuka, belukar tua, belukar muda atau alang-alang/padang rumput atau lahan yang termasuk dalam kriteria Lahan Kritis (sangat kritis, kritis dan agak kritis).

Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu tersebut sebagian besar dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Pemilihan jenis usaha dan jenis produk (sesuai dengan kegiatannya) perlu disepakati bersama terlebih dahulu dengan masyarakat. Namun terdapat beberapa rencana pemanfaatan pada wilayah tertentu yang bersifat top down (inisiatif oleh KPHL

Bukit Barisan).

Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan secara umum merupakan pendukung dari kegiatan Rehabilitasi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan dalam bentuk perjalanan dinas dengan Sub Kegiatan Penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah

Penanaman Rotan seluas 30 Ha telah dilaksanakan di Jorong Mudiak Aia, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksana fisik kegiatan adalah Kelompok Kerja Bukik Garuda yang beranggotakan 30 anggota. Pelaksanaan dilaksanakan di Hutan Lindung dengan Komoditi Rotan Jernang, prosedur penanaman diatur dalam Rancangan Teknis Penanaman Rotan.

Pelaksanaan Penanaman Rotan dan Pembangunan Bank buah di dukung melalui perjalanan dinas Orientasi Pengembangan budidaya rotan, kordinasi dan orientasi pengembangan budidayarotan, pengukuran lokasi pengembangan budidaya rotan, pemasangan pal batas, bimbingan teknis.

7) Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

- Capaian Program : Terwujudnya pengembangan industri hasil hutan, hutan alam, hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 43.533.500,-
: Penundaan, Rp. 41.402.500,-
- Output : Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya /terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah kelola KPHL bukit barisan (2 lokasi)
- Outcome : Terkelolanya KPHL Bukit Barisan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 40.152.500,- berdasarkan :
DPPA, : 92,23%
Penundaan : 96,98%
- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan senilai Rp. 43.533.500,- dirinci dalam 5 (lima) rekening belanja.

 - Belanja Bahan Pakai Habis, Rp. 1.748.500,-
 - Belanja Cetak dan Penggandaan, Rp. 375.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman, Rp. 2.750.000,-
 - Belanja Perjalanan Dinas, Rp. 34.340.000,-

- Belanja Honorarium Non PNS, Rp. 4.320.000,-

Realisasi fisik dan keuangan per belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis, Realisasi fisik sebesar 99,08 % dan keuangan senilai Rp. 1.732.500,- (99,08%).
- Belanja Cetak dan Penggandaan, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 300.000,- (80,00%).
- Belanja Makanan dan Minuman, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 2.750.000,- (100%).
- Belanja Perjalanan Dinas, Realisasi fisik sebesar 93,48 % dan keuangan senilai Rp. 31.050.000,- (90,42%).
- Belanja Honorarium Non PNS, Realisasi fisik sebesar 100,00 % dan keuangan senilai Rp. 4.320.000,- (100%).

Output terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- Laporan pelaksanaan identifikasi potensi wisata alam di 2 (dua) lokasi yaitu Potensi Wisata Alam Air Terjun di Desa Rantih Kota Sawahlunto dan Potensi Wisata Alam Ngalau di Nagari Pangian Kab. Tanah Datar.
- Laporan pelaksanaan inventarisasi potensi wisata alam di 3 (tiga) kabupaten yaitu Potensi Wisata Alam Kabupaten Padang Pariaman, Potensi Wisata Alam Kabupaten Pesisir Selatan dan Potensi Wisata Alam Kota Sawahlunto .
- Laporan pelaksanaan sosialisasi pengembangan wisata alam di 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Rantih Kota Sawahlunto dan di Nagari Pangian Kab. Tanah Datar dan pelaksanaan pembentukan/penguatan kelompok kepariwisataan alam di 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Rantih Kota Sawahlunto dan di Nagari Pangian Kab. Tanah Datar.

Outcome (manfaat) terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai adalah diketahuinya sebaran jenis potensi wisata alam kawasan hutan KPHL Bukit Barisan serta termanfaatkan/terkelolanya lokasi-lokasi objek wisata alam wilayah KPHL Bukit Barisan dengan baik berazaskan kelestarian lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan.

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang terdiri dari:

1) Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 288.376.000,-
: Penundaan, Rp. 270.896.000,-

- Output : Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas (200.000 batang)
- Outcome : Penurunan luas lahan kritis (0,18)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 264.948.100,- berdasarkan :
DPPA, : 91,88%
Penundaan : 97,80%

- Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun kegiatan pokok dalam Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan tersebut, adalah :

1. Kegiatan Pembuatan Bibit di lokasi Persemaian sebanyak 200.000 batang bibit;
2. Kegiatan Pengembangan Sumber Benih Tanaman Hutan (Identifikasi dan Deskripsi Calon Lokasi Sumber Benih Baru 3 (tiga) lokasi dan Perpanjangan 2 (dua) lokasi, Pembinaan Teknis Sumber Benih Bersertifikat 5 (lima) lokasi, Ground Chek Sumber Benih (yang sudah diidentifikasi sebelumnya) untuk menerbitkan Sertifikat 2 (dua) lokasi;
3. Menghadiri Undangan Seminar/Workshop
4. Pembelian alat pengunduhan (galah dan tangga), Pemecah cangkang (1 unit) dan GPS (1 unit)

Realisasi fisik Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan adalah :

1. Tersedia bibit 200.000 batang, dan terdistribusinya bibit sampai akhir bulan Desember 2016;
2. Tersedianya Data hasil Kelayakan Calon Lokasi Sumber Benih 3 (tiga) lokasi yaitu jenis Gaharu di Kabupaten Agam dan jenis Bayur di Kabupaten Padang Pariaman dan jenis Surian di Kabupaten Solok Selatan. Dan Perpanjangan 2 (dua) lokasi yaitu jenis Pinus di kabupaten Solok dan Surian di Kabupaten Solok
3. Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Benih Bersertifikat sebanyak 5 (lima) lokasi.
4. Sertifikat Sumber Benih 4 (empat) lokasi yaitu jenis Gaharu di Kabupaten Agam dan jenis Bayur di Kabupaten Padang Pariaman. Dan perpanjangan sertifikat jenis Pinus di kabupaten Solok dan Surian di Kabupaten Solok
5. Memenuhi undangan Workshop Kultur Jaringan di Bogor
6. Tersedianya alat pengunduhan (2 galah + 2 tangga + 2 Jaring), 1 Alat pemecah cangkang dan 1 unit GPS

2) Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.

- Capaian Program : Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 125.000.000,-
: Penundaan, Rp. 102.957.500,-
- Output : Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman (13 kab)
- Outcome : Penurunan luas lahan kritis (0,18%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 96.282.500,- berdasarkan :
DPPA, : 77,03%
Penundaan : 93,52%

- Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun kegiatan pokok dalam Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan tersebut, antara lain :

- Pengembangan informasi Perbenihan Tanaman Hutan dalam bentuk pencetakan Leaflet, data base perbenihan tanaman hutan;
- Monitoring Produksi dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan di kabupaten/Kota pada Pengada/pengedar benih/bibit terdaftar dan pengelola sumber benih bersertifikat sebanyak 27 lokasi;
- Pemberian Rekomendasi kepada Pengada/Pengedar bibit tanaman hutan, sebanyak 4 lokasi/PPBTH, selanjutnya ada tambahan pemberian rekomendasi pada 2 lokasi yang dananya ditanggung dan ditanggulangi langsung oleh Pemohon;
- Melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu benih/bibit tanaman hutan di kabupaten/Kota pada Pengada/pengedar benih/bibit terdaftar pada 3 lokasi/PPBTH, selanjutnya ada tambahan 2 lokasi yang dananya ditanggung dan ditanggulangi langsung oleh Pemohon

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dalam tahun 2016 berdasarkan DPA Perubahan/hasil pengurangan anggaran pelaksanaan kegiatan oleh Seksi Informasi dan Peredaran Benih, maka telah direalisasikan keuangan sebesar Rp. 97.728.180,- atau 94,92 % dari rencana keuangan sebesar Rp.102.957.500,- dengan realisasi fisik 100 %. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp.5.229.320,- atau 5,08 % yang telah dikembalikan ke kas Negara.

Terdapatnya sisa anggaran tersebut disebabkan adanya penghematan dalam biaya BBM dan penginapan (riil cost) serta uang harian karena menghadiri undangan yang merupakan sisa mati kegiatan, namun secara keseluruhan fisik kegiatan telah terealisasi sebagaimana diharapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran dalam tahun 2016, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain :

1. Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang pelaksanaan anggaran, yang dilampiri juga dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2016;
2. Adanya pengurangan anggaran pada DPA perubahan tahun 2016, antara lain :
 - a. Pengurangan belanja kegiatan perjalanan, BBM dan biaya penginapan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Standar biaya untuk uang harian dan uang penginapan mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013;
3. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2016, telah dibuat petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis kegiatan sebanyak 3 (tiga) buah yaitu :
 - a. Monitoring Produksi dan Peredaran bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota (Pengada/pengedar, sumber benih bersertifikat dan IUPHHK-HT);
 - b. Penilaian Lapangan permohonan Rekomendasi Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan;
 - c. Sertifikasi Mutu Bibit tanaman Hutan;
4. Selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2016, khusus untuk perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran kegiatan pada DPA Perubahan;
5. Penerbitan surat perintah tugas oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Monitoring Produksi dan peredaran bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota sebanyak 16 kali;
 - b. Penilaian lapangan Permohonan Rekomendasi Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, sebanyak 6 kali;
 - c. Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan di Kabupaten/Kota sebanyak 5 kali.

Secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan 100 % dengan realisasi keuangan yang terserap sebesar Rp. 97.728.180,- atau 94,92 % dari rencana keuangan sebesar Rp.102.957.500,- dengan realisasi fisik 100 %. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp.5.229.320,- atau 5,08 %.

Tidak tercapainya/terserapnya anggaran sebagaimana yang direncanakan disebabkan oleh adanya sisa anggaran dalam beberapa item belanja (penghematan biaya penginapan, BBM dan uang harian karena menghadiri undangan), yang merupakan sisa mati.

Realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016 pada seksi Informasi dan Peredaran Benih, baik berupa hasil dari pelaksanaan program maupun kegiatan pelayanan yang telah diberikan antara lain :

- Hasil Pencetakan dan Pembuatan Informasi Perbenihan Tanaman Hutan, berupa :
 - Pembuatan Leaflet Perbenihan Tanaman Hutan, sebanyak 10 Materi masing-masing 500 lembar sehingga berjumlah 5.000 lembar,
 - Pembuatan Data Base Perbenihan Tanaman Hutan tahun 2016, dengan jumlah 100 buku;
- Monitoring Produksi dan Peredaran Bibit Tanaman Hutan di Kabupaten/kota.
 - Dilaksanakan terhadap 13 kabupaten/kota se Sumatera Barat;
 - Pembinaan dan Monitoring pada 30 pengada/pengedar bibit tanaman hutan baik yang telah terdaftar dan sumber benih bersertifikat;
 - Hasil kegiatan diketahui bahwa jumlah produksi bibit tahun 2016 di pengada/pengedar adalah sebanyak 2.249.620 batang;
- Penilaian Lapangan Permohonan Rekomendasi Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
 - Anggaran telah dialokasikan untuk 4 (empat) pemohon rekomendasi;
 - Selama Tahun 2016, terdapat 6 pemohon yang mengajukan rekomendasi, sebagaimana surat yang diterima antara lain atas nama :
 - CV.Riyanti Berjaya di Kabupaten Solok;
 - CV.Gunung Mas Jaya di Kabupaten Solok;
 - CV.Jabon Mandiri Sejahtera di Kota Sawahlunto;
 - CV.Bintangur di Kabupaten Solok;
 - CV.Andalas Jaya Persada di Kota Padang;
 - CV.Warna Khara di Kota Padang;

Jadi berdasarkan data yang ada, terdapat 2 permohonan rekomendasi yang *dananya tidak tersedia/sudah habis* dalam DPA-SKPD, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, biaya penilaian lapangan ditanggung dan ditanggulangi langsung oleh pemohon (An. CV.Andalas Jaya Persada dan CV.Warna Khara) di Kota Padang.
- Terhadap ke 6 pemohon dari pengada/pengedar bibit tanaman hutan, telah diterbitkan 6 (enam) Izin Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Terdaftar oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.
- Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan.
 - Anggaran telah dialokasikan untuk 3 (tiga) pemohon sertifikasi.

- Selama Tahun 2016, terdapat 5 pemohon yang mengajukan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan (3 dari dana DPA-SKPD dan karena dana sudah habis/tidak tersedia dalam DPA sehingga 2 permohonan ditanggung dan ditanggulangi langsung oleh Pemohon), sebagaimana surat permohonan yang diterima antara lain atas nama :
 - CV. Warna Khara di Kota Padang (jenis Jabon Merah);
 - CV. Warna Khara di Kota Padang (jenis Mahoni);
 - CV. Bintangur di Kabupaten Solok (jenis Mahoni);
 - CV. Riyanti Berjaya di Kabupaten Solok (jenis Bayur);
 - CV. Bibit Tanaman Gaharu di Kabupaten Sijunjung (jenis Gaharu).
 - Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel terlampir.
 - Dari 5 pemohon tersebut di atas, hanya 3 pemohon (sesuai alokasi dana yang tersedia) yang dilakukan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan pengada/pengedar bibit terdaftar, yaitu :
 1. CV. Bintangur di Kabupaten Solok (jenis Mahoni);
 2. CV. Riyanti Berjaya di Kabupaten Solok (jenis Bayur);
 3. CV. Bibit Tanaman Gaharu di Kabupaten Sijunjung (jenis Gaharu).
 sedangkan sisanya 2 pemohon lagi berdasarkan keinginan dari pemohon ditanggung dan ditanggulangi langsung oleh Pemohon, yaitu :
 - CV. Warna Khara di Kota Padang (jenis Jabon Merah);
 - CV. Warna Khara di Kota Padang (jenis Mahoni).
- Kegiatan pengadaan/pencetakan dengan pihak pengada barang dan jasa antara lain :
- a. Pekerjaan Pengadaan Cetak Leaflet perbenihan tanaman hutan sebanyak 5.000 lembar sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 67/SPK/DPA-SKPD/UPTD-2016 tanggal 23 Agustus 2016 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV.Ayen Pratiwi, dengan nilai kontrak Rp.24.000.000,-
 - b. Pekerjaan Pengadaan Cetak Data Base perbenihan tanaman hutan tahun sebanyak 100 buku sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 75/SPK/DPA-SKPD/UPTD/2016 tanggal 5 Desember 2016 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV.Ayen Pratiwi, dengan nilai kontrak Rp.9.700.000,-

3) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik.

- Capaian : Meningkatnya Daya Dukung Hutan dalam Peningkatan Fungsi Program Ekologi (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 100.000.000,-

: Penundaan, Rp. 54.503.140,-

- Output : Terpeliharanya dan teridentifikasinya sumber daya genetik tanaman hutan (4 lokasi)
- Outcome : Penurunan Luas Lahan Kritis (0,18%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 53.690.050,- berdasarkan :
DPPA, : 53,69%
Penundaan : 98,51 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik adalah :

- Kegiatan Pemeliharaan tahun kedua sumber daya genetik tanaman hutan jabon , target seluas 5 hektar.
- Monitoring pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tahun kedua sumber daya genetik tanaman hutan jabon , seluas 5 hektar yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksana SPKS yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Dharmasraya. Monitoring ini dilaksanakan sebanyak 5 kali.
- Kegiatan identifikasi calon lokasi areal konservasi sumber daya genetik pada kabupaten/ kota melalui perjalanan dinas, berdasarkan usulan dari kabupaten/ kota, target tiga kabupaten/ kota.
- Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Areal Sumber Daya Genetik dan Plasma Nutfah yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu, dalam hal ini IUPHHK, target empat pemegang izin IUPHHK
- Kegiatan Menghadiri Undangan Kementerian Kehutanan dan Jajarannya , target sebanyak tiga kali.
- Kegiatan Penunjang adalah :
 - Pembelian Bahan Bakar minyak, diperuntukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah (daratan) dengan memakai kendaraan dinas.
 - Pembelian tiket kapal dan sewa boat yang dipergunakan dalam melakukan monitoring pelaksanaan areal sumber daya genetik dan plasma nutfah pada IUPHHK di Kepulauan Mentawai.
 - Belanja cetak dan penggandaan untuk menunjang administrasi kegiatan.

Sisa dana kegiatan yang tidak dibelanjakan karena adanya penghematan sebesar 1.49% dengan nominal rupiah Rp.813.000,-.

b. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, yang terdiri dari kegiatan:

1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan kehutanan.

- Capaian : Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehutanan Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 76.352.450,-
: Penundaan, Rp. 60.788.450,-
- Output : Terlaksananya murenbanghutda, rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota (19 kab/kota /1 Laporan)
- Outcome : Meningkatnya Sinergisitas Perencanaan Kehutanan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 60.745.050,- berdasarkan :
DPPA, : 79,56%
Penundaan : 99,93 %
- Pelaksanaan Kegiatan :
 - Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/272/Sekr-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - Sisa dari Dana Keuangan, adalah sisa mati Rp 43.400,- merupakan sisa mati perjalanan dinas
 - Realisasi fisik kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Tahun 2016 sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke kab/kota yang dilaksanakan oleh 19 Tim yaitu :
 - ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Solok Selatan
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/346/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Purnama, Bac, Sasri Anita, SS dan Setiawan, SP
 - Hasil Pelaksanaan :
 - ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Solok
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/361/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Februari 2016

- Personil Pelaksana Afrial Muhammad, SPT, MSi, Nurmalis dan Ernawita
- Hasil Pelaksanaan :
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Padang Pariaman
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/360/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Boy Martin, SH, MSi, Utami Sri Rejeki dan Farida

- Hasil Pelaksanaan :
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Tanah Datar
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/343/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 24 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Fazlul Taufik, ST, Meng, Ita Rahmawati, S.Hut, MM dan Iza Eka Putri
- Hasil Pelaksanaan :
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kota Bukit Tinggi
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/360/Sekr-2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 18 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Liza Eka Putri dan Yusarmen
- Hasil Pelaksanaan :
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Agam
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/360/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Liza Eka Putri dan Yusarmen
- Hasil Pelaksanaan :

- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Dharmasraya
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/359/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 26 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Purnama, Bac, Delfini dan Okta Febrian
 - Hasil Pelaksanaan :

- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kota Padang Panjang
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/338a/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 19 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Yofi Yori, SE, MSi, Waluyo, S.Sos dan Edi, S.Sos
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Sijunjung
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/337a/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 19 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Ita Rahmawati, S.Hut, MM dan Mardiyos
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kota Padang
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/363/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Jusmalinda, S.Hut, MSi, Liza Eka Putri dan Setiawan, SP
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kota Sawahlunto
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/334a/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 18 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Yofi Yori, SE, MSi, Waluyo, S.sos dan Budiman, Amd .
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Pesisir Selatan

- Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/339a/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 19 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Era Sulastri, S.Hut, MSi dan Yusarmen
 - Hasil Pelaksanaan :
- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Pasaman
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/357/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Joni Halyan SH, MH, Waluyo, S.sos dan Ita Rahmawati, S.Hut, MM
 - ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/342/Sekr-2016 tanggal 19 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 24 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Waluyo, S.sos dan Yusarmen
 - ❖ Sewaktu Tim ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, belum membuat usulan Program Kegiatan untuk tahun 2017
 - ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kota Payakumbuh
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/333a/Sekr-2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 18 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Suyatno, BSc, Melly fitri, Bac dan Ita Rahmawati, S.Hut, MM
 - ✚ Kegiatan Pengembangan Hasil Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan dengan pagu dana Rp 50.000.000,-
 - ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kota Pariaman
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/358/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Joni Halyan, SH.MH, Melly Fitri, Bac dan Sasri Anita, SS

- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Pasaman Barat
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/362/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 24 Februari 2016
 - Personil Pelaksana hendra Bakti, Jaafar dan Sasri Anita, SS

- ✓ Pengumpulan data perencanaan pembangunan kehutanan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Dasar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/358/Sekr-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - Waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Februari 2016
 - Personil Pelaksana Kusworo, SP, MSi, Melly Fitri, Bac dan Sasri Anita,SS

- ✓ Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan (Musrenbanghut)
 - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Daerah (Musrenbanghutda). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronkan rencana pembangunan kehutanan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tahun 2016 kegiatan musrebanhut agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kegiatan Musrenbang digabung dengan kegiatan sosialisasi P3D.
 - Secara khusus, Penyusunan rencana pambangunan kehutanan Tahun 2017 sudah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan mensinkronkannya dengan program kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- ✓ Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya sinergisitas penyusunan perencanaan pembangunan kehutanan Tahun 2017 antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

- ✓ Kegiatan Sosialisasi Pengalihan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi dalam Rangka Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan pada Tanggal : S22 Maret 2016 pukul 08.00 – 16.00 WIB di Ibis Hotel, Jl. Taman Siswa No. 1A Padang

- ✓ Metode yang akan digunakan adalah: 1) Presentasi dari para narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi, dan 2) Pembacaan konklusi dan poin-poin penting Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dalam rangka Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014
- ✓ Partisipan yang mengikuti kegiatan ini adalah:
 - UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Barat
 - Instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :
 - Instansi pengelola Kehutanan di Kabupaten/Kota :
 - Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengalihan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi dalam Rangka Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini dengan tema masing-masing
 - Moderator kegiatan ini adalah: **Faridil Afrasy, S.Hut, MM dan Yonefis, SH. MM**
- ✓ Rumusan Musenbanghut Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - Pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2016, Tim Perumus Musyawarah Perencanaan **Pembangunan** Kehutanan Provinsi (MUSRENBANGHUT) Sumatera Barat Tahun 2016, mempedomani;
 - Enam Kebijakan Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yakni :
 - Mempercepat kepastian kawasan hutan, menyampaikan data dan informasi potensi kawasan hutan dan memantau penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.
 - Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim.
 - Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
 - Peningkatan perencanaan dan pengelolaan hutan kemitraan.
 - Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk pembangunan kehutanan.
 - Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 untuk sektor kehutanan terdapat pada Prioritas "Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup".
 - Delapan Program pembangunan kehutanan periode 2016 – 2020.
 - ✓ Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan dilaksanakan dilaksanakan 1 kali yaitu dalam rangka menghadiri workshop penataan kelembagaan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016. Kegiatan ini dihadiri

oleh Jusmalinda, S.Hut, MSi dan Ita Rahmawati. S.Hut, MM. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah :

- ✓ Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 didasarkan pada Permendagri Nomor Tahun 18 Tahun 2016.
- ✓ Pokok pengaturannya, antara lain"
 - Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 mendasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sebagaimana lampiran UU No 23 Tahun 2014.
 - Tahapan penyelesaian dokumen RKPD tahun 2017 harus sudah diselesaikan pada bulan Mei 2016.
 - RKPD yang telah disusun perlu disinkronkan dengan perangkat daerah.
- ✓ Dasar Kebijakan Anggaran Daerah 2017 adalah Permendagri No 31 Tahun 2016.
- ✓ Penyusunan KUA-PPA Tahun 2017 ditetapkan paling lambat akhir Agustus 2016.
- ✓ Penetapan KUA-PPA didasarkan pada OPD yang melaksanakan Anggaran Tahun 2017.
- ✓ APBD Tahun 2017 ditetapkan bulan Desember 2016 dengan memperhatikan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah
- ✓ PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diundangkan pada 19 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- ✓ Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan setelah PP diundangkan (19 Desember 2016)
- ✓ Dalam Penetapan OPD harus mendasarkan pada hasil pemetaan intensitas dan beban kerja yang telah dilaksanakan oleh Daerah dan Kementerian serta difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang hasil kesepakatannya diwujudkan dalam bentuk Berita Acara hasil Validasi Pemetaan urusan pemerintahan daerah.
- ✓ Hasil pemetaan tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan Tipologi perangkat daerah.
- ✓ Sinergitas PP 18 Tahun 2016 dengan Kebijakan Perencanaan, anggaran dan pengalihan P3D, pada prinsipnya dapat diwujudkan dengan memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:
- ✓ Pembentukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan dipercepat sebelum penetapan KUA PPA.
- ✓ Penyusunan KUA PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD

- ✓ SKPD harus secara aktif melakukan koordinasi dengan unsur penunjang Organisasi, perencanaan dan anggaran, kepegawaian dan aset untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi di bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan
- ✓ Dokumen Rencana Pembangunan Daerah disesuaikan dengan Perda SOTK

Output dan Outcome yang terukur

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan.

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA, RENJA Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebanyak 5 Dokumen

Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti RKA 2017 yang disusun oleh dinas kehutanan mengacu kepada Renja dan Renstra yang telah disusun. Sehingga kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diukur setiap tahun sesuai formula yang telah ditetapkan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya musrenbanghutda pada tanggal 22 Maret 2016 dan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya sinergisitas perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota sebesar 100%. Hal ini berarti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kota dan pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HTR dan HR Kemitraan.

- Capaian : Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Program Masyarakat (50.000 Ha)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 93.548.000,-
- Output : Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR kemitraan (60 orang)
- Outcome : Meningkatkan jumlah kelompok PHBM di Sumatera Barat (10 kelompok)

- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 91.236.000,- (97,53%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan yang dilakukan terhadap 60 orang peserta pengelola HKm dan HN yang meliputi : LPHN Koto Baru 4 orang, LPHN Pakan Rabaa 2 orang, LPHN Pasir Talang Timur 2 orang, LPHN Pulakek Koto Baru 2 Orang, LPHN Padang Limau Sundai 2 orang, LPHN Ranah Pantai Cermin 2 orang (Solse), LPHN Aia Aangek 2 Orang (Sijunjung), HKm Pangduhu Maju 2 orang, (Pasaman) HKm Bukit Lestari 2 orang, HKm Gunung Leco 2 orang, (Pasbar) LPHN Lubuk Tarantang 2 Orang (Sijunjung), HKm Leter W 2 orang (Pdg Pariaman), HKm Indudur 2 Orang (Solok), LPHN Mangganti 2 orang, HKm Pasir Putih Silokek 2 orang, HKm Tanjung Labuah 2 orang (Sijunjung), LPHN Air Bangih 2 Orang(Pasbar), LPHN Sarik Alahan Tigo 2 orang, LPHN Sungai Abu 2 orang (Solok), HKm Tombang Pinang 2 orang, HKm Maju Bersama 2 orang (Pasaman), HKm Aur Serumpun 2 orang, HKm Sialangan G. Padang Alai 2 orang (Pdg Pariman), LPHN Katiagan 2 orang (Pasbar), LPHN muaro Takung 2 orang, LPHN Sungai Betung 2 orang (Sijunjung), HKm rap Hita Saiyo 2 orang, HKm Beringin sakti 2 orang, HKm Harapan Baru 2 orang, Hkm Saiyo 2 orang(pasaman).

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan.

- Capaian : Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Program Masyarakat (50.000 Ha)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 173.440.000,-
: Penundaan, Rp. 83.397.500,-
- Output : Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR kemitraan) 17 Kelompok
- Outcome : Peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang mengelola kawasan hutan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 78.339.500,- berdasarkan :
DPPA, : 45,17%
Penundaan : 93,94 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

laporan terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat (Perhutanan Sosial) di 3 lokasi meliputi Desa Tanjung Labuh Kota Sawahlunto, Nagari Ampek koto Silungkang dan Kamang Hilir di Kabupaten Agam.

Laporan terlaksananya Bimbingan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di 12 lokasi yang meliputi Nagari Lubuk Alung (Pdg Pariaman), Nagari Lubuk Tarantang, Nagari Paru (Sijunjung), Nagari Sirukam, Nagari Sariak Alahan Tigo, Nagari Indudur (Solok), Nagari Pakan Rabaa, Nagari Alam Pauh Duo, Nagari Pasir Talang Timur (Solok Selatan), Nagari Lansek kodok, Nagari Simpang Tonang, dan Nagari Cubadak (Pasaman).

Laporan terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Perhutanan Sosial) di 5 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Solok.

4) Kegiatan Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat

- Capaian : Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (50.000 Ha)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 49.480.000,-
: Penundaan, Rp. 46.370.600,-
- Output : Terjalannya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR, dan HR kemitraan) 60 orang
- Outcome : Meningkatnya jumlah kelompok PHBM di Sumbar (10 kelompok)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 45.920.600,- berdasarkan :
DPPA, : 92,81%
Penundaan : 99,03 %
- Pelaksanaan Kegiatan :
Laporan terlaksananya fasilitasi forum rembuk (musyawarah) para Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh 65 orang yang meliputi perwakilan lembaga/kelompok pengelola hutan berbasis masyarakat (perhutanan sosial) dan instansi terkait yang meliputi: Dishut Prov Sumbar 5 orang, dishutbun Solok Selatan 3 orang, KKI warsi 1 orang, LPHN Sirukam 2 orang, Hkm Indudur 1 orang, HKm Ingin Makmur 1 orang, LPHN Koto Baru 3 orang, LPHN Pasir Talang Timur 2 orang, LPHN Pakan Rabaa 5 orang, HKm Padang Alai 1 orang, HKm Famili Sakato 2 orang, HKm Aur Serumpun 3 orang, HKm Leter W 1 orang, LPHN sei Buluh 1 orang, LPHN Ranah Pantai Cermin 1 orang, LPHN Simanau 1 orang, HKm Sikayan balumuik 2, LPHN Simancung 2 orang, Hkm Lurah basung 3 orang, Hkm Karya Setia 1 orang, HKm Pangduhu maju 2 orang, Hkm Patamuan 2 orang, Hkm Tombang Pinang 1 orang, LPHN Manganti 1 orang, Hkm sungai Tuo 1orang, Hkm Silokek 2 orang, Hkm Aia angk 1, Hkm Bukit lestari 1 orang, Hkm beringin sakti 1 orang, LPHN Sei Abu 1 orang, LPHN muaro takung 1orang, LPHN sarik alahan

tigo 1 orang, Lphn Air bangis 1 orang, HKm Harapan baru 1 orang, LPHN Sungai Betung 1 orang dan HKm Saiyo 1 orang.

Terbangunnya kesepahaman dalam penyusunan AD ART forum Komunikasi PHBMN Sumbar dan tukar menukar pengalaman dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.

5) Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Mangrove daerah

- Capaian : Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Program Masyarakat (50.000 Ha)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 50.000.000,-
: Penundaan, Rp. 17.270.000,-
- Output : Terlaksananya pengumpulan data, koordinasi dan monitoring KKMD (1 laporan)
- Outcome : Meningkatnya jumlah kelompok PHBM di Sumbar (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 15.705.250,- berdasarkan :
DPPA, : 31,41%
Penundaan : 90,94 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah telah dilakukan revisi/Perubahan sehingga tahapan dan rangkaian kegiatan yang direncanakan mengalami perubahan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Monev perkembangan mangrove yang dilakukan pada Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang, dan Kabupaten Agam.

Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah tahun 2016 ini bersumber dari DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai setelah perubahan Rp 50.000.000,- dan telah dialokasikan untuk penghematan sebesar Rp.34.294.750,- sehingga anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.715.250,- Realisasi fisik mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.705.250,- Sisa anggaran sebesar 10.000,- Persentase 99.99 % sesuai dengan perincian sebagai berikut pada tabel dibawah.

c. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, yang terdiri dari :

1) Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

- Capaian Program : Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 184.856.500,-
- Output : Terpeliharanya batas kawasan hutan (70 km)
- Outcome : Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 181.470.400,- (98,17%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Sisa anggaran sebesar Rp. 3.3856.100,- merupakan sisa anggaran mati yang berasal dari belanja tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah, personal use, penginapan dan belanja penggandaan.

Sisa anggaran sebesar Rp. 275.000,- merupakan sisa anggaran mati yang berasal dari belanja penginapan dan belanja penggandaan.

Output (keluaran) dari kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah terpeliharanya batas kawasan hutan sepanjang ± 70 Km (Kabupaten Agam ± 20 km, Kabupaten Pasaman ± 20 km dan Kabupaten Sijunjung ± 30 km).

Outcome (hasil) dari kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2016 ini adalah bahwa untuk memastikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, maka tanda batas kawasan hutan yang telah ditata batas perlu dipastikan selalu dalam keadaan baik dan jelas di lapangan. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2016 dilakukan pada hasil tata batas kawasan hutan definitif Tahun 1992/1993 dan 1996/1997 di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Sijunjung. Sejak dilakukan pemeliharaan batas kawasan hutan pada Tahun 2011, secara akumulatif panjang kawasan hutan yang telah dipelihara sampai dengan Tahun 2016 adalah sepanjang 400 km dari total panjang batas kawasan hutan yang telah ditata batas sepanjang 4.895,30 km. Hasil pemeliharaan batas kawasan tersebut memberikan sumbangan dalam upaya pencapaian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya sebesar 100%.

2) Kegiatan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

- Capaian Program : Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya (20%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 41.307.050,-
- Output : Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu (2 lokasi)

- Outcome : Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 41.032.050,- (99,33%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Sisa anggaran sebesar Rp. 275.000,- merupakan sisa anggaran mati yang berasal dari belanja penginapan dan belanja penggandaan.

Output (keluaran) dari kegiatan Inventarisasi Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu pada 2 lokasi kawasan hutan di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Outcome (hasil) dari kegiatan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2016 ini adalah bahwa data potensi hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan hutan (kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi) yang diinventarisir seperti : getah jernang, kemenyan, rotan dan sebagainya dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang bernilai komersial. Dengan demikian, maka kegiatan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu memberikan sumbangan dalam upaya pencapaian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya sebesar 100%..

3) Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

- Capaian : Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan Program sesuai dengan peruntukannya (20 %)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 146.199.000,-
- Output : Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya (13 Kabupaten/Kota)
- Outcome : Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya (100 %)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 129.855.150,- (88,82%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Sisa anggaran kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 16.703.850,- merupakan sisa anggaran mati yang berasal dari belanja penginapan, belanja penggandaan, dan perjalanan dinas dalam dan ke luar daerah.

Kegiatan ini sesuai dengan target kinerja keluaran pada DPA-SKPD yang dilaksanakan pada 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto.

Keluaran dari kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan adalah laporan penggunaan kawasan hutan pada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto. Beberapa Kota yang terdapat kawasan hutan seperti Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok juga menjadi sasaran kegiatan ini yang dalam pelaksanaannya digabung dengan Kabupaten yang terdekat. Hasil kegiatan disajikan dalam bentuk laporan yang dilampiri dengan dokumentasi kegiatan dan peta hasil kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.

Output (keluaran) dari kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya pada 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, telah terpantau dan termonitor penggunaan kawasan pada 12 Kabupaten dan 5 Kota di Sumatera Barat yang wilayahnya mempunyai kawasan hutan.

Telah terpantau dan termonitor 17 izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta yang diterbitkan oleh Kepala BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur, selebihnya dalam proses perizinan dan belum memiliki izin penggunaan kawasan hutan. Izin-izin pinjam pakai tersebut berdasarkan hasil monitoring telah sesuai dengan peruntukannya, namun beberapa IPPKH belum memenuhi kewajiban pinjam pakai kawasan hutan secara keseluruhan.

Outcome (Hasil) dari kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah Unit penggunaan kawasan hutan/IPPKH yang berjumlah 17 unit tersebut terpantau dan termonitor secara keseluruhan sesuai dengan perizinannya. Hal ini merupakan indikator tertib penggunaan kawasan hutan sebagai perwujudan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Dari kegiatan ini juga teridentifikasi penguasaan kawasan hutan untuk areal pertanian masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat diarahkan melalui mekanisme perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Nagari) sedangkan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan umum diarahkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 40.000.000,-
- Output : Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat-menyurat (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 39.984.000,- (99,96%)

- Pelaksanaan Kegiatan :
Realisasi pelaksanaan meliputi :
 - Realisasi belanja perangkat, materi dan benda pos sebanyak Rp. 8.040.000,-
 - Realisasi belanja BBM caraka sebanyak Rp. 9.984.000,-
 - Realisasi sewa kotak pos sebanyak Rp. 120.000,-
 - Realisasi Honorarium sopir kantor sebanyak Rp. 21.840.000,-
 - Sisa anggaran sebesar Rp. 16.000,- merupakan sisa mati pembelian BBM dengan kupon.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 325.600.000,-
: Penundaan, Rp. 211.140.000,-
- Output : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 199.177.281,- berdasarkan :
DPPA, : 61,17%
Penundaan : 94,33 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. Sisa anggaran sebesar Rp. 11.962.719,- merupakan sisa mati, karena seluruh pembayaran bulan Desember 2016 baru dapat dibayarkan di Januari 2017, sehingga menjadi hutang jangka pendek

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 1.100.000,
- Output : Tersedianya dana pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (1 Tahun)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 989.323,- (89,94%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 110.677,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai yang tertera dalam tagihan pembayaran PBB

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 210.517.275,-
- Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 210.445.000,- (99,97%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 72.275,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nilai yang ada dalam kontrak

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)

- Input : Dana : DPPA, Rp. 82.910.000,-
- Output : Terlaksananya penyediaan alat-alat tulis perkantoran (1 Tahun)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 82.910.000,- (100,00%)

6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 39.999.800,-
- Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (1 Tahun)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 39.999.000,- (100,00%)

7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 10.000.000,-
- Output : Terlaksananya penyediaan barang-barang komponen listrik/penerangan bangunan kantor (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 9.987.000,- (99,87%)

- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp. 13.000,- merupakan sisa mati.

8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi Program perkantoran (100%)

- Input : Dana : DPPA, Rp. 577.670.500,-
: Penundaan, Rp. 469.795.500,-
- Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (49 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100,00 %
Keuangan : Rp. 461.676.000,- berdasarkan :
DPPA, : 79,92 %
Penundaan : 98,27 %
- Pelaksanaan Kegiatan :
 - Sisa anggaran sebesar Rp. 8.119.500,- dikarenakan penghematan anggaran yaitu :
 - Sisa mati pembuatan spanduk
 - Terali besi sebesar , karena kantor UPTD BPTH pindah.
 - Sisa mati pengadaan dispenser
 - Sisa mati pengadaan alat laboratorium

9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 12.000.000,-
- Output : Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 10.958.000,- (91,32 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.042.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nota pembayaran tiap bulan

10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)

- Input : Dana : DPPA, Rp. 10.000.000,-
- Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 9.870.000,- (98,70 %)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 130.000,- merupakan sisa mati.

11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.

- Capaian : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 200.000.000,-
: Penundaan, Rp. 166.202.000,-
- Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 145.218.216,- berdasarkan :
DPPA, : 72,61 %
Penundaan : 87,37 %

- Pelaksanaan Kegiatan :

Sisa anggaran dari Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp. 20.943.784,- terdiri dari BBM sebesar Rp. 148.400,-. Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 1.816.980,- dan perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.978.404,-.

Sisa anggaran ini disebabkan perjalanan dinas keluar daerah terjadinya perubahan lokasi tujuan (sesuai undangan), yang semula direncanakan ke Jakarta akan tetapi ternyata tidak semua ke Jakarta sehingga terjadi penghematan.

Manfaat dari Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lancarnya pembiayaan dalam hal menghadiri rapat-rapat dan menyelesaikan berbagai keperluan terkait teknis kehutanan baik yang diadakan di Kabupaten dan Kota Dalam Daerah maupun Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat.

12) Kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor

- Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 25.152.725,-
- Output : Tersedianya Jasa Sopir Kantor (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 25.152.725,- (100,00 %)

13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

- Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 233.520.000,-
- Output : Tersedianya makan dan minum untuk piket senjata api dan pengamanan kantor (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 230.588.800,- (98,74%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.931.200,- merupakan sisa mati karena pada saat piket ada Polhut yang Dinas Luar sehingga tidak dibayarkan

14) Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

- Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 10.000.000,-
- Output : Tersedianya Jasa Dokumentasi dan Publikasi (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 7.950.000,- (79,50 %)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Liputan tidak habis dilaksanakan sebesar Rp. 2.050.000,- karena anggaran serupa sudah dianggarkan dalam pada Bidang dan APBN pada Bidang/BPDAS.

15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

- Capaian Program : Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 15.000.000,-
- Output : Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik aparatur: instruktur senam, pembacaan al quran, ustadz (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 14.000.000,- (93,33 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- merupakan sisa mati petugas pembaca Al-Qur'an

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari :

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 2.442.365.500,-
: Penundaan, Rp. 2.263.616.750,-
- Output : Terlaksananya Pembangunan gedung kantor UPTD, gudang persemaian, koridor, garase dan pos jaga, pagar (6 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 2.262.286.000,- berdasarkan :
DPPA, : 92,63%
Penundaan : 99,94%

2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 1.231.684.525,-
- Output : Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua (6 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %

Keuangan : Rp. 1.229.534.275,- (99,83%)

3) Kegiatan Pengadaan Meubelier.

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 121.588.500,-
- Output : Terlaksananya pengadaan mubeler (72 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 121.588.500,- (100,00 %)

4) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi.

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 246.715.200,-
- Output : Terlaksananya pengadaan komputer, laptop, scanner A0 (15 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 246.715.200,- (100,00 %)

5) Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 297.533.000,-
- Output : Terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi dan Informasi (10 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 297.533.000,- (100,00 %)

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

- Capaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)

- Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 191.909.700,-
 - Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas (6 unit)
 - Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
 - Realisasi : Fisik : 100 %
 - Keuangan : Rp. 191.909.700,- (100%)

7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Capaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 67.819.900,-
- Output : Terlaksananya Perbaikan sarana dan prasarana mushala, jendela dan atap gedung (3 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
- Keuangan : Rp. 67.819.900 ,- (100 %)

8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Capaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 196.510.000,-
- Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
- Keuangan : Rp. 142.699.381,- (72,62%)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 53.810.619,- merupakan sisa mati, terdiri dari jasa service, penggantian suku cadang, BBM, pelumas, Jasa KIR sebesar dan sisa pembayaran STNK (dibayarkan sesuai yang tertera di STNK) dan BBN yang tidak bisa dilaksanakankarena tidak cukup waktu, perubahan anggaran baru disyahkan bulan November 2016.

9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 22.600.000,-
- Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (AC, mesin tik, telepon, camera digital, dan sound system) (53 unit)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 19.550.000,- (86,50%)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.050.000,- merupakan sisa mati, terdiri dari :
 - Sisa pemeliharaan AC
 - Sisa pemeliharaan camera, handy cam dan GPS

10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 21.750.000 ,-
- Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi (komputer, faximile, laptop,printer dan infocus) 39 unit
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 19.850.000,- (91,26 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.900.000,- merupakan sisa mati.

11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan

- Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)

- Input : Dana : DPPA, Rp. 32.840.900,-
- Output : Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor (1 Tahun)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 32.781.000,- (99,82 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 59.900,- merupakan sisa mati.

12) Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

- Capaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 135.506.000 ,-
- Output : Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian asset (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 130.088.600,- (96,00 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.417.400,- merupakan sisa mati BBM sebesar, sisa mati foto copy dan penjilidan laporan, perjalanan dinas dalam daerah berupa sisa penginapan sebesar, sisa mati perjalanan dinas luar daerah berupa sisa tiket pesawat dan sisa mati honorarium Pengelola Keuangan/Asset Daerah daerah sebesar.

f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

- Capaian : Meningkatnya disiplin aparatur (100%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 83.160.000,-
: Penundaan, Rp. 82.852.000,-
- Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta Kelengkapannya (154 orang)
- Outcome : Terwujudnya pegawai yang tertib dan disiplin (100%)

- Realisasi : Fisik : 100 %
- Keuangan : Rp. 82.852.000,- berdasarkan :
- DPPA, : 99,63%
- Penundaan : 100,00 %

g. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- Capaian : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (100%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 178.178.000,-
- Output : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur (100%)
- Outcome : Terlaksananya keikutsertaan Aparatur dalam mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan, fungsional perencana (14 orang)
- Realisasi : Fisik : 100,00 %
- Keuangan : Rp. 158.881.150,- (89,17 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :
 - Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.296.850,- merupakan sisa mati.
 - Sisa anggaran sebesar Rp. 14.540.000,- sisa mati perjalanan dinas dalam daerah dikarenakan pelaksanaannya tergantung pada undangan pelaksana kegiatan.
 - Sisa anggaran sebesar Rp. 2.322.100,- berupa sisa pembelian tiket pesawat yang dibayarkan sesuai harga yang tercantum dalam tiket pesawat.

h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Capaian : Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 17.445.000,-
- Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Tahunan (5 Dokumen)
- Outcome : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %

Keuangan : Rp. 17.445.000,- 100,00 %)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Dengan adanya alokasi dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terjadi peningkatan kelancaran penyelenggaraan penatausahaan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan tahunan yang menjadi kewajiban SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

- Capaian : Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program (100%)
- Input : Dana : DPPA, Rp. 76.864.000,-
- Output : Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra (6 Dokumen)
- Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 39.394.000,- (51,25 %)

- Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/271/Sekr-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dana untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 76.864.000,-. Realisasi dana sebesar 39.294.000,- atau sekitar 1,25%

Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 37.470.000,- atau sebesar 48,75% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Seminar Kit sebesar Rp 1.500.000,-
- ✓ Spanduk sebesar Rp 600.000,-
- ✓ Belanja akomodasi peserta konsultasi publik Renstra (Fulllday Meeting) sebesar Rp 12.6000.000,-
- ✓ Transoportasi peserta konsultasi publik Renstra sebesar Rp 6.000.000,-
- ✓ Honor Narasumber sebesar Rp 7.800.000,-
- ✓ Belanja makan dan minum rapat sebesar 9.235.000,- Dana ini dialokasi untuk biaya rapat penyusunan Renstra dan penyusunan anggaran. Rapat tetap dilaksanakan beberapa kali dengan output tersusunnya renstra dan RKA 2017 tapi peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan dan pada waktu tertentu peserta rapat tidak diberi konsumsi cukup air agua.

- ✓ Belanja makan dan minuman konsinyasi sebesar Rp 935.000,-. Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan rencana. Awalnya dialokasi untuk 50 orang tapi yang hadir hanya 33 orang. Ouput dari konsinyasi yaitu tersusunnya RKA 2017 tetap tercapai.

Realisasi fisik kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tahun 2016 sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari :

- ✓ Pembayaran Honorarium Pegawai Honoror Pemerintah Daerah sebanyak 1 orang an. Sasri Anita.
- ✓ Pengadaan ATK
- ✓ Pelaksanaan konsinyasi penyusunan anggaran DPA-SKPD Tahun 2017.
- ✓ Biaya cetak Rencana Kerja Tahun 2017
- ✓ Biaya Penggandan untuk dokumen RKA, DPA, DPPA dan DPPA
- ✓ Biaya penjilidan dokumen RKA, DPA, DPPA, DPPA dan DPA Perubahan.
- ✓ Tersusunnya Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 050/2139a/Sekr-2016 tanggal 16 September 2016 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

3) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD.

- Capaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (100%)
Program
- Input : Dana : DPPA, Rp. 219.804.000,-
- Output : Terlaksanya kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran (12 bulan)
- Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD (100%)
- Realisasi : Fisik : 100 %
Keuangan : Rp. 218.700.000 ,- (99,50 %)
- Pelaksanaan Kegiatan :

Sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.104.000,- (0,50%)

Realisasi dana Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dibayarkan untuk honorarium kepada 1 (satu) orang Pengguna Anggaran, 7 (tujuh) orang Kuasa Pengguna Anggaran, 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, 1 (satu) orang Pejabat Pengelola Keuangan, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu, 4 (empat) orang Pembantu Bendahara, 1 (satu) orang pegawai honorer pemerintah daerah, 2 (dua) orang Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan 6 (enam) orang Operator SIPKD dan penggandaan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2016 yang berupa Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan jumlah data sekunder mengenai kegiatan penanaman yang ditemukan pada instansi yang mengurus kehutanan di kabupaten/kota; Kesulitan dalam menemukan dokumentasi kegiatan penanaman seperti berita acara penanaman dan berita acara hasil survey monitoring keberhasilan tumbuh tanaman untuk pemeliharaan T1 dan T2 di kab/kota; Keterbatasan SDM yang dimiliki baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan serta mengolah data terkait penanaman pohon
- 2) Permasalahan pada kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan, meliputi :
 - berasal dari sisa belanja penginapan dan bahan bakar. Terhadap permasalahan sisa mati pelaksanaan kegiatan yang mencapai Rp. 5.645.350,- sebagian besar
 - Terhadap Monitoring Penerbitan dan Pembinaan Pengelolaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan pada Industri di Kabupaten/Kota, Seksi Penatausahaan Hasil Hutan telah menindaklanjuti dengan menyurati Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan surat nomor 522.3/1174/PH-2016 tanggal 18 Mei 2016 (surat terlampir).
 - Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan ke IUIPHHK di Kabupaten/Kota, masih ada permasalahan yang ditemui dilapangan, belum ada satupun pemegang IUIPHHK yang menggunakan SKSHHK secara Aplikasi SIPUHH.
- 3) Pada Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah bahwa pelaksana belum sepenuhnya memahami mengenai target-target kegiatan yang ingin dicapai yang selanjutnya berakibat kepada kualitas data yang diperoleh/dihasilkan.
- 4) Permasalahan dari Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah Keterbatasan jumlah data sekunder mengenai kegiatan penanaman yang ditemukan pada instansi yang mengurus kehutanan di kabupaten/kota; kesulitan dalam menemukan dokumentasi kegiatan penanaman seperti berita acara penanaman dan berita acara hasil survey monitoring keberhasilan tumbuh tanaman untuk pemeliharaan T1 dan T2 di kab/kota; keterbatasan SDM yang dimiliki baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan serta mengolah data terkait penanaman pohon; realisasi keuangan tidak mencapai 100% adalah karena adanya penghematan menjadi sisa mati kegiatan yang berasal dari sisa belanja BBM, sisa perjalanan dinas/penginapan dalam dan luar daerah, sisa

uang transportasi/ tiket pesawat luar daerah sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

- 5) Tingginya klaim kepemilikan masyarakat terhadap lahan yang berada di dalam kawasan hutan negara dalam bentuk status tanah ulayat; Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan yang harus selalu terjaga; Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola-pola pengelolaan hutan dan potensi wisata alam hutan yang berwawasan kelestarian lingkungan.
- 6) Sub Kegiatan Konsultasi publik Renstra pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan tidak dilaksanakan. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November setelah Pergub SOTK disahkan (pelantikan). Sementara Renstra sudah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 050/2139a/Sekr-2016 tanggal 16 September 2016 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- 7) Pada Subag Umum dan Kepegawaian terhadap barang-barang yang sudah lama dihapuskan sebaiknya segera dilakukan lelang, hal ini sudah dilaporkan ke Biro pengelolaan Aset Daerah provinsi Sumatera Barat; Peralatan dan perlengkapan kantor sudah banyak rusak karena termakan oleh umur terutama (meja dan kursi), namun untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran sangat terbatas; Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebaiknya kantor mempunyai petugas resepsionis untuk menerima dan mengatur tamu-tamu yang datang; Rumah jabatan/dinas sudah banyak yang rusak termakan usia bahkan sudah ada yang roboh, sementara anggaran pemeliharaan rumah jabatan/dinas sangat terbatas dan tidak sesuai lagi dengan kondisi fisiknya; Permasalahan hibah sarana dan prasarana KPHP dan KPHL dari UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan Medan (BPKH) dan BP2HP Pekanbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum kunjung selesai; Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset kita masih banyak yang bermasalah, sehingga masih membutuhkan anggaran yang cukup untuk menyelesaikannya; Kendaraan dinas/operasional sudah banyak yang tua dan akan segera diusulkan untuk dihapuskan, terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kehutanan seharusnya menggunakan kendaraan dinas yang mempunyai garden double sehingga mampu menjelajahi medan-medan sulit seperti (Pajero maupun Fortuner).
- 8) Sub Kegiatan Konsultasi publik Renstra pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan tidak dilaksanakan. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November setelah Pergub SOTK disahkan (pelantikan). Sementara Renstra sudah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 050/2139a/Sekr-2016 tanggal 16 September 2016 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-

b. Solusi

Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penanaman di kab/kota terutama dalam pengumpulan dan pengolahan data base serta pengarsipan dokumentasi kegiatan; perlu memberikaan teguran dan punishment untuk mengatasi kendala (1) dan (2) pada masa yang akan datang karena kewenangan sudah berada di Pemprov. Sumatera Barat; mempertimbangkan kompetensi staf dalam penempatannya pada seksi-seksi sesuai dengan Tupoksi Seksi
- 2) Pada kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan, adalah Terhadap Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak dan HHBK di Kabupaten/Kota Seksi Penatausahaan Hasil Hutan telah menindaklanjuti dengan menyurati Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan surat nomor 522.3/261/PH-2016 tanggal 10 Februari 2016 (surat terlampir).
- 3) Terhadap permasalahan Seksi Penggunaan Kawasan Hutan telah dilakukan penekanan dan *couching* sebelum pelaksanaan kegiatan, namun karena menyangkut pemahaman/persepsi membutuhkan kemauan serta waktu yang tidak sebentar, selain itu upaya lain yang akan ditempuh adalah dengan kontrol terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan baik oleh Kepala Seksi maupun oleh Kepala Bidang
- 4) Solusi dari Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penanaman di kab/kota terutama dalam pengumpulan dan pengolahan data base serta pengarsipan dokumentasi kegiatan; perlu memberikaan teguran dan punishment untuk mengatasi kendala (1) dan (2) pada masa yang akan datang karena kewenangan sudah berada di Pemprov. Sumatera Barat; Perlu mempertimbangkan kompetensi staf dalam penempatannya pada seksi-seksi sesuai dengan Tupoksi Seksi.
- 5) Memberikan pemahaman - pemahaman kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan tentang status keberadaan hutan sebagai daerah penyangga kehidupan; Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan keamanan program dan kegiatan melalui penentuan pilihan lokasi kegiatan dengan sangat selektif; Membuat Memorandum of Understanding/Kesepahaman

(MoU) dengan perangkat pemerintah terendah dan perangkat masyarakat adat sebelum kegiatan dilaksanakan.

- 6) Konsultasi publik renstra ditunda pelaksanaannya sampai dengan pelantikan SOTK baru (Triwulan I TA 2017). Jika tetap dilaksanakan merupakan pemborosan anggaran sebesar Rp 28.500.000,- sementara Renstra Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 akan direvisi kembali sesuai dengan peralihan kewenangan dan SOTK baru sebagai implemtasi dari UU No 23 tahun 2014. Untuk Konsultasi Publik Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah dianggarkan kembali pada tahun 2017.
- 7) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan kepada Biro Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat perihal barang-barang yang sudah dihapuskan namun belum dilakukan lelang; Perlunya menambah anggaran yang cukup untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, mengingat sudah banyak peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai sekaligus untkmenyikapi UU Nomor 23 Tahun 2016; Perlunya penambahan anggaran untuk petugas petugas resepsionis, hal ini sejalan dengan pelaksanaan pelayanan public; Dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2016, perlunya menambah anggaran untuk pemeliharaan rumah jabatan/dinas serta bangunan kantor karena rumah jabatan/dinas maupun bangunan kantor yang ada di Kabupaten/Kota ada yang sudah tidak layak lagi; Proses penyelesaian asset masih banyak terkendala antara lain pengurusan sertifikat tanah dan bangunan berada di instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota dan Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Sumatera Barat selaku penanggung jawab penyelesaian sertifikat tanah dan bangunan; Mengingat masih banyak persoalan asset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten/Kota sehingga Anggaran untuk Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset perlu ditingkatkan/ditambah; Terhadap aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain adalah bukti kepemilikannya harus jelas, apabila tidak ada harus diurus sehingga apabila asset tersebut mau dipinjam pakaikan atau dihibahkan harus clean and clear terlebih dahulu, tidak ada permasalahan dalam bukti kepemilikannya; Kelengkapan administrasi hibah baik ke BPKH Medan dan BP2HP Pekanbaru sudah dilengkapi, tinggal menunggu persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 8) Konsultasi publik renstra ditunda pelaksanaannya sampai dengan pelantikan SOTK baru (Triwulan I TA 2017). Jika tetap dilaksanakan merupakan pemborosan anggaran sebesar Rp 28.500.000,- sementara Renstra Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 akan direvisi kembali sesuai dengan peralihan kewenangan dan SOTK baru sebagai implemtasi dari UU No 23 tahun 2014. Untuk Konsultasi Publik Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah dianggarkan kembali pada tahun 2017

BAB II

PENYELENGGARAAN DANA DEKONSENTRASI

A. Latar Belakang

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatupadukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara.

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1). perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/ lembaga, kegiatan dekonsentrasi juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth*, *Pro-Job*, *Pro-Poor* dan *Pro-environment*, sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Hasil pembangunan kehutanan memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Langkah utama pengurusan hutan pada Tahun 2016 adalah mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didasari basis data di tiap tapak yang jelas, sehingga membuka ruang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.

Bidang-bidang yang didukung oleh pembangunan kehutanan dalam prioritas nasional Tahun 2016 adalah : 1). Ekonomi, terkait dengan penyelesaian isu strategis transformasi sektor industri dalam arti luas yang kebijakannya diarahkan dalam pertumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, yang dilakukan melalui peningkatan tata kelola hutan pada 109 KPH serta peningkatan produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta ha yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk mendukung forest based industry di luar Pulau Jawa; 2). Sarana dan Prasarana, terkait dengan penyelesaian isu strategis peningkatan ketahanan air. Kebijakan dan strateginya ditempuh melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAS, peningkatan rehabilitasi dan reklamasi DAS, peningkatan pengelolaan DAS dalam KPH dan peningkatan fungsi konservasi sumberdaya air DAS yang bersangkutan; 3). Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan, terkait dengan isu strategis peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan yang dilaksanakan diarahkan untuk mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, mengembangkan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (*bioprospecting*), meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui fasilitasi pemulihan tutupan hutan dan memperkuat penanganan perubahan iklim; dan 4). Lintas Bidang, utamanya terkait isu strategis gender dan perubahan iklim.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur Sumatera Barat berupa 1 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui kegiatan ini diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat berkontribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja Tahun 2016.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan tersebut maka perlu disusun Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari DIPA BA 029 Satker 080053.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2016 Nomor : SP DIPA-029-01.080053/2016 tanggal 7 Desember 2015, Revisi DIPA beserta rincian Perhitungan Biaya Per-Kegiatan TA 2016

C. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

Instansi Pemberi Tugas Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. Sumber Dana

Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 029 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2016

E. Rencana Kegiatan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi melalui DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun 2016 No. SP.DIPA-029.01.3.080053/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 3.386.980.000,- yang terdapat dalam 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi serta 1 output yaitu presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK sebesar 95%. Adapun rincian kegiatan adalah seperti yang terdapat pada Tabel berikut ini .

Tabel 2.1. Rincian Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana Dekon
029.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	3.386.980.000
5369	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	3.386.980.000
5369,005	Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK [Base Line]	3.386.980.000
051	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	848.929.000
A	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	122.770.000
B	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	195.469.000
C	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	32.810.000
D	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	97.520.000
E	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	41.590.000
F	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	19.170.000
G	Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	170.550.000
H	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	169.050.000
052	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	353.767.000
A	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi	108.710.000
B	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi	27.032.000
C	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi	74.140.000
E	Pembinaan dan Pengendalian KPHL oleh Tim Provinsi	28.110.000
F	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	35.050.000
G	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Tim Provinsi	80.725.000
53	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	257.500.000
A	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	253.870.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Essensial	3.630.000
054	Planologi dan Tata Lingkungan	549.819.000
A	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	130.119.000
B	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	318.220.000

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana Dekon
D	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	101.480.000
055	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	378.122.000
A	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	62.550.000
B	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	81.350.000
C	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	75.150.000
D	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	87.132.000
E	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	71.940.000
056	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	314.540.000
A.	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	314.540.000
057	Pengendalian Perubahan Iklim	366.090.000
A	Pengolahan Data dan Informasi Monitoring Hotspot	3.980.000
B	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	277.850.000
C	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	67.370.000
D	Monitoring Pelaksanaan Kebakaran Hutan	16.890.000
060	Program, Evaluasi dan Pelaporan	318.213.000
	Program, Evaluasi dan Pelaporan	318.213.000
	JUMLAH	3.386.980.000

F. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 902-269-2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat SPM, Bendahara Dana Dekonsentrasi APBN Dinas Kehutanan Provinsi

G. Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi dana untuk kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Tahun 2016 sebesar Rp. 3.386.980.000,-. Realisasi dana sebesar Rp. 3.121.391.985,- atau sebesar 92,16% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 265.588.015,- atau sekitar 7,84%.

Rincian alokasi dan realisasi dana masing-masing output dan sub output dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Alokasi dan Realisasi Dana Masing-Masing Output Dan Sub Output Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			(%)	Rp.	(%)	
029.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	3.386.980.000	100,00	3.121.391.985	92,16	265.588.015
5369	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	3.386.980.000	100,00	3.121.391.985	92,16	265.588.015
5369,005	Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK [Base Line]	3.386.980.000	100,00	3.121.391.985	92,16	265.588.015
051	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	848.929.000	100,00	776.248.350	91,44	72.680.650
A	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	122.770.000	100,00	120.666.550	98,29	2.103.450
B	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	195.469.000	100,00	193.116.200	98,80	2.352.800
C	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	32.810.000	100,00	32.160.000	98,02	650.000
D	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	97.520.000	100,00	87.003.500	89,22	10.516.500
E	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	41.590.000	100,00	41.332.000	99,38	258.000
F	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi	19.170.000	100,00	18.909.500	98,64	260.500
G.	Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	170.550.000	100,00	116.951.600	68,57	53.598.400
H	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku	169.050.000	100,00	166.109.000	98,26	2.941.000
052	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	353.767.000	100,00	332.971.500	94,12	20.795.500
A	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi	108.710.000	100,00	101.962.000	93,79	6.748.000
B	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi	27.032.000	100,00	26.630.000	98,51	402.000
C	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon	74.140.000				

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			(%)	Rp.	(%)	
	Tingkat Provinsi		100,00	72.368.500	97,61	1.771.500
E	Pembinaan dan Pengendalian KPHL oleh Tim Provinsi	28.110.000	100,00	20.704.000	73,65	7.406.000
F	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan	35.050.000	100,00	34.798.000	99,28	252.000
G.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Tim Provinsi	80.725.000	100,00	76.509.000	94,78	4.216.000
53	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	257.500.000	100,00	242.426.650	94,15	15.073.350
A	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	253.870.000	100,00	238.796.650	94,06	15.073.350
B	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Essensial	3.630.000	100,00	3.630.000	100,00	-
054	Planologi dan Tata Lingkungan	549.819.000	100,00	498.551.150	90,68	51.267.850
A	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	130.119.000	100,00	126.924.350	97,54	3.194.650
B	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	318.220.000	100,00	279.753.500	87,91	38.466.500
D	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi	101.480.000	100,00	91.873.300	90,53	9.606.700
055	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	378.122.000	100,00	344.044.900	90,99	34.077.100
A	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	62.550.000	100,00	58.628.200	93,73	3.921.800
B	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	81.350.000	100,00	75.242.700	92,49	6.107.300
C	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	75.150.000	100,00	60.542.000	80,56	14.608.000
D	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial	87.132.000	100,00	81.182.000	93,17	5.950.000
E	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial	71.940.000	100,00	68.450.000	95,15	3.490.000
056	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	314.540.000	100,00	278.624.400	88,58	35.915.600
A.	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan	314.540.000	100,00	278.624.400	88,58	35.915.600
057	Pengendalian Perubahan Iklim	366.090.000	100,00	342.571.800	93,58	23.518.200
A	Pengolahan Data dan Informasi Monitoring Hotspot	3.980.000	100,00	2.020.000	50,75	1.960.000

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			(%)	Rp.	(%)	
B	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	284.870.000	100,00	268.491.800	94,25	16.378.200
C	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	67.370.000	100,00	64.440.000	95,65	2.930.000
D	Monitoring Pelaksanaan Kebakaran Hutan	9.870.000	100,00	7.620.000	77,20	2.250.000
060	Program, Evaluasi dan Pelaporan	318.213.000	100,00	305.953.235	96,15	12.259.765
	Program, Evaluasi dan Pelaporan	318.213.000	100,00	305.953.235	96,15	12.259.765
	JUMLAH	3.386.980.000	100,00	3.121.391.985	92,16	265.588.015

Adapun uraian capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan, output dan sub output adalah sebagai berikut :

051 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

A. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Jumlah anggaran : SDM dan dana sebesar Rp. 122.770.000,-
- Keluaran (Output) : Laporan Pemantauan Pungutan dan Pemutakhiran Data Iuran Kehutanan PSDH, DR & PNT ke Kab./Kota; Rekonsiliasi Iuran Kehutanan, PSDH dan DR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (11 laporan).
- Hasil (out come) : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95 %.
- Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Realisasi keuangan : Rp. 120.666.550 (98,29 %)
- Realisasi Fisik : 100 % (11 Laporan Pemantauan Pungutan dan Pemutakhiran Data Iuran Kehutanan PSDH, DR & PNT ke Kab./Kota; Rekonsiliasi Iuran Kehutanan, PSDH dan DR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan)

Telah dilaksanakan pemantauan pungutan & pemutakhiran data Iuran Kehutanan PSDH, DR dan PNT ke 11 Kabupaten/Kota dan rekonsiliasi Iuran Kehutanan PSDH, DR dan PNT dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 5 kali.

Resume laporan Pemantauan Pungutan dan Pemutakhiran Data Iuran Kehutanan PSDH, DR & PNT ke Kab./Kota; Rekonsiliasi Iuran Kehutanan, PSDH dan DR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak dengan realisasi fisik 100 % dan secara keuangan terealisasi 98,58 %.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, yaitu:

- a. Realisasi Penerimaan PSDH senilai Rp. 6.444.723.174,00 (82,80 % dari target yang ditetapkan Rp. 7.783.701.380)
- b. DR senilai USD 1.393.017,66 (Rp. 18.484.862.511,65), tercapai 104,90 % dari target yang ditetapkan Rp. 17.621.808.372,00,-
- c. Terdapat PNBPN berupa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang belum dibagihhasilkan sampai dengan tahun 2015 senilai Rp.13.136.539.642,92.

B. Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

- Jumlah anggaran : Rp 195.469.000,-
- Realisasi keuangan : Rp. 193.116.200 (98,80 %
- Realisasi Fisik : 100 %

Sisa dana sebesar Rp. 2.352.800,- merupakan sisa mati kegiatan

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak dan HHBK di Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.37.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.37.224.000,- fisik 100%.
- Monitoring Penerbitan dan Pembinaan Pengelolaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan pada Industri di Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.58.980.000,- realisasi sebesar Rp.57.570.000, fisik 100%.
- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan ke IUPHHK-HA/HT/HGU dan IPK di Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.30840.000, realisasi sebesar Rp. 30.840.000,- fisik 100%.
- Pembinaan Pengendalian Penerbitan Dokumen Angkutan Hasil Hutan ke IUPHHK-HA/HT/HGU dan IPK ke Kabupaten Kepulauan Metawai pagu anggaran Rp.26.099.000,- realisasi sebesar Rp.25.074.000,- fisik 100%.
- Konsultasi kegiatan PUHH ke Kementerian Kehutanan pagu anggaran Rp.6.500.000,-, realisasi sebesar Rp.5.483.000,- fisik 100%.
- Cross Check Dokumen Peredaran Hasil Hutan ke Provinsi Tujuan pagu anggaran Rp.38.000.000, realisasi sebesar Rp.37.916.000,- fisik 100%.
- Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan pagu anggaran Rp.32.810.000, realisasi sebesar Rp.32.410.000,- fisik 100%.

Target Kinerja dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan pada Seksi Penatausahaan Hasil Hutan berupa Laporan hasil pembahasan sebanyak 1 (satu) laporan yaitu; Laporan Pembahasan Pelaksanaan Seksi Penatausahaan Hasil Hutan Bidang Pemanfaatan Hutan. Target Kinerja pada DIPA BA 029 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (03) Tahun 2016 pada Seksi Penatausahaan Hasil Hutan tersebut dapat dicapai berupa 1 (satu) buah Laporan.

Pada Tahun 2016, dalam rangka peningkatan tertib peredaran hasil hutan, diharapkan dengan pengawasan, pembinaan dan pengendalian SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB/KO/KR *melalui aplikasi* SIPUHH Online, maka akan tercipta ketertiban administrasi dalam peredaran hasil hutan.

Tertibnya peredaran hasil hutan akan berdampak terhadap rendahnya penyalahgunaan dokumen hasil hutan yang pada akhirnya akan menciptakan Penatausahaan Hasil Hutan berjalan tertib sesuai ketentuan.

C. Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

- Jumlah anggaran : Rp 32.810.000,-
- Realisasi keuangan : Rp. 32.160.000 (98,02 %)
- Realisasi Fisik : 100 %

D. Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

- Jumlah anggaran : Rp. 97.520.000,-
- Keluaran (Output) : Laporan Stock Opname Kayu yang tumbuh alami pada lahan hak/IPK (6 laporan); Pembinaan dan pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (pada 4 pemegang IUPHHK-HA (PT Salaki Summa Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai, PT Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai, PT Multikarya Lisun Prima di Kabupaten Sijunjung, dan PT Andalas Merapi Timber di Kabupaten Solok Selatan)
- Indikator kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95 %.
- Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Realisasi Keuangan : Rp. 87.003.500 (89,22%)
- Realisasi Fisik/Keluaran : 100 % (6 Laporan Stock Opname Kayu yang tumbuh alami pada lahan hak/IPK)
- Indikator kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95%.
- Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Resume Laporan Hasil Stock Opname Kayu yang tumbuh alami pada lahan hak/IPK di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana lampiran 12.2.
 - Hasil Stock Opname pada Lahan Hak Koperasi Tani Baudo Sepakat di Kabupaten Pasaman Barat dituangkan pada Berita Acara Nomor 02/19-HHak/BUS/III-2016 tanggal 31 Maret 2016; Secara administrasi maupun secara fisik diketahui stock kayu (produksi kayu yang tumbuh alami) pada Lahan Hak An. Koperasi Tani Baudo Sepakat pada tanggal 31 Maret 2016 nihil.
 - Hasil Stock Opname pada Lahan Hak Koperasi Padu Pilihan di Kabupaten Dharmasraya dituangkan pada Berita Acara Nomor 01/17-HHak/KPP/IV-2016 tanggal 04 April 2016; Stock Kayu Bulat pada lahan hak Koperasi Padu Pilihan pada saat pemeriksaan (per tanggal 04 April 2016) sebanyak 438 batang (165,64 M³), sedangkan fisik di lapangan sebanyak 435 batang (165,49 M³). Terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan administrasi dengan hasil pemeriksaan fisik sebanyak 1 batang (0,15 M³). Hal ini berarti terdapat 1 batang kayu bulat yang hilang atau tidak ditemukan di TPn saat pemeriksaan.
 - Stock Opname kayu yang tumbuh alami pada lahan hak Koperasi Sungai Sako tidak dapat dilaksanakan, karena Ketua Koperasi Sungai Sako (Adnan) sedang tidak berada di tempat (sedang di Pekan Baru hendak menuju ke Bogor), sehingga tidak dapat memberikan data-data untuk bahan stock opname.
 - Hasil Stock Opname pada Lahan Hak An. Damris Nasution di Kabupaten Pasaman Barat *tidak dapat dilaksanakan*, terkait dengan kondisi permasalahan keabsahan alas hak lahan dan hasil pengecekan lapangan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (Hasil cruising 100 %); Damris Nasution pemegang alas hak atas lahan seluas 19 Ha (10 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang ditumbuhi hutan/kayu yang tumbuh alami, yaitu Damris Nasution, merupakan perolehan dari Ninik Mamak Sabajulu/Sigantang (Mislán St. Parlagutan) berupa Penyerahan Hak Penguasaan Ulayat Ninik Mamak tanggal 15 Desember 2014 dengan cara "Adat Diisi Limbago Dituang" dengan penggunaan tanah untuk perkebunan, diragukan keabsahan jual-belinya (bermasalah) oleh Ninik Mamak Sigantang melalui surat Nomor 01/NM-SG/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Hutan Lindung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Kepala BPN Kabupaten Pasaman Barat yang menginformasikan bahwa ± 10 Ha lahan tersebut di daerah Adian Batang yang berdekatan dengan tanah Munggu Jorong Sigantang (berbatasan dengan hutan lindung Batahan Register Nomor 35), diragukan keabsahan jual-belinya (bermasalah).
 - Hasil Stock Opname pada Lahan Hak Koperasi Tani Baudo Sepakat di Kabupaten Pasaman Barat dituangkan pada Berita Acara Stock Opname Nomor 02/19-HHak/KTBS/VI-2016 tanggal 29 Agustus 2016; Stock kayu (produksi kayu yang tumbuh alami) pada Lahan Hak An. Koperasi Tani

Baudo Sepakat pada tanggal 01 Agustus 2016 sebanyak 43 Batang (99,65 M³) terdiri dari jenis Kelompok Meranti sebanyak 37 Batang (87,13 M³) dan Kelompok Campuran sebanyak 6 Batang (12,62 M³); Sebagian dari kayu tersebut telah dibayarkan kewajiban kepada Negara berupa PSDH sebanyak Rp. 618.792,00 dan DR sebanyak USD. 1.465,85,-. (sesuai Billing/Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN dan Bukti Setor); Hasil pencermatan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN yang disampaikan dengan kode billing 820160620202516 tanggal 20-06-2016 21:34:59, *terdapat kesalahan perhitungan* (perkalian antara volume kayu dengan tarif dan harga patokan), dimana total setoran PSDH tertulis sebanyak Rp. 618.792, seharusnya Rp. 6.187.920,-.

- Hasil Stock Opname pada IPK Primer Koperasi Kartika Wirabaja di Pagai Utara Kabupaten kepulauan Mentawai dituangkan pada Berita Acara Nomor 01/09-IPK/PKKW/VIII-2016 tanggal 27 Agustus 2016; Hasil pemeriksaan secara administrasi diketahui stock Kayu Bulat pada saat pemeriksaan (per tanggal 27 Agustus 2016) sebanyak 1.380 Batang (3.821,8M³), terdiri dari Kelompok jenis Meranti sebanyak 278 Batang (836,70 M³) dan Kelompok jenis Campuran 830 Batang (2.313,18 M³) serta jenis kayu Indah sebanyak 272 Batang (671,92 M³); Hasil pemeriksaan fisik di lapangan, diketahui stock kayu bulat saat pemeriksaan (per 27 Agustus 2016) *dalam kondisi Gubal busuk, nomor batang (informasi identitas kayu bulat) yang ditulis pada label yang ditempel/melekat pada kayu bulat tidak terbaca lagi dan sudah banyak yang hilang.* Kondisi Gubal busuk dapat diketahui lebih jelas pada saat pemeriksaan dimana ditemui masyarakat yang sedang mengambil sebatang kayu dari salah satu tumpukan kayu di TPn Km 14 dan membelah/mencincang dengan kampak hingga bagian empulur kayu; Terdapat kayu yang telah dipotong-potong oleh masyarakat dalam kondisi membusuk pada tumpukan kayu di TPn Km 14.
- Hasil Stock Opname pada HGU Multikarya Sawit Prima di Kabupaten Solok Selatan dituangkan pada Berita Acara Stock Opname Nomor : 01/18-HGU/MSP/IV-2016 tanggal 4 April 2016; Secara administrasi stock kayu sebanyak 3.199 batang dengan Volume 737,45 M³ dengan rincian KB/KBS Kelompok Meranti 1 Batang (0,46 M³) dan Kelompok Campuran 408 Batang (230,78 M³) dan KBK Kelompok Campuran 2.791 dengan Volume 506,21 M³; Secara Fisik stock kayu sebanyak 3.196 batang dengan Volume 732,72 M³ dengan rincian KB/KBS Kelompok Meranti 1 Batang(0,46 M³) dan Kelompok Campuran 407 Batang (229,19 M³) dan KBK Kelompok Campuran 2.789 dengan Volume 503,53 M³; Perbedaan antara hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Sebanyak 3 batang dengan Volume 4,73 M³ dengan rincian KB/KBS Kelompok Campuran 1 Batang (2,05 M³) dan KBK Kelompok Campuran 2 Batang (2,68 M³).

Hasil Stock Opname kayu yang tumbuh secara alami pada Lahan Hak An. Erianto di Kabupaten Solok Selatan dituangkan pada Berita Acara Nomor : 02/18- H.Hak/ERT/IV-2016 tanggal 02 April 2016; Secara administrasi

maupun secara fisik diketahui stock kayu pada Lahan Hak An. Erianto pada tanggal 2 April 2016 Nihil.

E. Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Usaha pemanfaatan Hutan Tanaman- Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

- Jumlah anggaran : Rp. 41.590.000
- Keluaran (Output) : Laporan Stock Opname dan monitoring produksi IUPHHK-HT (2 laporan); Pelaksanaan pada 2 (dua) pemegang IUPHHK yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Dharmasraya/Solok Selatan dan PT Sukses Jaya Wood di Kabupaten Pesisir Selatan)
- Indikator kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95 %.
- Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Realisasi Keuangan : Rp. 41.332.000 (99,38 %)
- Realisasi Fisik/Keluaran : 100 % (2 laporan hasil Stock Opname dan monitoring produksi IUPHHK-HT)

Realisasi produksi kayu hutan tanaman tahun 2016 sebanyak 60.984,98 M³.

Hasil Stock Opname pada IUPHHK-HT PT Inkud Agritama dituangkan pada Berta Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 01/19-IUPHHK-HT/IAT/III-2016 Tanggal 31 Maret 2016 dengan Hasil Stock kayu Bulat yang sudah di LHPkan dan sudah dibayar PSDH,DR dan PNT sebanyak 235 dengan Volume 168,23 M³, dan kayu yang belum di LHPkan sebanyak 150 batang dengan volume 366,7 M³; Pembayaran kewajiban PSDH, DR dan PNT atas kayu yang ditebang sebanyak 168,23 M³ terlambat sehingga harus membayar denda 2% dari kewajiban, yaitu PSDH sebanyak RP.111.481,80.-, DR sebanyak USD 40.98 dan PNT sebanyak Rp. 186.772,62; PT Inkud Agritama telah memiliki User ID dan pasword dalam rangka aplikasi penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH Online.

Hasil Monitoring Produksi pada IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa diketahui realisasi produksi RKT Tahun 2016 sampai saat Monitoring di Kabupaten Dharmasraya dengan jenis produksi Eucaliptus dengan volume 4.450,28 M3 dari target 7.161 M3 (62,15 %). Untuk Kabupaten Solok Selatan dengan jenis produksi Acasia Mangium dengan volume 1.542,31 M3 dari target 115.631,00 M3 (1,33%); Pelunasan kewajiban terhadap Negara berupa PSDH untuk RKT Tahun 2016 pada Kabupaten Solok Selatan senilai Rp.8.328.747,00 dan Kabupaten Dharmasraya senilai

Rp.24.031.512.00; realisasi penggunaan peralatan belum sesuai dengan RKT Tahun 2016, peralatan yang digunakan lebih sedikit dari yang direncanakan

F. Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi

- Jumlah anggaran : Rp. 19.170.000
- Realisasi Keuangan : Rp. 18.909.500 (98,64 %)
- Realisasi Fisik : 100 %

Di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2016 baru terbentuk 2 (dua) KPHP, dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pada KPHP dimaksud, yaitu :

- a. KPHP Model Dharmasraya
- b. KPHP Model Pesisir Selatan

1. Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan

Pelaksanaan pembinaan perizinan HHBK dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tanah Datar;
- b. Kabupaten Limapuluh Kota;
- c. Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Kabupaten Solok; dan
- e. Kabupaten Pasaman

2. Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku

Kegiatan telah dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten terkait dengan adanya permohonan IUIPHHK ataupun kabupaten yang disinyalir terdapat potensi kayu pada hutan rakyat/lahan masyarakat/lahan perkebunan, dengan lokasi sebagai berikut :

- a. Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Kabupaten Tanah Datar;
- d. Kabupaten Limapuluh Kota;
- e. Kabupaten Agam
- f. Kabupaten Pasaman
- g. Permohonan IUIPHHK UD IDK di Kabupaten Sijunjung;
- h. Pada Hutan Hak Koperasi Sungai Sako di Kabupaten Dharmasraya;
Pada HGU PT Multikarya Sawit Prima di Kabupaten Solok Selatan

G. Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK

Sub Kegiatan Pembinaan Produksi HHBK dan Izin Pemungutan HHBK-Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

- Jumlah anggaran : Rp. 170.550.000
- Keluaran (Output) : Laporan monitoring produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dan laporan mengikuti pembekalan operator SIPUHH Online (7 laporan)
- Indikator kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95 %.

- Realisasi Keuangan : Rp. 116.951.600 (68,57 %)
- Keluaran (Output) : 100 % (7 Laporan monitoring produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dan laporan mengikuti pembekalan operator SIPUHH Online)
- Indikator kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95 %.

Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan monitoring produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dan laporan mengikuti pembekalan operator SIPUHH Online sebagaimana..

Realisasi fisik berupa laporan hasil pelaksanaan monitoring produksi hasil hutan bukan kayu ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 laporan.

Pada saat monitoring di Prov. Sumatera Barat terdapat 38 Unit IPHHBK, yaitu :

- Di Kabupaten Lima Puluh Kota 1 Unit, yaitu Kelompok Tani Karya Bersama, Kelompok Tani Pitopang, CV Berkah Alam, CV Muda Karya, CV Kirana Furnance, CV Alam Lestari, IPHHBK Donika Putra, PT Pinus Tulen, Kelompok Tani Angrek Putih, CV Maju Bersama, CV Mitra Usaha Mandiri, CV Mutiara, IPHHBK Syafridi, IPHHBK Khairul Apit, IPHHBK Yon Mardi.
- Di Kabupaten Tanah Datar 7 unit, yaitu IPHHBK Koperasi Prasasti, Koperasi Anak Nagari, Koperasi Nagari Tanjung Barulak, Kelompok Tani Sawah Kojai, Kelompok Tani Lubuak bayua, Kelompok Tani Berkah, dan Koperasi Unit Desa.
- Di Kabupaten Agam terdapat 3 Unit IPHHBK, yaitu PT INHUTANI IV dan CV Mitra Usaha Mandiri dan IPHHBK Aridarma.
- Di Kabupaten Solok 6 Unit IPHHBK Getah Pinus, yaitu PT Inhutani IV, Rizal Efendi, Muslim, Burhanuddin, Heri Suandri dan CV Merkusii Lestari.
- Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 3 Unit IPHHBK, terdiri dari 2 Unit IPHHBK Getah Pinus yaitu CV Merkusii Lestari dan VV Mitra Usaha mandiri; dan 1 Unit IPHHBK Rotan, yaitu IPHHBK Asral.
- Di Kota Sawahlunto 2 Unit IPHHBK, yaitu CV Poland Jaya dan CV Mutiara Hitam.
- Di Kabupaten Pasaman terdapat 4 Unit IPHHBK, yaitu PT INHUTANI IV, IPHHBK Yeni Fersita, IPHHBK Muhammad Ayub dan IPHHBK Haryadi.
- Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1 unit IPHHBK, yaitu IPHHBK Kasilan.

Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus di Provinsi Sumatera Barat hingga saat monitoring tercatat 1.124,77 Ton; realisasi produksi IPHHBK Rotan Manau sebanyak 13.300 Batang, Tabu-tabu sebanyak 8.811 Batang, Semambu 1700 Batang dan Rotan sebanyak 3.160 Kg.

Realisasi pemasaran hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus di Provinsi Sumatera Barat hingga saat monitoring tercatat 1.124,77 Ton; realisasi

produksi IPHHBK Rotan Manau sebanyak 13.300 Batang, Tabu-tabu sebanyak 8.811 Batang, Semambu 1700 Batang dan Rotan sebanyak 3.160 Kg.

Informasi harga pasar hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus pada IPHHBK di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berkisar antara Rp 8.500 hingga Rp. 11.000 per Kg; harga pasar manau Rp. 12.000 per batang; harga pasar tabu-tabu sekitar Rp 8.000; harga pasar semambu sekitar Rp. 2.500 per batang dan harga pasar rotan sekitar Rp. 6.500 per Kg.

Laporan produksi HHBK dari Pemegang IPHHBK, maupun dari Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota belum tertib.

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2016 berupa getah pinus sebanyak 2.780,207,57 Ton, Manau 89.350 Btg, Tabu-tabu 12.611 Btg dan rotan 5,660 Ton dan Semambu 8.495 Btg.

Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH dari hasil hutan bukan kayu sejumlah Rp. 121.937.149,-, terdiri dari PSDH manau senilai Rp. 12.447.000,-; PSDH tabu-tabu senilai Rp. 1.525.320,-; PSDH rotan senilai Rp. 436.530; PSDH semambu senilai Rp. 545.700; dan PSDH getah pinus senilai Rp. 106.982.599,-

H. Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku

Sub Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku-Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

- Jumlah anggaran : Rp. 169.050.000,-
- Keluaran (Output) : Laporan Stock Opname Bahan Baku Industri pada UIIPHHK pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (12 laporan).
- Realisaisi Keuangan : Rp. 166.109.000 (98.26 %)
- Realisasi Fisik : 100 % (12 Laporan Stock Opname Bahan Baku Industri pada UIIPHHK pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)
- Indikator kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95 %.
- Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Resume Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Stock Opname Bahan Baku Industri pada UIIPHHK pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Telah dilaksanakan Stock Opname pada 48 Unit UIIPHHK di Provinsi Sumatera Barat dan terdapat 32 Unit UIIPHHK lainnya yang tidak dilaksanakan Stock Opname karena UIIPHHK yang bersangkutan tidak aktif dan atau tidak ada data administrasi Pemenuhan bahan baku industri.

- Hingga saat ini baru 3 Unit IUIPHHK yang melaksanakan SIPUHH Online, yaitu IUIPHHK CV Famili Jaya di Kabupaten Pasaman Barat , UD Wahana Talabang di Kabupaten Sijunjung dan UD Risky di Kabupaten Agam.
- Laporan bulanan perusahaan IUIPHHK maupun P3KB pada IUIPHHK di Provinsi Sumatera Barat secara umum sudah ada, namun belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara tertib/tepat waktu.
- Laporan bulanan Dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berupa Laporan Gabungan Laporan Hasil Hutan Kayu Olahan secara umum sudah ada, namun belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara tertib/tepat waktu.

052 Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

A. Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi

Realisasi kegiatan Pengendalian RHL dilakukan oleh Tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-150-2016 dengan keanggotaan dari berbagai bidang di lingkup Dinas Kehutanan.

- Jumlah anggaran : Rp. 108,710,000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 101.962.000,- (93,79%)
- Keluaran (Output) : Laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian RHL di 18 Kab/kota.
- Outcome : Terselenggaranya kegiatan RHL di 18 kabupaten/kota dan Reklamasi hutan yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.748.00,- sisa anggaran tersebut berasal dari belanja Perjalanan Dinas ke Kementerian LHK.

B. Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi

- Jumlah anggaran : Rp. 27,032,000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp.26,630,000,- (98,51 %)
- Keluaran (Output) : Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH sebanyak 6 IPPKH.
- Outcome : luas lahan kritis yang dapat direhabilitasi baik di dalam maupun di luarKawasan hutan seluas 431 Ha.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 402.000,-dari penginapan

Kegiatan pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS RHL oleh im Provinsi terhadap pemegang IPPKH adalah kegiatan untuk memonitor dan bimbingan teknis terhadap Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam dan di luar kawasan hutan sebagai salah satu kewajiban pemegang izin sebagai kompensasi terhadap penggunaan kawasan hutan yang dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Realisasi monitoring pelaksanaan RHL oleh pemegang IPPKH dilakukan terhadap 6izin yaitu :

1. PT. Semen Padang
2. A/n Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman
3. PT. Tipa Bara
4. A/n Bupati Sijunjung.
5. A/n Bupati Pasaman Barat
6. A/n PLN Persero Wilayah Sumbar

C. Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi

- Jumlah anggaran : Rp. 74,140,000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 72,368,500,- (97,61 %)
- Keluaran (Output) : Laporan pelaksanaan penanaman dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Outcome : Terselenggaranya peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat Provinsi Sumatera Barat di Nagari Sungai Buluh Kabupaten Pariaman dengan melakukan penanaman sebanyak 2.000 Batang

E. Pembinaan dan Pengendalian KPHL oleh Tim Provinsi

- Jumlah anggaran : Rp. 28.110.000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 20.704.000,- (73,65 %)

F. Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan

- Jumlah anggaran : Rp. 35.050.000,--
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 34.798.000,- (99,29 %)

Dalam pelaksanaannya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan ini hanya berupa Fasilitasi Pelaksanaan Urusan PTH, dan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Tim Provinsi serta Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Perbenihan Tanaman Hutan se Sumatera Barat.

Sisa anggaran sebesar Rp. 252.000,- atau 0,71 % yang telah dikembalikan ke Kas Negara

G. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Tim Provinsi

- Jumlah anggaran : Rp. 80.725.000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 76.509.000,- (94,78 %)

053. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 257.500.000

A. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial

- Jumlah anggaran : Rp. 253.870.000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 238.796.650,- (94,06 %)

Uraian pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi merupakan tahapan dalam pembentukan kawasan ekosistem esensial yang terdiri dari :

-) Identifikasi calon lokasi EE

Identifikasi calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada 04 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Lima Puluh Kota.

-) Sosialisasi Pengembangan Calon Lokasi EE

Sosialisasi calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada 05 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan.

-) Kesepakatan Para Pihak Calon Lokasi EE

Kesepakatan para pihak calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada Kabupaten Solok Selatan tepatnya di areal konservasi / VCF PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia berupa koridor satwa ke Taman Nasional Kerinci Seblat.

-) Pembentukan Forum Kolaborasi Calon Lokasi EE

Pembentukan Forum Kolaborasi calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada Kabupaten Solok Selatan juga dilaksanakan di areal konservasi / VCF PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya :

-) Identifikasi calon lokasi ekosistem esensial pada 04 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Lima Puluh Kota.
-) Sosialisasi calon lokasi ekosistem esensial pada 05 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan.
-) Kesepakatan para pihak calon lokasi ekosistem esensial pada Kabupaten Solok Selatan tepatnya di areal konservasi / VCF PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia berupa koridor satwa ke Taman Nasional Kerinci Seblat.
-) Pembentukan Forum Kolaborasi calon lokasi ekosistem esensial pada Kabupaten Solok Selatan juga dilaksanakan di areal konservasi / VCF PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terhimpunnya data, informasi dan potensi lokasi yang dapat dilakukan pengelolaan ekosistem esensial dan dipetakan secara digital, tersosialisasinya rencana pembentukan calon lokasi ekosistem esensial kepada stake holder terkait dan seluruh lapisan masyarakat di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan tercapainya kesepakatan bersama diantara stake holder terkait serta terbentuknya forum kolaborasi yang terdiri dari semua pihak terkait dalam pengelolaan ekosistem esensial yang akan membuat rencana aksi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Sisa Anggaran sebesar Rp. 15.073.350 merupakan sisa mati karena adanya efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan berupa biaya makan minum sosialisasi, biaya perlengkapan kerja, sewa kendaraan identifikasi EE, transportasi peserta sosialisasi, dan perjalanan dinas identifikasi, penginapan identifikasi, uang harian kabupaten identifikasi, perjalanan sosialisasi dan perjalanan dinas sosialisasi dari Kab/Kota, Penginapan Sosialisasi, Transportasi tim sosialisasi serta perjalanan koordinasi EE.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial di peroleh outcome berupa peningkatan luas Kawasan Konservasi agar terlindungi keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, namun tidak berada diluar Kawasan Pelestarian Alam.

B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Essensial

- Jumlah anggaran : Rp. 3.630.000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 3.630.000,- (100,00 %)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem esensial dilakukan pada kawasan eksositem esensial yang sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Barat yakni, di Kabupaten Padang Pariaman berupa konservasi penyu.

Monev dilakukan untuk melihat gambaran pengelolaan kawasan ekosistem esensial tersebut saat ini , baik realisasi rencana aksi yang sudah di buat, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi dan pemecahan masalahnya. Mengingat sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kewenangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial penyus berada pada UTP Pusat KemenLHK (BKSDA) dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

054. Planologi dan Tata Lingkungan

A. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

- Jumlah anggaran : Rp. 130.119.000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 126.924.350,- (97,54 %)

Realisasi fisik sub komponen ini adalah terealisasi 100% yaitu terlaksananya sosialisasi batas kawasan hutan di 5 (lima) lokasi.

Keluaran (*output*) sub komponen ini adalah terlaksanakannya sosialisasi batas kawasan hutan di 5 (lima) lokasi yaitu di Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 (satu) lokasi, di Kabupaten Pasaman sebanyak 2 (dua) lokasi, di Kabupaten Solok sebanyak 1 (satu) lokasi dan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1 (satu) lokasi

Hasil (*Outcome*) sosialisasi batas kawasan hutan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (hasil Kementerian LHK) dan persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebesar 100% (hasil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)

B. Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

- Jumlah anggaran : Rp. 318.220.000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : 279.753.500,- atau sebesar 87,91%.

Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi Sosialisasi Pembangunan KPH Tahun Anggaran 2016 adalah Kota Padang, Kabupaten Agam, Sijunjung, Solok, Pasaman, Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan.

Hasil dari pelaksanaan sosialisasi antara lain adalah :

1. Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten berjalan dengan baik dan lancar, dihadiri oleh 45 orang peserta/kabupaten dari pihak terkait, 2 orang Narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan satu orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten.
2. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten/Kota beserta elemen masyarakat terkait mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat terutama mengenai penarikan kewenangan pengelolaan hutan dari kabupaten/kota ke

tingkat provinsi dengan dibentuknya KPH sebagai pengganti Dinas Kehutanan di kabupaten/kota.

3. Peserta/para pihak/ stakeholders terkait pada umumnya sangat mendukung pembentukan dan pembangunan KPH di Kabupaten/Kota karena mereka melihat ada banyak peluang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam kawasan hutan disamping tetap mempertahankan keberadaan hutan.
4. Peserta lebih banyak mempertanyakan masalah pelaksanaan penyerahan P3D dari Pemkab/Pemkot ke pemerintah provinsi, status dan fungsi kawasan, peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat serta pemuka adat.
5. Bentuk kelembagaan KPH kedepan adalah UPTD provinsi dan diusulkan penambahan tugas Cabang Dinas pada Kepala KPH tersebut dalam mengurus pengelolaan hutan di luar kawasan hutan.

Peserta memahami tugas, fungsi dan kewenangan KPH dalam mengelola hutan, hal ini terlihat dari tanggapan para peserta saat acara diskusi dengan para narasumber

Rincian mengenai realisasi anggaran dan persentase serapan dana per-mata anggaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

D. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi

- Jumlah anggaran : Rp. 101.480.000,-
- Keluaran (*output*) : Tersusunnya Buku NSDH Provinsi sebanyak 1 (satu) buku
- Hasil (*Outcome*) : Penyusunan NSDH Provinsi adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (hasil Kementerian LHK) dan persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebesar 100% (hasil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : 91.873.300,- atau sebesar 90,53%.

Sub Komponen Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi sebanyak 1 buku.

Jumlah anggaran untuk mendukung Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 101.480.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.873.300,- atau sebesar 90,93%.

Realisasi fisik sub komponen ini adalah terealisasi 100% yaitu tersusunnya buku NSDH Provinsi sebanyak 1 (satu) buku.

055. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

A. Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

1. Jumlah anggaran : Rp.62.550.000,-
2. Realisasi fisik : 100 %
3. Realisasi keuangan : Rp. 58.628.200, - (93,73%)
4. Output : Laporan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyiapan areal kerja perhutanan sosial di 5 lokasi masing masing di Nagari Lubuk gadang Utara, Lubuk Gadang Selatan, Pakan Rebaa Timur (Solok Selatan), Taratak bancah (Sawahlunto) dan Talang Babungo (Solok).

Laporan Koordinasi penyiapan areal perhutanan sosial ke kementerian LHK, Balai Perhutanan Sosial dan kemitaraan Lingkungan Medan serta menghadiri workshop penyiapan dan pemetaan investasi Perhutanan Sosial dilampung dan Bogor Jawa Barat.
5. Outcome : Tersosialisasikannya Perhutanan Sosial ke Nagari prioritas dan terfasilitasinya penyiapan areal perhutanan sosial.

B. Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

1. Jumlah anggaran : Rp. 81.350.000,-
2. Realisasi fisik : 100 %
3. Realisasi keuangan : Rp. 75.242.700, - (92,50%)
4. Output : Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan perhutanan sosial di sembilan lokasi yang meliputi: LPHN Padang Limau Sundai, LPHN Pakan Rabaa (Solsel), LPHN Sungai Buluh, LPHN Lubuk Alung (Pdg Pariaman), LPHN Sungai Betung, LPHN Aia angek (Sijunjung), LPHN Sirukam (Solok), HKm Karya Setia, dan HKm Sontra (Pasaman).

Laporan konsultasi pengembangan kelembagaan dan pelimpahan kewenangan penyiapan areal serta perizinan Perhutanan Sosial ke KLHK
- Outcome : peningkatan dan penguatan Kelembagaan/kelompok penge lola perhutanan sosial dalam pengaturan administrasi, kepengurusan dan rencana kerja.

C. Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

1. Jumlah anggaran : Rp. 75.150.000,-
2. Realisasi fisik : 90 %
3. Realisasi keuangan : Rp. 60.542.000, - (80,56 %)
4. Output : Laporan pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan rekomendasi Hak Pengelolaan Hutan di 3 LPHN

masing masing LPHN Sirukam, LPHN Sariak Alahan Tigo dan LPHN Sungai Abu (Solok).

Laporan Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan percepatan perizinan Perhutanan Sosial ke Dirjen PSKL KLHK RI

5. Outcome : Percepatan Perizinan Hak Pengelolaan Hutan oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari dan pemberian HPHD seluas kurang lebih 8.820 Ha.

D. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial

1. Jumlah anggaran : Rp. 87.132.000,-
2. Realisasi fisik : 100 %
3. Realisasi keuangan : Rp. 81.182.000,- (93,17%)
4. Output : Laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perhutanan sosial di 6 lembaga yang meliputi Hutan Nagari Simancuang (Solsel), HKm Aur Serumpun, Hutan Nagari Sungai Buluh (Pdg Pariaman), Hutan Nagari Paru, HKm Lurah Basung dan HKm Sungai Tuo (Sijunjung).

Laporan Pelaksanaan Pelatihan singkat peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh 50 orang peserta dari 9 lembaga/kelompok perhutanan sosial yang sedang mengembangkan usaha hasil hutan bukan kayu, Agroforestry, silvopastur, wisata alam dan jasa lingkungan.

- Outcome : Peningkatan wawasan dan kemampuan pengelola Perhutanan Sosial dalam memetakan potensi usaha, diversifikasi produk usaha dan penyiapan koperasi (wadah usaha).

E. Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial

1. Jumlah anggaran : Rp. 71.940.000,-
2. Realisasi fisik : 100 %
3. Realisasi keuangan : Rp. 68.450.000, - (95,15%)
4. Output : Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan wawasan kewirausahaan Perhutanan Sosial melalui Sharing wawasan pengembangan usaha di Hutan Nagari Lubuk Beringin Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi yang diikuti oleh 30 orang yang terdiri atas 26 Peserta dari Lembaga/Kelompok Perhutanan Sosial dan 4 orang Pendamping dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Laporan hasil orientasi lokasi studi banding kewirausahaan dalam Perhutanan Sosial.

Outcome : Meningkatnya wawasan dan jiwa wirausaha Pengelola Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

056. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

A. Patroli/Operasi Pengamanan Hutan

1. Jumlah anggaran : Rp. 314.540.000,
2. Realisasi fisik : 100 %
3. Realisasi keuangan : Rp. 278.624.400, - (88,58%)

Dengan uraian :

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Patroli/Operasi Pengamanan Hutan Tahun 206

No	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1.	Pulbaket /Intelijen	61.320.000	61.320.000	-	100 %
2.	Patroli Pengamanan Hutan	37.050.000	36.250.000	800,000	99 %
3.	Koordinasi Pengamanan Hutan	25.410.000	24.225.000	1.185.000	95,3 %
4.	Penyelesaian kasus ke Kementerian LHK	32.500.000	30.618.400	1.881.600	94,2%
5.	Rapat Koordinasi Pamhut ke Prov. Bali	6.500.000	6.471.400	28.600	99,6%
6.	Fotokopi	2.000.000	2.000.000	-	100 %
	ATK	2.500.000	2.500.000	-	100 %
	BBM	2.496.150	2.496.150	-	100 %
	JUMLAH	169.776.150	165.880.950	3.895.200	98 %

Total persentase dari dua kegiatan dana DIPA BA 29 (01) Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **98 %**

057. Pengendalian Perubahan

A. Pengolahan Data dan Informasi Monitoring Hotspot

- Jumlah anggaran : Rp. 3.980.000,
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 2.020.000, - (50,75%)

B. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

- Jumlah anggaran : Rp. 284.870.000,
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 268.491.800, - (94,25%)

C. Pembentukan Masyarakat Peduli Api

- Jumlah anggaran : Rp. 67.370.000,
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 64.440.000, - (95,65%)

D. Monitoring Pelaksanaan Kebakaran Hutan

- Jumlah anggaran : Rp. 9.870.000,
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 7.620.000, - (77,20%)

Indikator Kinerja : Terlaksananya kegiatan pelatihan/pembekalan tenaga Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 1 (satu) kali, Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan MPA sebanyak 2 (dua) kali, Fasilitasi Pembentukan MPA sebanyak 2 (dua) kali, Bimbingan Teknis Kelompok MPA sebanyak 6 (enam) kali, Cross Check Hot Spot sebanyak 8 (delapan) kali, Simulasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 1 (satu) kali, Pengawasan dan pembinaan Senjata Api di Kabupaten/kota sebanyak 6 (enam) kali dan Konsultasi Pengendalian Kebakaran Hutan ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kali.

Output: Terjadinya pencegahan dan tertanggulangnya kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota.

Outcome : Menurunnya pelanggaran/kejahatan bidang kehutanan terutama kebakaran hutan di Kabupaten/Kota serta terpeliharanya sarana dan prasarana pengamanan hutan dan terjaganya kawasan hutan dari kebakaran hutan.

- Melaksanakan pengolahan data dan informasi hospot sebesar 12 kali.
- Melaksanakan peningkatan kelembagaan Bidang Pengendalian Kebakaran hutan berupa sosialisasi dan koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan di Kab/kota sebesar 6 kali.
- Melakukan Cros chek hospot sebesar 8 kali.
- Melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan sebesar 6 kali.
- Melakukan Pemadaman kebakaran Hutan di Lubuk Begalung sebesar 1 kali.
- Melakukan Monitoring kesiapan IUPHHK dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan sebesar 4 kali.
- Melakukan Rapat Koordinasi dengan kab/kota sebesar 1 kali.
- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring daerah rawan hospot sebesar 3 kali.
- Melaksanakan koordinasi pengendalian kebakaran hutan ke kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 1 kali.

Dari jumlah anggaran tersebut diatas terdapat sisa sebanyak Rp. 74.081.400,- adapun rincian sisa dana tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Bahan Bakar Minyak kegiatan Pengolahan data dan monitoring hospot sebesar Rp. 946.100,-
 - Uang harian monitoring daerah rawan hospot Rp. 6.840.000,-
 - Penginapan dalam rangka monitoring daerah rawan hospot sebesar Rp. 3.900.000,-
 - Penginapan dalam rangka pemantauan hospot sebesar Rp. 1.560.000,-
 - Uang harian pemantauan hospot instansi kehutanan kab/kota sebesar Rp. 150.000,-
 - Uang harian instansi kehutanan kab/kota dalam rangka monitoring Rp. 2.250.000,-
 - Belanja barang non operasional sebesar Rp. 1.215.700,-
 - Bahan bakar dalam rangka Patroli pencegahan kebakaran hutan sebesar Rp. 4.474.300,-
 - Makan minum anggota MPA sebesar Rp. 4.200.000,-
 - Belanja barang untuk persediaan konsumsi sebesar Rp. 14.925.000,-
 - Belanja ATK dan komputer suplier sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 67.914.000,-
 - Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp. 10.696.000,-
 - BBM pemadaman Karhutla sebesar Rp. 2.996.000,-
 - Makan minum buruh sebesar Rp. 2.490.000,-
 - Koordinasi ke kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 6.274.000,-
 - Perjalanan dinas rapat koordinasi karhut sebesar Rp. 3.810.700,-
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan Bidang pengendalian karhut sebesar Rp. 13.775.100,-
 - Belanja barang non operasional lainnya sebesar 11.097.300,-
 - Perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 56.275.800,-
 - Perjalanan dinas ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 16.470.000,-
 - Koordinasi studi koferatif pengendalian karhut ke luar Provinsi sebesar Rp. 25.306.800,-
 - Uang harian koordinasi dalkarhut ke kab/kota sebesar Rp. 11.400,-
 - Penginapan koordinasi Dalkarhut ke kab/kota sebesar 3.099.000,-
 - Belanja perjalanan dinas Mitting luar kota sebesar Rp. 44.002.000,-
 - Penginapan petugas Provinsi sebesar Rp. 10.782.000,-
 - Monev Pengendalian kebakaran Hutan sebesar Rp. 38.438.800,-
 - Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp. 1.195.100,-
 - Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 34.043.700,-
 - Tansportasi ke Kepulauan Mentawai Rp. 2.266.500,
 - Penginapan dalam rangka Monev Rp. 4.717.200,-
 - Perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 1.500.000,-
- Uang harian Monev karhut instansi Kehutanan kab/ kota sebesar Rp. 1.500.000,-

060. Program, Evaluasi dan Pelaporan

A. Program, Evaluasi dan Pelaporan

- Jumlah anggaran : Rp. 318,213,000,-
- Realisasi fisik : 100 %
- Realisasi keuangan : Rp. 305.953.235 (96,15%)

Tabel 2.4. Realisasi Kegiatan pada Program, Evaluasi dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi Tahun 2016

MAK	URAIAN	Jumlah	Realisasi			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN (Rp)	(%)	Fisik	
060	Program, Evaluasi dan Pelaporan	318,213,000	305,953.235	96.15	100	12.259765
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,000,000	103,630	10.36	100	896,370
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	155,550,000	155,550,000	100	100	-
521211	Belanja Bahan	6,350,000	3,970,000	62.52	100	2,380,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,510,000	4,510,000	100	100	-
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	17,000,000	16,995,905	100	100	4,095
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	735,000	200,000	27.21	100	535,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,700,000	3,700,000	100	100	-
524111	Belanja perjalanan biasa	98,575,000	99,796,000	92,11	100	6,889,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30,793,000	30,127,700	97.84	100	665,300

H. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi Tahun 2016 pada Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan adalah adanya penghematan anggaran yang terjadi pada bulan September 2016. Kebijakan penghematan anggaran ini terkait langsung keluaran (*output*) yang dihasilkan nantinya.
- b. Adanya keterlambatan dalam pencairan dana; Kegiatan berada di KPA bidang lain; Adanya pemotongan anggaran (rasionalisasi) secara mendadak, sehingga berpengaruh pada penjadwalan kegiatan; Adanya komitmen bahwa penyelesaian kasus dilaksanakan oleh Dinas bersama instansi terkait di Kabupaten/Kota, sehingga anggaran khusus kegiatan penyelesaian kasus Tipihut tidak dapat terserap seluruhnya
- c. Secara umum permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pada Konservasi dan Jasa Lingkungan Tahun 2016 tidak dijumpai permasalahan yang berarti. Namun untuk pelaksanaan kegiatan insentif dengan mekanisme HOK tidak begitu efektif mengingat standart yang terlalu rendah dan tidak semua satgas PPHBN dapat menerima dengan merata. Dan terlambatnya pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan, khususnya yang bersumber dari APBN yakni baru bisa digunakan pada bulan Juni 2016 mengakibatkan tidak sesuaiya pelaksanaan kegiatan dengan yang telah direncanakan.
- d. Adanya keterlambatan pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang karena penetapan KPA juga terlambat dan baru keluar pada Bulan April 2016, sehingga berimbas juga kepada keterlambatan dimulainya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat khususnya Seksi Rencana Kawasan Hutan. Pelaksanaan kegiatan efektif baru bisa dimulai pada Bulan April tahun 2016; Penyelesaian akhir pelaksanaan kegiatan antara lain peng-SPJ-an, pelaporan, pengamatan realisasi anggaran yang disebabkan oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana pendukung kegiatan yang dimiliki

Solusi :

- a. Solusi yang ditempuh terhadap permasalahan ini dengan pengurangan target fisik (*output*) pada Sub Komponen Sosialisasi Batas Kawasan Hutan sebanyak 1 lokasi dengan mempertimbangkan progres pelaksanaan serta kaitanya dengan *output* yang akan dihasilkan nantinya.
- b. Menyelesaikan persyaratan administrasi kegiatan terlebih dahulu sambil menunggu pencairan dana, seperti penyiapan SK, juklak, juknis, TOR, dsb ; Melakukan koordinasi dengan KPA DIPA Satker terkait guna rnenyepakati teknis pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan syarat-syarat administrasi sesegera mungkin; Melakukan kegiatan sesegera mungkin pada waktu/ jadwal yang sudah ditetapkan, Tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya walaupun harus merubah *time schedule* kegiatan; dan Penyerapan anggaran akan diupayakan dalam penanganan kasus hasil operasi Pengamanan Hutan Gabungan Tingkat Provinsi yang bekerjasama dengan Polda Sumatera Barat

- c. Mengambil kebijakan sendiri dengan menanggulangi biaya untuk pelaksanaan tugas terlebih dahulu untuk memperoleh hasil sebagaimana yang sudah diperintahkan dan diinginkan oleh pimpinan; Lebih sering menggunakan personil yang memiliki kemampuan bagus dengan harapan bisa memicu semangat staf yang lain untuk berusaha menjadi lebih baik; Disaran kepada pimpinan agar mengalokasikan kegiatan untuk masing-masing kegiatan perseksi
- d. Berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait pencairan anggaran mestinya anggaran untuk penyelenggaraan dekonsentrasi sudah dapat dilaksanakan pada awal Bulan Januari, pemerintah mestinya bisa menghindari penyebab-penyebab yang bisa berimbas kepada keterlambatan pencairan anggaran khususnya yang bersumber dari DIPA; Ketentuan yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan mestinya konsisten atau tidak terlalu sering mengalami perubahan dan walaupun ada perubahan hendaknya diberlakukan pada awal tahun anggaran bukan dalam tahun berjalan.

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini menyajikan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2016. Sebagai pertanggung jawaban atas Penyelenggaraan Urusan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap akhir tahunnya melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan baik realisasi fisik maupun keuangan.

Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 terdiri atas :

A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 mengemban amanat Penyelenggaraan 2 Urusan yaitu Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Alokasi Dana berdasarkan DPPA untuk kedua urusan tersebut sebesar Rp. 15.569.840.425,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.570.138.936 (87,16%) dan realisasi fisik sebesar 99,75%. Namun berdasarkan penundaan, dengan dana Rp. 14.398.527.115,- didapatkan realisasi keuangan sebesar 94,25%. dengan rincian :

1. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 sebanyak 4 Program dengan 19 Kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini Rp 5.985.360.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.031.067.085 (84,06 %) dan realisasi fisik 100 %. Berdasarkan penundaan, dengan dana Rp. 5.599.783.100 didapatkan realisasi keuangan sebesar 89,84%.
2. Urusan Pilihan Kehutanan Tahun 2016 terdiri dari 9 program dan 50 kegiatan, Alokasi anggaran sebesar Rp 9.584.480.025,- dan realisasi keuangan Rp 8.539.071.851,- (89,09 %) dengan realisasi fisik 99,59 %. Berdasarkan penundaan, dengan dana Rp. 8.798.744.015 didapatkan realisasi keuangan sebesar 97,05%.

B. Penyelenggaraan Dekonsentrasi (APBN)

Penyelenggaraan Dekonsentrasi merupakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi serta 1 output yaitu presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 029 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2016.

Kegiatan Dekonsentrasi DIPA 029 (080053) Tahun 2016 pada Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.386.980.000,- .

Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi sampai akhir tahun 2016 untuk fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.121.391.985,- atau 92,16%. Namun begitu dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala dan permasalahan misalnya terkait koordinasi baik ditingkat provinsi, kabupaten/ kota maupun dengan pusat, disamping itu juga adanya keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga Polisi Kehutanan

Untuk kedepannya, pada kegiatan Dana Dekonsentrasi (APBN), perlu peningkatan Koordinasi antar Instansi yang terkait Pengamanan dan Perlindungan Hutan baik dengan tingkat Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota/UPT, sehingga upaya pengamanan dan perlindungan hutan ini dapat dilaksanakan dengan optimal yang pada akhirnya akan tercapai kondisi hutan aman dan tetap lestari. Penambahan sarana dan prasarana pendukung, dan perlu rekrutmen tenaga pengamanan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, untuk mengatasi kekurangan tenaga Polhut

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.